DAPUR UMUM
MASA PERANG KEMERDEKAAN II
DI YOGYAKARTA

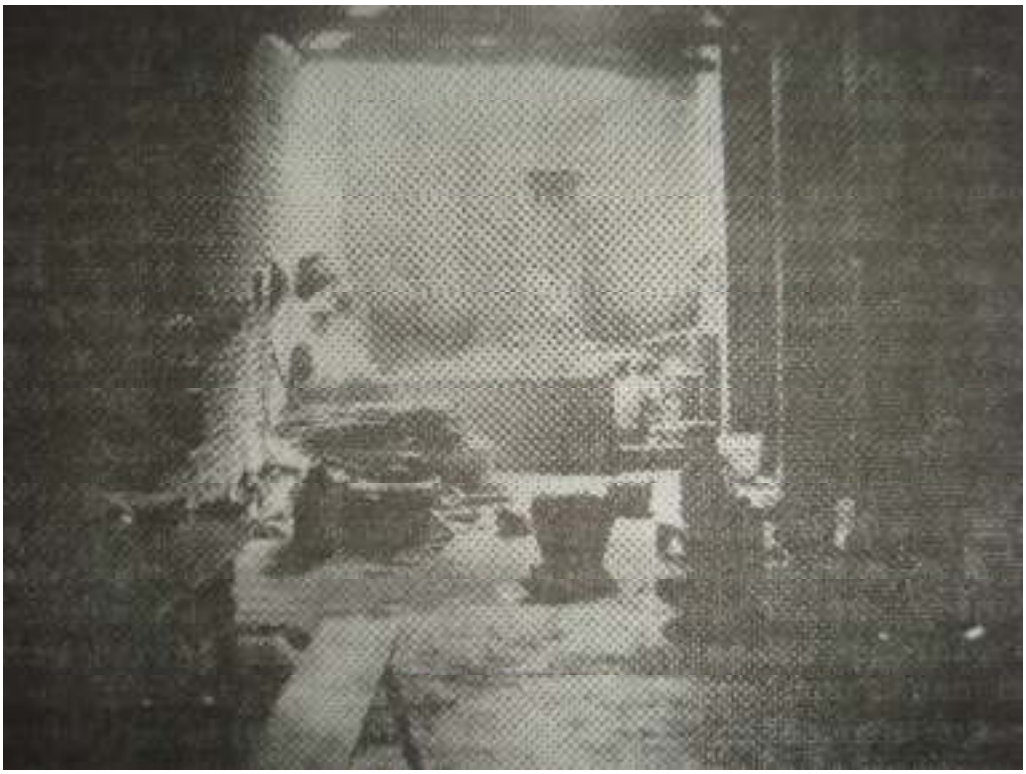

Penulis:
Winarni,SS.
V.Agus Sulisyo, S.Pd. MA.
Yustina Hastrini Nurwanti,SS.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA
2013

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang partisipasi rakyat Yogyakarta di bidang dapur umum masa perang kemerdekaan. Keterlibatan rakyat dalam perjuangan terjadi di mana-mana, terutama di daerah basis perang gerilya. Keterlibatan rakyat dalam perjuangan di bidang dapur umum juga terjadi di mana-mana, terutama di daerah yang dijadikan markas gerilya. Permasalahan yang diungkap dalam tulisan ini, bagaimana peran serta rakyat di bidang dapur umum khususnya penyediaan logistik atau makanan bagi para pejuang. Keberadaan dapur umum tidak terlepas dari aktivitas masak-memasak. Dalam memasak tentu saja dipergunakan peralatan pendukungnya. Peralatan ataupun benda yang pernah dipergunakan dalam keberlangsungan dapur umum yang menjadi koleksi museum juga dikemukakan untuk mendukung tulisan.

Sepanjang jalur yang dilalui atau tempat yang dijadikan markas gerilya dimungkinkan ada dapur umum. Keterbatasan sumber, tulisan mengenai dapur umum hanya di beberapa tempat yang terkaver sehingga merupakan kumpulan serpihan dapur umum yang ada di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan pencarian sumber ke Arsip nasional dan Perpustakaan Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan dapur umum ada yang sudah terkoordinasi dan ada yang sifatnya spontan.

Katakunci: Dapur Umum, Masa Perang Kemerdekaan, Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan pengkajian yang mengambil tema tentang Dapur Umum Masa Perang Kemerdekaan II di Yogyakarta. Dengan telah selesainya pengkajian koleksi ini maka tak lupa kami menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Kepala Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta yang telah memmberikan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan pengkajian koleksi.

2. Para narasumber yang telah memberikan informasi dan data yang sangat bermanfaat dalam mendukung penyusunan laporan pengkajian koleksi ini.

3. Tim pengkajian koleksi atas kerjasamanya dari proses pengumpulan data sampai dengan penyusunan laporan pengkajian koleksi ini.

4. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama proses pengkajian sampai penyusunan laporan pngkajian.

Dalam penyusunan laporan ini, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, akan tetapi kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurnan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan kajian ini dan kajian-kajian lain di masa yang akan datang.

Yogyakarta, Juni 2013
Tim Pengkajian

DAFTAR ISI

ABSTRAK..... i
PENGANTAR..... ii
DAFTAR ISI..... iii
BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Permasalahan..... 4
C. Ruang Lingkup..... 4
1. Ruang lingkup materi..... 4
2. Ruang lingkup temporal..... 4
3. Ruang lingkup spasial 5
D. Tujuan..... 5
1.Tujuan umum 5
2. Tujuan khusus 5
E. Metode Penelitian 6
F.Sistematika Penulisan 7

BAB II. PENDUDUKAN JEPANG SAMPAI DENGAN AGRESI MILITER BELANDA II 8
A. Yogyakarta Masa Pendudukan Jepang 8
B. Masa Awal Kemerdekaan 25
C. Pendudukan Ibukota RI Oleh Belanda 48
D. Perlawanan Rakyat Semesta..... 62

BAB III. AKTIVITAS DAPUR UMUM MASA PERANG KEMERDEKAAN II DI YOGYAKARTA..... 73
A. Dapur Umum Di Sleman..... 77
B. Dapur Umum Di Bantul..... 94
C. Dapur Umum Di Kota Yogyakarta..... 103
D. Dapur Umum Di Kulonprogo..... 108
E. Dapur Umum Di Gunungkidul..... 114

BAB IV. KOLEKSI MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA TERKAIT DENGAN DAPUR UMUM..... 118
A. Kabupaten Bantul 119
B. Kabupaten Sleman 125
C. Kabupaten Kulonprogo 134
D. Kabupaten Gunungkidul..... 139

BAB V. PENUTUP 143
DAFTAR PUSTAKA..... 147

BAB I
PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 memberikan peluang kepada bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Peralihan kekuasaan dari tangan Jepang kepada Sekutu oleh para pemimpin bangsa Indonesia dimanfaatkan untuk melepaskan diri dari kekuasaan asing. Setelah beberapa minggu kekuasaan di tangan pemerintah Indonesia, pasukan Sekutu yang terdiri dari pasukan Inggris mendarat di pulau Jawa. Kedatangan pasukan Sekutu ini diboncengi oleh NICA.

Kedatangan pasukan Sekutu ke Indonesia bertujuan melucuti senjata tentara Jepang yang ada di Indonesia dan untuk melindungi wanita dan anak-anak warga negara Belanda yang ditawan Jepang. Namun ternyata bahwa tujuan lain pun timbul, malah boleh dikata ini merupakan tujuan utamanya yaitu memberi kesempatan kepada Belanda untuk kembali menduduki Indonesia. Masuknya Sekutu yang diboncsngi Belanda itu sudah barang tentu menimbulkan kewaspadaan para pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia yang sepakat untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kembali proklamasi kemerdekaan. Mulailah bangsa Indonesia bertekad berjuang mempertahankan kemerdekaannya melawan Sekutu dan Belanda, setelah berhasil merebut kekuasaan dari tangan tentara Jepang dan melucuti senjatanya. Tugas utama rakyat Indonesia pada waktu itu adalah melawan intervensi Sekutu dan agresi Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Masa perlawanan rakyat Indonesia terhadap intervensi Belanda disebut sebagai masa revolusi.

Pengertian revolusi Indonesia sebagai proses total untuk membongkar sistem politik kolonial dan menggantikannya dengan negara nation berdasarkan kedaulatan

rakyat serta pemerintah yang dipilihnya sendiri. Dalam definisi jenis revolusi ini melekatlah cirinya yang khas, ialah anti kolonialisme di satu pihak dan di pihak lain *self determination*.

Dalam revolusi kemerdekaan, hampir seluruh masyarakat ikut terlibat. Simatupang dalam tulisannya Laporan Dari Banaran menyatakan bahwa perang kemerdekaan merupakan perjuangan rakyat yang artinya banyak melibatkan lapisan masyarakat. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan selain dengan cara diplomasi oleh para pemimpin bangsa, tidak boleh dikesampingkan juga peranan rakyat yang ikut mendukung jalannya revolusi. Keterlibatan rakyat ada yang terwadahi dalam organisasi atau badan perjuangan maupun yang tidak terwadahi karena sifatnya spontan.

Pidato yang dilakukan para pemimpin bangsa melalui media radio merupakan sarana agitasi politik untuk memobilisasi massa sehingga rakyat merasa ada kewajiban moral untuk berjuang. Kegelisahan, kebencian, dan kemarahan disuarakan sehingga menimbulkan keberanian, semangat agresif, dan kebulatan tekad untuk berjuang demi mempertahankan kemerdekaan.

Sebagian rakyat mempersenjatai diri dan masuk dalam badan-badan perjuangan. Senjata yang digunakan berupa bambu runcing, keris, dan senjata api hasil rampasan. Rakyat berjuang di manapun secara spontan. Disamping yang ikut berjuang di medan pertempuran, ada perjuangan rakyat lainnya yang juga membantu untuk mempertahankan kemerdekaaan. Rakyat, baik pria maupun wanita, tua maupun muda, terlibat dalam perjuangan yang kegiatannya mencakup pertahanan kampung, penjagaan keamanan, pengumpulan dana, palang merah, dan dapur umum. Kesemua kegiatan perjuangan tersebut sangat penting dan saling mendukung satu sama lain dalam mempertahankan kemerdekaan.

Keberlangsungan perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak akan lama apabila tidak ada asupan makanan sebagai energi untuk tetap mampu berjuang. Makanan sebagai asupan energi bagi pejuang yang tergabung dalam badan perjuangan, sudah barang tentu ada yang menyediakan dan mempersiapkan. Penyediaan makanan tidak bisa dilepaskan dari keberadaan dapur. Di sinilah peran rakyat sangat besar dalam menyediakan makanan bagi para pejuang. Partisipasi rakyat dengan menyediakan dapur umum mempunyai peranan yang tidak kalah pentingnya dengan badan-badan perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Keberadaan Dapur umum senantiasa mengikuti perjuangan yang ada di mana pun, khususnya tempat yang dijadikan sebagai markasnya. Seluruh wilayah Yogyakarta, baik kota maupun empat kabupaten, menjadi ajang perjuangan para pejuang Indonesia sehingga dapur umum pun berada di semua wilayah tersebut.

Penyebutan dapur umum di Yogyakarta, pada masa awal kemerdekaan Indonesia maupun perang kemerdekaan kedua, bagi masyarakat bukanlah hal yang asing melainkan sangat dikenal. Dapur secara harafiah berarti bagian rumah tempat untuk masak-memasak. Dapur umum berarti tempat menyediakan makanan untuk umum. Dapur umum pada masa mempertahankan kemerdekaan berarti menyediakan makanan dan minuman bagi para pejuang.

Partisipasi atau perjuangan rakyat dalam dapur umum belum banyak diungkap secara mendalam, hanya berupa potongan tulisan dalam paparan sejarah suatu daerah maupun tokoh pejuang serta badan perjuangan. Beberapa tulisan dengan topik revolusi belum begitu banyak menguraikan tentang keikutsertaan rakyat dalam perjuangan di bidang dapur umum. Tulisan yang memaparkan mengenai revolusi umumnya lebih banyak mengupas tentang perjuangan bersenjata dan militer. Hal ini menjadi suatu alasan yang penting untuk memunculkan suatu tulisan atau kupasan

mengenai peranan dapur umum pada masa perang kemerdekaan di wilayah Yogyakarta.

B.Permasalahan

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian adalah dapur umum masa perang kemerdekaan tahun 1945-1949 di Yogyakarta beserta situasi yang memunculkan keberadaan dapur umum tersebut. Penelitian ini ingin mengungkap:

1. Bagaimana kondisi Yogyakarta dari masa awal kemerdekaan sampai Agresi Militer Belanda II.
2. Bagaimana perjuangan rakyat Yogyakarta dalam mempertahankan kemerdekaan.
3. Bagaimana peranan dapur umum di wilayah Yogyakarta pada masa perang kemerdekaan.

C. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup materi

Dalam konteks ini materi penelitian adalah peranan dapur umum pada masa perang kemerdekaan 1945-1949 di Yogyakarta dan koleksi museum yang terkait dengan dapur umum tersebut. Dapur umum masa perang kemerdekaan I akan diungkapkan yang terkait dengan peristiwa Kotabaru. Sedangkan masa perang kemerdekaan II akan diungkapkan dapur umum di wilayah Yogyakarta terkait dengan perjuangan gerilya para pejuang.

2.Ruang lingkup temporal

Ruang lingkup waktu antara tahun 1945-1949. Tahun 1945 merupakan titik awal kemerdekaan Indonesia yang kemudian dilanjutkan untuk mempertahankan kemerdekaannya. Tahun 1949 karena pada masa ini peranan rakyat di bidang dapur umum tersebar di berbagai wilayah Yogyakarta terkait dengan perang gerilya yang

dilakukan. Dalam pemikiran sejarah bahwa secara kontekstual suatu peristiwa harus dipandang sebagai kesatuan dimensi waktu, sepanjang masih ada keterkaitan kausalitas (sebab-akibat) sehingga tidak menutup kemungkinan akan dibahas peristiwa sebelumnya yang terkait.

3.Ruang lingkup spasial

Ruang lingkup tempat yang menjadi bahasan meliputi wilayah Yogyakarta, karena masa perang kemerdekaan II, dapur umum menyebar di lima wilayah Yogyakarta yaitu: Kota Yogyakarta dan empat kabupaten (Sleman, Kulonprogo, Bantul, dan Gunungkidul).

D.Tujuan

Kegiatan penelitian atau pengkajian koleksi museum terkait dengan dapur umum di Yogyakarta antara lain:

1.Tujuan umum:

a. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan eksistensi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta sebagai pelayan masyarakat terkait dengan fungsinya sebagai pusat studi, penelitian, dan rekreasi.
b. Mewujudkan misi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta sebagai sumber informasi tentang sejarah dan budaya.
c. Meningkatkan fungsionalisasi Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta sebagai laboratorium sejarah.

2. Tujuan khusus

a.Memberikan informasi tentang perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya, terutama di Yogyakarta.
b. Mengungkapkan bagaimana peranan atau partisipasi masyarakat dalam mendukung perjuangan mempertahankan kemerdekaan, khususnya di bidang dapur umum.

E. Metode Penelitian

Penelitian dalam kegiatan pengkajian koleksi ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah suatu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.[1] Metode sejarah adalah sekumpulan prinsip dan aturan sistematis yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan bagi sejarah, menilai secara kritis, dan kemudian melakukan sintese dari pada hasil-hasilnya.[2]

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti diperlukan untuk pengumpulan data di lapangan. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, teknik yang digunakan sangat menentukan.[3] Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara. Tahap-tahap penelitian yang digunakan meliputi heuristik, yaitu mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah.[4] Tahap selanjutnya adalah kritik sumber baik intern maupun ekstern. Fakta yang didapat dari tahapan ini, kemudian dirangkai menjadi satu kesatuan yang kemudian diinterpretasi (ditafsirkan) dengan memakai pemikiran dan sumbangan dari disiplin ilmu lain. Proses terakhir menuangkan dalam bentuk penulisan sejarah (historiografi) yang akan dipaparkan secara deskriptif naratif (memberikan penjelasan dengan menyajikan dalam bentuk cerita tertulis).

Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan peneliti:

1. Studi koleksi museum, yaitu mengidentifikasi koleksi museum yang terkait dapur umum masa perang kemerdekaan di Yogyakarta.

---

[1] Louis Gotschalk, Mengerti Sejarah, Cetakan V, Terjemahan Noegroho Notosoesanto, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia/UI Press, 1986:hal.34.

[2] Noegroho Notosoesanto, Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Suatu Pengantar), Ceramah tanggal 3 Desember 1977 di Gedung Kebangkitan Nasional, Jakarta: Yayasan Idayu, 1978: hal.10-11.

[3] Ibnu S., *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Malang: Universitas Negeri Malang, 2003:97-98.

[4] Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Depdikbud,1996:19.

2. Studi pustaka, dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber pustaka yang terkait dengan dapur umum masa perang kemerdekaan di Yogyakarta.
3. Studi lapangan, dengan mengadakan pengumpulan data informasi (data visual, nara sumber, data literatur) dari lapangan. Dalam tahap ini peneliti mendatangi wilayah di Yogyakarta yang pernah dijadikan dapur umum masa perjuangan. Hal ini dimaksudkan pula untuk mendokumentasikan tempat bersejarah terkait dengan dapur umum masa perjuangan di wilayah Yogyakarta.
4. Penulisan laporan, hasil atau data dari semua tahapan yang dikumpulkan kemudian dirangkum dan dianalisa menjadi bentuk laporan hasil penelitian.

F.Sistematika Penulisan

Kerangka penulisan mengenai pengkajian koleksi museum dengan judul Dapur Umum Masa Perang Kemerdekaan di Yogyakarta akan dibagi menjadi lima bab.

Bab I, memuat tentang latar belakang mengapa tema mengenai dapur umum penting untuk dikaji. Disamping itu memuat juga rumusan masalah terkait dengan judul yang dikaji. Disamping itu juga memuat dua intrumen penting yang harus ada dalam suatu penelitian yaitu: tujuan dan metode penelitian.

Bab II, memuat tentang masuknya tentara Belanda ke Yogyakarta.

Bab III, memuat tentang perang gerilya di Yogyakarta yang terbagi dalam wehrkreise

Bab IV, memuat tentang dapur umum yang ada di Yogyakarta.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan.

BAB II
PENDUDUKAN JEPANG SAMPAI DENGAN AGRESI MILITER BELANDA II

A. Yogyakarta Masa Pendudukan Jepang

Ketika beberapa kota di Indonesia menemui nasib yang sama yaitu dikuasai oleh pasukan Jepang, maka demikian pula Kota Yogyakarta. Belanda, yang waktu itu menjadi penguasa atas kota-kota di Indonesia sebagai negeri jajahannya gagal mempertahankan. Usaha Belanda untuk membendung kekuatan pasukan dari Negara Matahari Terbit tersebut mengalami kegagalan. Pada tanggal 1 Maret 1942, pasukan Jepang berhasil mendarakan pasukannya di Pulau Jawa yaitu di Banten, Indramayu dan Bojonegoro.[1]

Dari tempat-tempat tersebut, pasukan Jepang segera bergerak mendekati pusat-pusat kekuatan Belanda. Perlawanan yang dilakukan oleh pasukan Belanda seakan tidak memberikan dampak bagi laju ekspansi pasukan Jepang. Bahkan pada tanggal 8 Maret 1942 pihak Belanda menyatakan menyerah tanpa syarat kepada tentara pendudukan Jepang. Waktu itu *Jenderal Ter Poorten* selaku panglima tentara Belanda di Indonesia bersama dengan *Letnan Jenderal Imammura*[2] bersama-sama menandatangani naskah penyerahan tanpa syarat (kapitulasi) Belanda kepada tentara pendudukan Jepang. Peristiwa itu terjadi di Kalijati (Subang) Jawa Barat. Peristiwa itu kemudian disiarkan melalui Radio NIROM (*Nederlandsch-Indische Radio Omroep Maatschappij)* pada pukul 06.30 tanggal 9 Maret 1942. Dalam siaran tersebut disebutkan bahwa agar pasukan

---

[1] Moedjanto, G., *Indonesia Abad Ke – 20 1, Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggajati*, Yogyakarta,Penerbit Kanisius (CetakanKetiga),1992:hlm.72.

[2] Hitoshi Imamura merupakan pimpinan Komando Tentara Ke-16 *(Osamu Butai)*. Komando ini membawahi kesatuan yang khusus menguasai Pulau Jawa, yaitu Divisi Ke-2 yang mendarat di Jawa Barat, dan Divisi Ke-48 yangt mendarat di Jawa Tengah (Dekat Perbatasan Jawa Timur) (Poesponegoro dan Notosusanto, 2010 : 7).

Belanda tunduk pada tuntuan pasukan Jepang dan segera menghentikan perlawanan serta segera menghubungi komandan tertinggi Jepang di dalam atau di dekat wilayah masing-masing.[3]

Kapitulasi Kalijati tersebut, selanjutnya menjadi penanda munculnya jaman baru dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia. Sejak saat itulah Indonesia berhasil lepas dari penjajahan Belanda, namun bukan berarti telah merdeka. Zaman baru, dialami oleh Bangsa Indonesia yaitu Zaman Penjajahan Jepang yang berlangsung sejak tahun 1942 – 1945.

Pasukan Jepang memasuki Kota Yogyakarta pada tanggal 6 Maret 1942. Bergerak dari arah timur, datang dari Jl. Solo menuju kearah barat. Sesampainya di perempatan Tugu, pasukan belok kearah selatan menuju Jl. Malioboro selanjutnya ke Gedung Agung. Iring-iringan pasukan Jepang ini menggunakan kendaraan truk, bersepeda dan berjalan kaki. Guna menarik simpati rakyat Yogyakarta, maka para serdadu Jepang menyerukan "Nippon Indonesia Sama-sama", serta mengumandangkan lagu Indonesia Raya.[4]

Segala sesuatu yang masih ada unsur barat (Belanda) dibubarkan. Buku-buku berbahasa Inggris dan Belanda dilarang beredar. Sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Belanda ditutup seperti HIS (*Hollandsch-Inlandsche School)*, MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs)*, AMS (*Algeme(e)ne Middelbare School).* Hal ini mengakibatkan banyak anak menjadi

---

[3] Poesponegoro, Mawarti Djoenet dan Notosusanto, Nugroho. *Sejarah Nasional Indonesia VI, Zaman Jepang dan Zaman Republik. Edisi Pemuthakiran,* Jakarta ,BalaiPustaka.2010:hlm.12 dan 14.

[4] Kebebasan untuk mengibarkan bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya kembali dilarang oleh tentara pendudukan Jepang berdasarkan maklumat Jenderal Imammura tanggal 20 Maret 1942. Dalam maklumat tersebut terdapat larangan untuk segala macam pembicaraan, pergerakan dan anjuran propaganda perihal peraturan dan susunan negara. Juga melarang pengibaran Sang Merah Putih serta menyanyikan lagu Indonesia raya, yang semula diijinkan (Moedjanto, 1992 : 74).

putus sekolah dan menganggur. Sebagian dari mereka ada yang pindah ke sekolah swasta yang memiliki identitas nasional dan anti penjajah. Salah satu sekolah tersebut adalah Tamansiswa Yogyakarta. Dengan demikian dalam secara mendadak sekolah tersebut menjadi kebanjiran murid. Siswa yang datang dari Sumatera, Sulawesi, Bali, Madura, Maluku, dan di tambah dari Pulau Jawa Sendiri. Juga pabrik cerutu *NEGRESCO* (Tarumartani) pada masa pendudukan Jepang diubah namanya menjadi Pabrik Rokok *KOA*.[5]

Dalam rangka ekspansinya ke berbagai daerah di Asia, termasuk Indonesia, pasukan Jepang telah melakukan persiapan sejak awal. Melalui Radio Tokyo, disiarkan tentang maksud kedatangan Jepang yang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan bangsa barat (Belanda). Bendera Merah Putih dan Lagu Indonesia Raya yang dilarang tampil di ruang-ruang publik pada masa penjajahan Belanda mulai diperbolehkan. Maksud dari semua itu tidak lain adalah hanya untuk menarik simpati rakyat agar tidak menyusahkan Jepang ketika memasuki Indonesia.

Selain itu dalam rangka persiapan gerakan militer, banyak opsir-opsir militer Jepang menyamar menjadi distributor atau agen-agen barang dagangan Jepang. Mereka menjadi pemilik toko-toko Jepang. Melalui para pemilik toko Jepang yang sebenarnya adalah opsir tentara Jepang tersebut, pasukan pendudukan Jepang dengan mudah memperoleh informasi tentang daerah-daerah

[5] Marsudi, Jamal. 1985. *Sejarah Perjuangan Yogya Benteng Proklamasi.* Yogyakarta : Barahmus DIY,1985:hlm.21 dan 23

yang didudukinya. Salah satu toko Jepang di Yogyakarta yang pemiliknya adalah opsir pasukan Jepang adalah Toko Fuji.[6]

Dibawah pendudukan Jepang, Indonesia berada dalam tiga pemerintah militer pendudukan, yaitu:[7]

1. Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara Ke – 25) untuk Sumatra dengan pusatnya di Bukit Tinggi.
2. Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara Ke – 16) untuk Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta.
3. Pemerintahan Militer Angkatan Laut (Armada Selatan Kedua) untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, Maluku dengan pusatnya di Makassar.

Panglima Tentara ke – 16 di Pulau Jawa yang pertama adalah *Letnan Jenderal Hitoshi Imammura*. Kepala staffnya adalah *Mayor Jenderal Seizaburo Okasaki*, yang diserahi tugas membentuk pemerintah militer di Jawa dan kemudian diangkat menjadi *Gunseikan.* Staf pemerintah militer pusat dinamakan *Gunsikanbu*, yang didalamnya terdapat *bu* (semacam departermen), yaitu *Somobupu* (Departemen Urusan Umum), *Zaimubu* (Departemen Keuangan), *Sangyobu* (Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajinan Tangan), dan *Kotsubu* (Departemen Lalu Lintas) dan *Shihobu* (Departemen Kehakiman). Sebagai koordinator pemerintah militer setempat disebut *gunseibu,* yang dibentuk di Jawa Barat dengan pusatnya di Bandung dan di Jawa Timur dengan pusatnya di Surabaya. Selain itu dibentuk pula 2 daerah istimewa *(koci)* yaitu Surakarta dan Yogyakarta.[8]

---

6 Moedjanto, op.cit.,hlm.67.
7 Poesponegoro dan Notosusanto, op.cit., hlm.14.
8 Ibid.,hlm.15.

Pada setiap departemen terdapat seorang penasehat yang disebut *Sanyo* yang sangat diperlukan keberadaanya. Selanjutnya pada tahun 1943 di tingkat pusat dibentuk *Cuo Sangi In* (Dewan Penasehat), yaitu sebuah badan yang mirip dengan *Volksraad*. Sebagai ketua dan wakil ketua *Cuo Sangi In* masing-masing Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta. Juga terdapat pula semacam Mahkamah Agung yang disebut *Siko Hooin* yang menyelenggarakan urusan pengadilan. Juga sebuah badan yang sangat penting dan ditakuti ilah *Kempeitei* atau Polisi Militer yang peranannya mirip dengan *Gestapo* Jerman.[9]

Untuk mengatur pemerintahan pada kedua daerah itu maka dikeluarkan peraturan khusus yang menetapkan adanya pemerinthan Yogyakarta *Koci* dan Surakarta *Koci* yang nantinya akan dipimpin oleh Yogyakarta *Koo Koci* dan Surakarta *Koo Koci*. Di hadapan pembesar Jepang, Beliau berkata bahwa untuk segala hal yang berhubungan dengan masalah Kasultanan Yogyakarta hendaknya dibicarakan terlebih dahulu dengan Sultan.[10] Hal itu dilakukan agar Sri Sultan HB IX dalam selalu memimpin dan melindungi rakyat Yogyakarta. Selanjutnya Sri Sultan Hamengku Buwono IX dikukuhkan kedudukannya sebagai penguasa dan Sultan Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1942 oleh Pembesar Tentara Jepang di Jakarta (Istana Merdeka Sekarang).[11]

Untuk melaksanakan tugas sebagai Yogyakarta *Koo Koci* dibentuklah Kantor Urusan Kasultanan yang akan menguasai jalannya pemerintahan yang

---

[9] Moedjanto,hlm.76.

[10] Kutoyo, Sutrisno. "*Sri Sultan Hamengkubuwono IX Riwayat Hidup dan Perjuangan",* Jakarta : Mutiara Sumber Widya (Anggota IKAPI),1997:hlm. 111.

[11] Sebelum dilantik Sultan HB IX mendapatkan surat panggilan tanggal 6 Juli 1942 yang kemudian dibalas tanggal 8 Juli 1942. Dari isi balasan surat, sebenarnya Sultan HB IX berusaha melepaskan diri dari pangeruh Jepang dan melawannya secara diam-diam. Sikap itu diakui pula disampaikan dalam pidato pelantikannya secara ekplisit tanggal 1 Agustus 1942 (Suwarno, 1994 : 98).

dipimpin oleh *Koci Jimu Kyoku*. Sultan HB IX selaku Yogyakarta *Koo Koci,* dibantu oleh *Somu Cokan* (patih) yang diangkat oleh Yogyakarta *Koo Koci* dan harus selalu berhubungan erat dan berkoordinasi dengan *Koci Jimu Kyoku*. Tentang hal penting yang akan dilakukan oleh *Somu Cokan* harus disetujui dulu oleh *Koci Jimu Kyoku.* Ketika masa pendudukan Jepang di Yogyakarta, yang diangkat sebagai *Somu Cokan* adalah Pangeran Hario Adipati Danurejo (KasultananYogyakarta) dan Pangeran Haryo Suryoatmojo (Kadipaten Pakualaman). Sementara itu yang diangkat sebagai Yogyakarta *Jimu Kyoku Cokan* adalah *K. Yamauci.*[12]

Pada masa awal keberadaannya di Indonesia, Jepang masih merasa optimis menang tentang nasibnya dalam Perang Pasifik. Oleh karena itu merasa belum perlu memberdayakan tenaga rakyat Indonesia dalam urusan pemerintahan. Hal itu terbukti, bahwa dalam masa-masa awal berkuasa di Indonesia Jepang hanya mendirikan Gerakan Tiga A (Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia) sebagai alat propaganda. Gerakan tersebut didirikan pada tanggal 29 April 1942 dibawah pimpinan Mr. Syamsuddin. Gerakan 3 A untuk cabang Yogyakarta dipimpin oleh R.M. Suryodiningrat dan anggota pengurus lainnya adalah R.M. Nayono dan R. Sigitprawiro.[13] Kemudian untuk menggerakkan pemuda hanya dibentuk Gerakan Pemuda ATR (Asia Timur Raya) dibawah pimpinan Sukarjo Wiryopranoto.[14] Dalam pelaksanaanya Gerakan 3 A dipandang tidak efektif[15] dari kacamata Jepang, sehingga dibubarkan pada akhir

---

[12] Marsudi, op.cit.,hlm.21.
[13] Ibid.,hlm.24.
[14] Moedjanto, op.cit.,hlm.81.
[15] Tokoh-tokoh yang ditampilkan Jepang untuk memimpin Gerakan 3 A bukan merupakan tokoh yang dikenal oleh masyarakat sehingga Gerakan 3 A tidak mendapatkan sambutan luas. Tokoh-

tahun 1942.[16] Sebagai gantinya maka didirikanlah PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) pada tanggal 1 Maret 1943.[17] Putera dipimpin oleh para pemimpin Indonesia antara lain Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta, Ki Hadjar Dewantara dan Kyai Haji Mas Mansyur. Disamping pemimpin bangsa Indonesia, PUTERA memiliki penasehat orang Jepang. Mereka antara lain *S. Miyoshi* (bekas konsul Jepang di Jakarta), *G. Taniguci* (pemimpin surat kabar *Toindo Nipo*), *Ichiro Yamasaki* (pemimpin badang perdagangan), *Akiyama* (Bank Yokohama). Sebelum Perang Pasifik terjadi, mereka pernah tinggal di Indonesia.[18] Di Yogyakarta dibentuk cabang Putera yang dipimpin oleh B.P.H. Suryadiningrat. Organisasi ini mengumpulkan dana untuk korban banjir, dan perang Asia Timur Raya, mengadakan peninjauan ke desa-desa dan kegiatan social lainnya.[19]

Jepang berharap kehadiran para pemimpin Indonesia tersebut dapat mengundang simpati rakyat sehingga seluruh potensinya dapat terpusat untuk membantu Jepang dalam memenangkan perang. Namun pada kenyataannya keberadaan Putera dan kepopuleran para tokoh Indonesia, justru lebih banyak memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia, sehingga tentara pendudukan Jepang segera membubarkannya pada bulan Maret 1944.[20] Sebagai gantinya Panglima Tentara Ke – 16, Letnan Jenderal Kumakichi Harada menyatakan berdirinya organisasi *Jawa Hokokai*[21] (Himpunan Kebaktian Jawa).[22]

---

tokoh tersebut antara lain Mr. Syamsudin, K. Sutan Pamuncak, dan Muhammad Saleh (Marsudi, 1985 : 24)

16 Lapian, 1989 : hlm.9.

17 Poesponegoro dan Notosusanto,op.cit.,hlm.33.

18 Ibid.,hlm.34.

19 Marsudi,op.cit.,hlm.25

20 Moedjanto,op.cit.,hlm.82

21 Dengan berdirinya *Jawa Hokokai* pada tanggal 1 Maret 1944 maka Putera secara otomatis bubar dan melebur ke dalamnya (Marsudi, 1985 : 25).

22 Poesponegoro dan Notosusanto,op.cit.,hlm.35.

Untuk selanjutnya di setiap *Koci* didirikan *Jawa Hokokai*. Atas permintaan Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII maka di Yogyakarta *Koci Hokokai* adalah Sri Sultan HB IX sebagai ketua dan Sri Paku Alam VIII sebagai wakil ketua. Selanjutnya Yogyakarta Koci Hokokai dilantik pada tanggal 8 Maret 1944. Beberapa orang diangkat sebagai pengurus Yogyakarta Koci Hokokai antara lain B.P.H. Suryodiningrat, B.P.H. Puruboyo dan Ki Bagus Hadikusumo.[23]

Jawa Hokokai merupakan organisai sentral yang anggota-angotanya terdiri dari bermacam-macam *hokokai* sesuai dengan bidang profesinya. Para guru bergabung dalam *Kyoku Hokokai* (kebaktian para pendidik), para dokter bergabung dalam *Izi Hokokai* (kebaktian para dokter). Di dalam *Jawa Hokokai* terdapat anggota istimewa *(tokubetsu hokokai)* yang terdiri atas *Fujinkai* (organisasi perempuan). *Fujinkai* merupakan peleburan seluruh organisasi perempuan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Pada umumnya anggota *Fujinkai* terdiri dari istri-istri pegawai yang bekerja pada pemerintah Jepang. Di tingkat pusat pimpina *Fujinkai* adalah Ny. Sunarjo Mangunpuspito. Wadah *Hokokai* lainnya adalah *Keimin bunka Shidosho* (Pusat Kebudayaan), *Boei Engokai* (tata usaha pembantu prajurit *Peta* dan *Heiho*), serta beberapa *hokokai* perusahaan.[24]

Minat Jepang untuk mengadakan kerjasama dengan rakyat Indonesia telah muncul ketika Jepang mulai mengalami kekalahan dala perang yang terjadi pada tanggal 7 Mei 1942 di Laut Karang. Pertempuran Jepang dengan Sekutu tersebut terjadi ketika Jepang hendak menguasai Australia. Pasukan Jepang mulai banyak mengalami kekalahan. Kekalahan Jepang dalam pertempuran di Laut Karang

[23] Marsudi,op.cit.,hlm.25.
[24] Poesponegoro dan Notosusanto,op.cit.,hlm.36

tersebut ternyata merupakan titik balik *(turning point)* pasukan Jepang dalam melakukan ekspansinya.[25] Oleh karena itulah maka niat untuk melibatkan bangsa Indonesia dalam pemerintahan semakin besar. Selanjutnya berbagai gerakan massa dibentuk oleh Jepang, antara lain :

1. *Seinendan* dan *Keibodan*

   Seinendan dan *Keibodan* merupakan 2 buah organisasi pemuda yang didirikan pada tanggal 29 April 1943 yang saat itu bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang. Keduanya berada langsung dibawah pipinan *Gunseikan.* Tujuan dari dibentuknya organisasi ini adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Dengan demikian Jepang dapat memeroleh tenaga cadangan untuk mendukung usahanya mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Para anggotan *Seinendan* (pemuda Asia usia 14 – 22) diberikan latihan kemiliteran untuk bertahan maupun melakukan penyerangan. Keberadaan *Seinendan* ini berada dibawah binaan *Naimubu bunkyoku* (Departemen Urusan Dalam Negeri Bagian Pengajaran, Olahraga, dan *Seinendan*). *Seinendan* meupakan sebuah organisasi pemuda yang berada di tingkat kecamatan. *Seinendan* dibentuk di desa-desa, sekolah-sekolah, pabrik-pabrik maupun perumahan-perumahan. Kemudian pada bulan Oktober 1944 dibentuk *Josyi Seinendan* (*seinendan* putri). Dalam meningkatkan kualitas para *Seinendan,* pemerintah pendudukan Jepang membentuk *Seinen Kurensyo* (pusat latihan pemuda) yang kemudian diperluas menjadi *Cuo Seinen*

[25] Moedjanto,op.cit.,hlm.83.

Kurensyo (lembaga pusat pelatihan pemuda). Di dalam perang *Seinendan* merupakan barisan cadangan yang mengamankan garis belakang.[26]

Keibodan adalah pembentu polisi yang melaksanakan tugas-tugas kepolisian seperti penjagaan lalu lintas dan pengamanan desa. *Keibodan* beranggotakan pemuda yang berusia 26 – 35 tahu. *Keibodan* berada dibawah pembinaan *Keimubu* (Departemen Kepolisian). Untuk meningkatkan kualitas para anggota *Keibodan* maka dilakukan pelatihan khusus utuk para kader yang bertepat di Sekolah Polisi Sukabumi. Karena langsung berada dibawah pengawasan polisi, maka diharapkan badan ini tidak mendapatkan pengaruh dari kaum nasionalis.[27]

2. *Fujinkai* (himpunan perempuan)

Fujinkai himpunan kaum perempuan masa pendudukan Jepang yang didirikan pada bulan Agustus 1943. *Fujinkai* merupakan organisasi wanita yang berusia minimal 15 tahun. *Fujinkai* juga mendapatkan pelatihan-pelatihan militer meskipun masih dalam tingkat dasar. *Fujinkai* dibentuk dengan maksud untuk membantu pasukan Jepang di garis belakang. Karena tugas-tugasnya yang mendekati kesamaan, maka *Fujinkai* mengadakan hubungan dengan *Seinendan* dan *Keibodan.*[28] .

Cabang-cabang *Fujinkai* terdapat di berbagai kota dan kabupaten. Tugas mereka adalah mengurus soal-soal kewanitaan dalam lapangan social, perburuhan, latihan-latihan, pemudi dan lain-lain usaha. Waktu itu *Fujinkai* Yogyakarta dipimpin oleh R.A. Hadikusumo dibantu oleh B.R.A. Kusdarinah dan YH. O. Sukono sebagai penulis serta G.K.R. Dewi dan Ny.

[26] Poesponegoro dan Notosusanto,op.cit.,hlm.45.
[27] Ibid.,hlm.46.
[28] Ibid.,hlm.48.

Prawironegoro sebagai penasehat. Sedangkan di Kecamatan Kraton *Fujinkai* diketuai oleh R.A. Hadiwinoto, *Fujinkai* Kecamatan Tugu diketuai oleh Y. Notonegoro, dan *Fujinkai* Kecamatan Pakualaman diketuai oleh Ny. Sukardi.[29]

3. *Suishintai* (Barisan Pelopor)

Suishintai merupakan barisan pelopor yang dibentuk pada tangal 1 November 1944. Menjelang dibentuknya lembaga ini, kondisi Jepang semakin gawat. Satu per satu wilayah yang dulu pernah dikuasai oleh Jepang mulai kembali dapat dikuasai Sekutu. *Suishintai* merupakan barisan semi militer, yang dibentuk berdasarkan kesepakatan hasil sidang ketiga *Chuo Sangi In* yang berlangsung pada pertengaha tahun 1944. Pembentukan *Suishintai* adalah sebuah jawaban atas pertanyaan yang muncul dalam sidang bahwa bagaimana cara memperdalam keinsafan rakyat terhadap kewajibannya dan membangunkan persaudaraan segenap rakyat. Selanjutnya *Suishintai* merupakan organisasi pemuda pertama yang dibimbing oleh kaum nasionalis Indonesia. Barisan pelopor ini dipimpin oleh Ir. Soekarno dengan wakil R.P. Suroso, Oto Iskandar Dinata dan dr. Buntaran Martoatmodjo.[30]

4. *Jibakutai* (Barisan Berani Mati)

Dibentuknya *Jibakutai* diduga mendapatkan inspirasi dari pilot *Kamikaze* yang sanggup mengorbankan nyawanya dengan menubrukkan pesawatnya ke kapal perang musuh. Namun demikian, *Jibakutai* diartikan oleh

[29] Marsudi,op.cit.,hlm.27.
[30] Posesponegoro dan Notosusanto,op.cit.,hlm.48.

para pemuda Indonesia untuk berani mati menghadapi musuh dari manapun demi kemerdekaan.[31]

5. *Heiho* (pembantu prajurit Jepang)

Untuk mencari anggota *Heiho* maka pemerintah pendudukan Jepang menyampaikan pengumuman pada bulan April 1943. Anggota *Heiho* adalah pemuda Indonesia yang berusia 18 – 25 tahun. Mereka langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang baik angkatan darat maupun angkatan laut. Kedudukan *Heiho* yang langsung berada di medan perang, menjadikan anggota *Heiho* menjadi lebih mahir dan terlatih. Banyak anggota *Heiho* yang lincah mengoperasikan senjata anti pesawat terbang, tank, artileri medan, dan pengemuda. Namun tidak ada anggota *Heiho* yang berpangkat perwira. Pangkat perwira dalam *Heiho* hanya dimiliki oleh orang Jepang. Hal ini berbeda dengan PETA (Pembela Tanah Air) yang cukup banyak orang Indonesia yang berpangkat perwira.[32]

6. PETA (Pembela Tanah Air)

Instansi di lingkungan Tentara Ke – 16 di Jawa – Madura, instansi yang semula ditugaskan untuk melatih tentara PETA adalah seksi khusus Bagian Intelejen (Seksi khusus = *Tokubetshu Han,* yang disingkat *Beppan*). Sebelum ada perintah resmi pembentukan PETA, *Beppan* melatih para pemuda Indonesia dalam tugas intelejen. Pelatihan tersebut berkembang dengan baik dibawah Letnan Yanagawa di Tangerang dan berkembang secara khusus dalan *Seinen Dojo* (Panti Pelatihan Pemuda). Pertama dibuka pelatihan pada awal tahun 1943 dan diikuti oleh 40 orang pemuda dari seluruh

[31] Poeponegoro dan Notosusanto,op.cit.,hlm.49.
[32] Ibid.,hlm.50-51.

Jawa. Sesuai dengan kurikulum di *Seinen Dojo* para peserta mendapatkan kuliah umun (semangat, situasi dunia, sejarah perang), pelajaran khusus (spionase), pelajaran praktis (senam gulat sumo, dan berenang), pengetahuan teknis (menembak), juga widya wisata (mengunjungi perkebunan dan pabrik-pabrik), dan ekstrakurikuler (menyanyikan lagu-lagu perang).[33]

Menjelang berakhirnya pelatihan angkatan ke 2, keluar perintah pembentukan *PETA* yang ditugaskan kepada Beppan. Panglima Letnan Jenderal Kumakichi Harada memutuskan agar dirancang sedemikian rupa sehingga seakan-akan *PETA* dibentuk atas inisiatif bangsa Indonesia. Oleh karena itu dipilihlah seorang nasionalis Indonesia yang dianggap simpati terhadap Jepang, yaitu Gatot Mangkuprojo untuk mengajukan permohon kepada *Gunseikan* segera dibentuk tentara yang segenap anggotanya terdiri dari orang-orang Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 7 September 1943 surat permohonan segera dikirim. Tidak lama kemudian permohonan dikabulkan dengan dikeluarkannya peraturan yang dikenal dengan *Osamu Seirei* nomor 44 pada tanggal 3 Oktober 1943. Peraturan tersebut menetapkan berdirinya Tentara *PETA* secara formal. Perhatian para pemuda terhadap peraturan tersebut sangat antusias, terutama bagi mereka yang telah mengenyam pendidikan dalam seinendan. Dalam *PETA* terdapat 5 pangkat, yang sebenarnya adalah merupakan jabatan dalam kesatuan, seperti *daidancho* (komandan batalyon), *cudancho* (komandan kompi), *shodancho* (komandan pleton), *budancho* (komandan regu), dan *giyuhei* (prajurit sukarela).[34] Salah seorang tokoh yang masyarakat yang penuh semangat dan unik ikut

[33] Ibid.,hlm. 51.
[34] Ibid.,hlm.52

menandatangani peresmian berdirinya PETA dengan darahnya adalah Ki Ageng Soeryo Mataram.[35]

Para anggota PETA mendapatkan latihan pertama kali di Bogor dalam lembaga yang semula bernama *Jawa Boei Giyugun Kanbu Rensietai* (Korps Lahina Pemimpin Tentara Pembela Tanah Air di Jawa) yang kemudian berganti nama menjadi *Jawa Boei Giyugun Kanbu Kyoikutai* (Korps Pendidikan Pemimpin Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa). Setelah selesai mengikuti pendidikan mereka ditempatkan di *daidan-daidan* yang tersebar di seluruh Jawa, Madura dan Bali. Beberapa anggota dalam perekembangannya banyak yang merasakan ketidakpuasan terhadap tentara pendudukan Jepang sehingga berakhir dengan adanya pemberontakan. Salah satunya adalah pemberontakan PETA di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945.[36]

7. *Romusha* (Prajurit Pekerja)

Untuk melunakkan makna yang tersirat dalam *Romusha*, orang Jepang menganggapnya sebagai Prajurit Pekerja. Apapun namanya, yang jelas *Romusha* telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Rata-rata mereka adalah lelaki sehat berusia 16 – 40 tahun. Mereka yang masuk dalam *Romusha* dipekerjakan untuk membangun sarana dan prasarana pendukung perjuangan Jepang dalam Perang Pasifik, antara lain membangun kubu-kubu pertahanan, gudang senjata, jalan raya, dan lapangan udara. Disamping itu mereka juga ada yang dipekerjakan di pabrik garam, pabrik kayu, pabrik pembuatan dinamit, perbambangan batu bara, maupun penyulingan minyak. Ada pula yang

[35] Marsudi,op.cit.hlm.25.
[36] Poesponegoro dan Notosusanto,op.cit.,hlm.53-54.

dipekerjakan di pelabuhan.[37] Para *Romusha* ditempatkan dimana Jepang membutuhkan, sehingga dari daerah satu bisa ditempatkan di daerah lain di seluruh Indonesia atau bahkan diluar negeri yang termasuk jajahan Jepang .

Romusha yang semula berdasarkan pada asas tenaga sukarela, karena kebutuhan yang terus mendesak akan tenaga kerja di Asia Tenggara, lama-lama menjadi kerja paksaan. Pemerintah Tentara ke – 16 membentuk badan khusus yang melaksanakan tugas pengerahan *Romusha* secara besar-besaran pada tahun 1944. Badan tersebut disebut *Romukyoku.* Dalam perkembangannya banyak *Romusha* dipekerjakan di luar negeri seperti di Birma, Muang Thai, Vietnam, dan Malaya.[38] Dari jumlah *Romusha* yang dikirim ke tempat-tempat tersebut rata-rata yang dapat pulang kembali tidak ada separuhnya, lainnya meninggal dimana mereka dipekerjakan atau hilang tak tahu rimbanya. Perlakuan mereka juga tidak manusiawi. Kesehatan sangat tidak terjamin, makan jauh dari cukup, dan pekerjaan terlalu berat .

Untuk menyelamatkan rakyat Yogyakarta dari "Proyek Maut" *Romusha* Jepang tersebut, Sri Sultan HB IX menyusun proyek tandingan. Dengan alasan untuk meningkatkan produksi pangan di DIY dalam mendukung perjuangan Jepang dalam Perang Pasifik, diperluka sarana irigasi yang representatif. Dari situlah maka muncul proyek penggalian Selokan Mataram yang menyerap banyak tenaga kerja rakyat Yogyakarta sehingga mereka terlepas dari sasasran *Romusha.* Dengan demikian proyek Selolan Mataram yang menghubungkan Kali Opak dengan Kali Progo ini telah

[37] Ibid.,hlm.61.
[38] Ibid.,hlm.65.

mengurangi jatuhnya korban rakyat Yogyakarta dari proyek *Romusha* Jepang.[39]

Dengan kemampuannya berdiplomasi dan kehati-hatiannya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mampu mengambil hati pemerintah Jepang. Bahkan tanpa diduga pihak Jepang tidak keberatan mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk membangunan saluran irigasi tersebut. Dengan demikian pada zaman Jepang di Kasultanan Yogyakarta diadakan pembangunan saluran irigasi, pintu air lengkap dengan bangunan pengontrol, bendungan, jembatan dan tanggul. Pengairan di Yogyakarta tersebut dinamakan Bendungan *Gunsei Hasuiro* dan *Gunsei Yosuiro.* Dengan adanya proyek tersebut maka Sri Sultan Hamengkubuwono IX mempunyai alasan yang kuat untuk menolak atau mengurangi jumlah *Romusha* yang diminta oleh pemerintah pendudukan Jepang, Alasan yang dipakai adalah karena saat itu Yogyakarta juga membutuhkan tenaga yang cukup banyak untuk mengerjakan proyek raksasa pembuatan saluran air.[40]

8. *Jugun Ianfu* (Perempuan Penghibur)

Sama halnya dengan *Romusha*, para korban *Jugun Ianfu* kebanyakan adalah masyarakat desa yang diambil secara paksa dengan jalan kekerasan, tipu muslihat, dan ancaman. Namun bedanya, jika *Romusha* dilakukan secara terbuka dan terang-terangan, sedangkan *Jugun Ianfu* dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Sistem rekrutmen secara tertutup ini tidak menggunakan pengumuman resmi. Pemerintah militer Jepang menggunakan bantuan pejabat daerah seperti lurah, camat, dan melalui *tonarigumi* (pengurus RT). Bahkan

[39] Marsudi,op.cit.,hlm.23.
[40] Kutoyo,op.cit.,hlm.117.

para *Jugun Ianfu* direkrut dengan cara ditipu melalui jalur kesenian. Mereka dijanjikan akan diorbitkan sebagai artis / seniwati terkenal, namun akhirnya dijerumuskan ke dalam *Jugun Ianfu.* Setelah berhasil diambil dari tempat tinggalnya, para *Jugun Ianfu* dikumpulkan di tempat yang khusus untuk pengumpulan *Jugun Ianfu* yang biasa disebut sebagai *Ian-jo* atau rumah bordil ala Jepang. Pemerintah pendudukan kemudian mengganti nama-nama mereka dengan nama Jepang seperti *Sakura*, *Momoye*, maupun *Takito.*[41]

Karena mendapat siksaan lahir maupun batin yang begitu berat, maka tidak jarang dari para *Jugun Ianfu* ini yang melarikan diri. Dari tindakan yang mereka lakukan ada yang selamat hingga lepas dari penderitaan namun tidak sedikit yang meninggal dalam proses pelarian. Juga yang tidak kuat menanggung derita memilih bunuh diri. Bagi mereka yang mati di kamp-kamp mayatnya juga tidak diurus secara layak dan hanya dibiarkan bagaikan bangkai binatang.

Romusha dan *Jugun Ianfu*, merupakan dua buah potret kelam masa penjajahan Jepang. Tak terhitung rakyat Indonesia yang menjadi korban penjajahan Jepang. Penderitaan mereka menjadi berkurang ketika Jepang mulai meninggalkan Indonesia karena menjadi pihak yang kalah perang dalam Perang Pasifik melawan sekutu. Meski demikian pengorbanan para *Romusha* dan *Jugun Ianfu* merupakan pengorbanan yang tak ternilai harganya. Pengorbanan mereka merupakan torehan tinta hitam dalam lembaran kelam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yang harus diketahui oleh generasi

[41] Poesponegoro dan Notosusanto,hlm.68-71.

muda. Melalui pengalaman mereka, generasi muda dalam belajar dari masa lampau dan belajar memaknainya.

B. Masa Awal Kemerdekaan.

Kekalahan perang pasukan Jepang di Laut Karang pada tanggal 7 Mei 1942, segera diikuti dengan kekalahan-kekalahan lain di beberapa pertempuran melawan Sekutu. Melihat gelagat akan terdesaknya pasukan Jepang di beberapa tempat yang telah dikuasainya, maka ditempuh usaha-usaha untuk melibatkan bangsa Indonesia dalam pemerintahan, termasuk dalam gerakan massa. Namun beberapa lembaga yang dibentuk Jepang dengan memanfaatkan para tokoh nasionalis tidak membuahkan hasil yang diharapkan Jepang. Justru lembaga-lembaga tersebut dipakai oleh kaum nasionalis untuk menggalang persatuan rakyat dan menyebarkan semangat juang untuk merdeka meski secara tersirat.

Sejalan dengan perkembangan politik yang terjadi di Asia Pasifik, pasukan Jepang semakin terkepung oleh kekuatan Sekutu menyusul jatuhnya satu persatu wilayah yang dulu pernah dikuasainya ke tangan pasukan Sekutu. Keadaan makin kritis bagi Jepang, ketika Pulau Saipan yang terletak pada gugusan kepulauan Mariana jatuh ke tangan pasukan Sekutu pada bulan Juli 1944. Dengan demikian berarti Tokyo terancam, karena jarak Saipan-Tokyo dapat dicapai oleh pesawat pembom andalan Sekutu B-29 USA.

Keadaan tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi politik di Jepang sehingga *Kabinet Tojo* jatuh dan digantikan dengan *Kabinet Koiso*. Kebijakan Koiso untuk mengundang simpati bangsa Indonesia agar lebih giat lagi membantu Jepang ditempuh dengan janjinya yang akan memberikan kemerdekaan kepada

Indonesia di kelak kemudian hari. Janji tersebut disampaikan pada pidatonya di depan parlemen Jepang pada tanggal 7 September 1944, dan kemudian dikenal dengan *"Koiso Declaration"*.[42]

Sebagai tanggapan atas janji Jepang tersebut, maka di Indonesia dibentuk *Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai* (BPUPKI / Badan Penyelidiki Usaha-usaha Persiapan Kemerdeakaan Indonesia). Sementara itu, pada tanggal 5 April 1945 kabinet Koiso jatuh menyusul dapat dikuasainya Pulau *Okinawa* ke tangan Sekutu. Namun demikian proses pembentukan BPUPKI terus berlanjut, dan akhirnya susunan keanggotaannya diumumkan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar.[43] Waktu itu BPUPKI berdiri dengan 40 orang anggota dan 2 orang ketua yaitu Dr. K.R.T. Rajiman Wediodiningrat dan R.P. Suroso. Anggota BPUPKI yang berasal dari Yogyakarta antara lain Ki Hadjar Dewantara (tokoh nasionalis yang sekaligus sebagai Ketua *Yogyakarta Koci Hokokai*), Ki Bagus Hadikusumo, Dr. Sukiman, Abdul Kahar Muzakir (tokoh agama), dan tokoh kasulatanan yang terdiri dari B.P.H. Puruboyo dan B.P.H. Bintoro.[44]

Selama berdirinya BPUPKI mengadakan sidang 2 kali. Sidang yang pertama berlangsung tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945. Dalam sidang ini dibahas tentang dasar negara. Dalam sidang inilah (tanggal 1 Juni 1945) Ir. Soekarno untuk pertama kalinya memperkenalkan konsepsi dasar filsafat negara Pancasila. Sidang kedua berlangsung tanggal 10-17 Juli 1945. Materi yang dibahasa adalah

---

[42] Moedjanto,op.cit.,hlm.84.
[43] Ibid.,hlm.84
[44] Suwarno.P.J. *Hamengku Buwono IX Dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942 – 1974 Sebuah Tinjauan Historis.* Yogyakarta : Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI),1994:hlm.158

batang tubuh UUD 1945, wilayah negara (dissetujui berwilayah *Nederlandsch Indie* ditambah jajahan Inggris yaitu Malaka dan Kalimantan Utara serta Timor Portugis), bentuk negara (disetujui berbentuk Unitaris), bentuk pemerintahan republik, bendera merah putih, dan bahasa nasional adalah bahasa Indonesia.[45]

Perkembangan yang terjadi menyusul janji kemerdekaan oleh *Perdana Menteri Koiso* dapat diakses oleh umum melalui radio maupun surat-surat kabar. Dampaknya muncul beberapa tanggapan dan pikiran-pikiran tentang bagaimana nanti setelah Indonesia benar-benar merdeka. Surat-surat kabar yang beredar tidak hanya mengupas masalah janji Jepang yang disampaikan oleh *Perdana Meteri Koiso* saja. Namun mereka menyediakan rubrik-rubrik khusus. Misalnya harian Suara Umum Surabaya menyediakan rubrik khusus *"Suara Umum",* Asia Raya Jakarta menyediakan rubrik *"Fikiran Umum",* Sinar Baru Semarang menyedikan rubrik *"Indonesia Merdeka",* Cahaya Bandung menyuguhkan tulisan-tulisan para pembacanya dalam *"Suara Pembaca",* dan Sinar Matahari Yogyakarta menampungnya dalam rubrik umum serta mengomentarinya dalam rubrik *"Pancaran Sinar".*[46]

Selain melalui surat kabar pemahaman mengenai kemerdekaan juga ditanamkan melalui pengibaran bendera Merah Putih. Hal ini sudah dilakukan sejak tahun 1944. Ketika itu dalam rangka menyambut janji kemerdekaan Indonesia yang disampaikan oleh Perdana Menteri Kaiso, diselenggarakan *"Pekan Kegembiraan Rakyat"*. Sebagi acara penutupan kegiatan tersebut, pada tanggal 12 September 1944 rakyat Yogyakarta melakukan upacara pengibaran bendera Merah Putih yang dihadiri oleh Sri Sultan HB IX di lapangan Kridosono

[45] Moedjanto,op.cit.,hlm.84-85.
[46] Suwarno,op.cit.,hlm.159.

Yogyakarta. Demikian pula dalam rangka menyambut dibentuknya PPPKI rakyat menyembut gembira dengan mengibarkan bendera *Kokki* dan Merah Putih di rumah masing-masing.[47]

Pada saat pasukan pendudukan Jepang dalam kondisi yang tidak menentu, pada diri kaum pergerkan mengadakan gerakan "dibawah tanah" menentang tentara pendudukan Jepang. Mereka memonitor berita-berita luar dan dalam negeri dan selal mengadakan koordinasi secara rahasia. Di Yogyakarta beberapa gerakan tersebut antara lain Gerakan di Kepatihan Yogyakarta, Gerakan di Kalangan umat Islam, Gerakan yang dihimpun oleh Kusumosunjoyo yang dibantu oleh Sutadji (polisi) dan S. Parman *(Kempeitei-hoo),* Gerakan yang dipimpin oleh Tan Malaka yang waktu itu berada di Singapura dan oleh Kobarsyih, Gerakan Ngentung di Tamansiswa, Gerakan yang dipimpin oleh Amir Syarifudin di Yogyakarta. Demikian pula para pelajar yang dididik Jepang untuk m enjadi intelejen banyak membantu para pemimpin Indonesia. Misalnya yang di *Chiangbun* dapat menjadi penghubung dengan Gerakan Ngentung Ki Hadjar Dewantara melalui *Jawa Hokokai* dengan bertus memonitor jalannya Perang Asia Timur Raya.[48]

Sementara itu posisi Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak. Menghadapi hal ini maka Komando Tentara Jepanga di wilayah selatan dalam rapatnya di Singapura pada bulan Juli 1945, menyatakan bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan pada tanggal 7 September 1945. Perubahan berjalan cepat, tanggal 7 Agustus 1945 Jenderal Terauchi menyetujui didirikannya *Dokuritzu Zyunbi Iinkai* (PPKI / Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebagai lembaga

[47] Ibid
[48] Marsudi,op.cit.,hlm.33.

yang bertugas melanjutkan pekerjaan BPUPKI. Anggota PPKI berjumlah 21 orang yang diketui oleh Ir. Sukarno dan wakilnya adalah Drs. Mohammad Hatta. Dari jumlah tersebut, terdapat anggota PPKI yang berasal dari Yogyakarta yaitu Ki Bagus Hadikusumo, B.P.H. Puruboyo, Ki Hadjar Dewantara, dan Sayuti Melik[49]. Sebagai simbol terbentuknya PPKI maka pada tanggal 9 Agustus 1945 Ir. Soekarno dan Drs. Mohammadi Hatta diundang ke Saigon bersama Dr. Radjiman Wediodinigrat yang dulu menjabat ketua BPUPKI.[50]

Pada tanggal 14 Agustus 1945, rombongan dari Indonesia tersebut kembali dari Saigon. Namun sebelum tiba di tanah air, mereka singgah terlebih dulu di Singapura dan berjumpa dengan anggota PPPKI dari Sumatra yaitu Moh. Amir, Teuku Hasan dan Abdul Abbas. Sesampai di Jakarta, mereka mendapatkan laporan dari Sutan Sjahrir yang sejak tanggal 10 Agustus 1945 mendengar kabar lewat radio gelapnya bahwa Jepang meminta damai dengan Sekutu. Namun Sekutu hanya mau menerima pernyataan menyerah tanpa syarat. Hal terjudi menyusul hancurnya dua kota Jepang oleh bom pesawat Sekutu B 29, yaitu *Hiroshima* pada tanggal 6 Agustus 1945 dan *Nagasaki* pada tanggal 9 Agustus 1945.[51]

Keadaan semakin genting, ketika ada pertanda bahwa Jepang akan menjadi pihak yang kalah perang melawan Sekutu. Melihat hal itu Sutan Sjahrir mendesak Ir. Soekarno agar Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Namun berdasarkan pertimbangan, bahwa bagaimanapun kondisi negeri Jepang, namun Jepang di Indonesia masih kuat. Hal ini sangat membahayakan jika rakyat Indonesia secara terang-terangan menentangnya.

[49] Suwarno, op.cit.,hlm.160.
[50] Moedjanto,op.cit.,hlm. 85.
[51] Ibid.,hlm.86 dan Marsudi,op.cit.,hlm.33.

Sejalan dengan berkecamuknya perang, akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarakat kepada Sekutu. Induk akte penyerahan tersebut ditandatangani di atas kapal penempur milik Amerika yang bernama *"Missouri"*.[52] Peristiwa tersebut merupakan tanda dimulainya penyerahan Jepang terhadap Sekutu di tempat-tempat lain, termasuk Indonesia. Selanjutnya melalui radio gelap, berita tersebut sampai ke Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1945. Meski demikian Ir. Sukarno tidak mau gegabah. Kabar tersebut masih merupakan kabar dari radio gelap, belum ada kabar secara resmi[53] dari pemerintah. Oleh karena tetap tidak mau mengindahkan apa yang disarankan oleh Sutan Sjahrir yaitu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketegangan antara golongan tua dan golongan muda untuk menentukan kapan kemerdekaan Indonesia akan diproklamasikan. Golongan tua, yang didalamnyat terdapat Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, dr. Buntaran, dr. Samsi, Mr. Ahmad Subarjo, dan Mr. Iwa Kusumasumantri menghendaki untuk menyatakan kemerdekaan perlu ada rapat dengan PPKI terlebih dahulu. Sedangkan golongan kaum muda antara lain Sutan Sjahrir, Chaerul Saleh, Wikana, Sukarni, Djohar Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono dan lain-lain menuntut agar Ir. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada keesokan harinya (16 Agustus 1945). Karena beda pendapat itulah maka berdasarkan rapat golongan muda, Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta diamankan terlebih dulu ke luar kota. Hal ini untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Oleh sebab itu maka Ir. Soekarno dan

---

[52] Marsudi,op.cit.,hlm. 33.

[53] Kabar resmi dari pemerintah Jepang tentang penyerahan Jepang terhadap Sekutu tanggal 14 Agustus 1945 disampaikan oleh Laksamana Maeda kepada Mr. Ahmad Subarjo pada tanggal 16 Agustus 1945 menjelang penjemputan Ir. Soekanro di Rengasdengklok. Kabar tersebut selanjutnya disampaikan oleh Mr. Ahmad Subarjo ke pada Ir. Sukarno (Moedjanto, 1992 : 87).

Drs. Mohammad Hatta dibawa ke Rengasdengklok, Jawa Barat pada tanggal 16 Agustus 1945.[54]

Di Jakarta, Mr. Ahmad Soebardjo dari golongan tua mengadakan kesepakatan dengan Wikana dari golongan muda, bahwa proklamasi harus diadakan di Jakarta. Laksamana Tadashi Maeda (pembesar Jepang) bersedia menjamin keselamatan para pemimpin Indonesia selama berada di rumahnya. Untuk selanjutnya tokoh pemuda Jusuf Kunto mengantarkan Mr. Ahmad Subarjo ke Rengasdengklok menjemput Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta. Dalam rangkan menjemput Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta tersebut, Mr. Ahmad Soebarjo mempertaruhkan nyawanya jika proklamasi kemerdekaan gagal dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12.00. Oleh karena itulah komandan kompi Peta setempat *Chodanco* Subeno bersedia melepaskan Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta dibawa ke Jakarta.[55]

Penjemputan Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta di Rengasdengklok berjalan lancar. Jam 23.00 WIB mereka telah sampai di Jakarta. Rencana rapat diadakan di Hotel Des Indes. Namun karena ada larangan dari pemerintah Jepang untuk mengadakan rapat diatas jam 23.00 WIB, maka atas kebaikan Laksamana Tadashi Maeda, rapat dapat berlangsung di rumahnya Miyokodori (Nassau-Bulevard) yang sekarang menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jl. Imam Bonjol 1 Jakarta.[56] Dalam rapat tersebut dibahas tentang naskah proklamasi, siapa yang tanda tangan dan siapa yang nantinya membacakan pernyataan kemerdekaan tersebut. Konsep naskah proklamasi kemerdekaan ditulis oleh Ir. Soekarno, sedangkan Drs. Mohammad Hatta dan Ahmad Subardjo

[54] Poesponegoro dan Notosusanto,op.cit.,hlm.140.
[55] Ibid.
[56] Moedjanto,op.cit.,hlm.88.

memberikan saran dan sumbangan pikirannya secara lisan. Hasil tulisan tangan Ir. Soekarno selanjutnya diketik bersih oleh Sayuti Melik. Selanjutnya penanda tangan pernyataan kemerdekaan tersebut disetuji cukup Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta saja atas nama bangsa Indoensia. Selanjutnya naskah tersebut akan dibacakan oleh Ir. Soekarno pada keesokannya yaitu tanggal 17 Agustus 1945.[57]

Pukul 05.00 (waktu Jawa jaman Jepang atau 02.30 WIB) para peserta rapat di rumah *Laksamana Tadashi Maeda* yang terdiri dari anggoto PPKI dan tokoh pemuda keluar dan pulang ke rumah masing-masing. Mereka sepakat bahwa pembacaan proklamasi dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB pagi di halaman rumah Ir. Soekarno di Jl. Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Ir. Soekarno berpesan kepada para pemuda, terutama B.M. Diah agar naskah proklamasi digandakan dan dapat disiarkan ke penjuru dunia. Selanjutnya ribuan lembar teks proklamasi dapat dicetak dan disebarkan serta ditempel di tempat-tempat strategis. Juga secara beranting dapat didistribusikan ke luar kota Jakarta. Meski demikian, ada pula sebagian rakyat dan pemuda yang tidak tahu kalau pembacaan proklamasi diadakan di halaman rumah Ir. Sukarno. Mereka banyak yang mengira dilaksanakan di Lapangan IKADA (Ikatan Atlet Daerah) di sudut timur lapangan MONAS Gambir. Namun setelah tahu di lapangan tersebut dijaga pasukan Jepang, dan pembacaan proklamasi berada di halaman rumah Ir. Soekarno, mereka segera mendatanginya.[58]

Pagi hari, halaman rumah Ir. Soekarno di Jl. Pegansaan Timur 56 Jakarta telah penuh orang. Untuk berjaga-jaga dr. Muwardi menyiapakan beberapa

[57] Poesponegoro dan Notosusanto,hlm.147-148.
[58] Ibid.,hlm. 148-150.

anggota Peta anak buah *Chodanco* Latief Hendraningrat di sekitar kediamam Ir. Sukarno. Atas perintah Suwiryo (walikota Jakarta) peralatan pengeras suara berhasil disiapkan oleh Wilopo dan Nyonoprawoto dengan meminjam dari toko radio "Satria" di Salemba Tengah 24 milik Gunawan. Untuk menyediakan tiang bendera, Sudiro (sekretaris Ir. Sukarno) meminta S. Suhud (komandan pengawal rumah Ir. Sukarno). Sedangkan bendera merah putih, merupakan bendera hasil jahitan tangan Ibu Fatmawati. Setelah semua siap, acara dimuali dengan susunan : pembacaan proklamasi, pengibaran bendara oleh S. Suhud dan *Chodanco* Latief Hendraningrat, dan sambutan oleh Walikota Suwiryo dan dr. Muwardi.[59]

Karena telah dicetak pada dinihari, maka pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi telah sampai ke kepala bagian radio Kantor Berita *Domei*, yang bernama Waidan B. Panelewen. Ia menerima naskah dari Syahrudin seorang wartawan *Domei.* Kemudian ia memerintahkan kepada F. Wuz (markonis) agar berita itu disiarkan 3 kali berturut-turut. Penyiaran diulangi setiap setengah jam sekali sampai dengan pukul 16.00 WIB. Karena tindakan itu diketahui oleh Jepang, maka ada perintah dari Jepang untuk meralat berita itu dan menyebutnya sebagai kekeliruan. Selanjutnya tanggal 20 Agustus 1945 pemerintah Jepang menyegel kantor berita tersebut dan pegawainya dilarang masuk. Meski demikian atas bantuan para teknisi radio antara lain Sukarman, Sutamto, Susilomihardja, dan Suhandar para pemuda berhasil membuat pemancar baru yang bahannya diambilkan dari kantor berita *Domei* bagian demi bagian. Pemencar tersebut didirikan di Gedung Menteng 31 dengan kode panggilan DJK I. Dari pemancar

[59] Ibid.,hlm.150 dan 157.

inilah kemudian siaran-siaran tentang berita proklamasi disiarkan ke penjuru dunia.[60]

Untuk penyiaran ke luar negeri baru dapat dilaksanakan pada pukul 21.00 WIB. Untuk usaha ini cukup besar peranan pemuda Yusuf Ronodipuro dan Bakhtiar Lubis. Sebelumnya teks proklamasi yang berbahasa Indonesia dialibahasakan ke dalam bahasa Inggris oleh Bakhtiar Lubis dan Suprapto. Setelah semua siap, Suprapto mulai membacakan pernyataan kemerdekaan Indonesia dengan bahasa Inggris dan dipancarkan ke luar negeri. Dengan cara seperti itulah berita proklamasi dapat diketahui hingga ke penjuru dunia termasuk ke Yogyakarta.[61]

Berkat kerja keras para pemuda di Kantor Berita *Domei* Jakarta untuk menyebarluaskan berita proklamasi, maka kabar gembira Pernyataan Kemerdekaan tersebut sampai ke Yogyakarta pada pukul 12.00 WIB. Waktu itu diterima oleh Kantor Berita *Domei* cabang Yogyakarta yang terletak di Jl. Malioboro yang sekarang dimanfaatkan sebagai Gedung Perpustakaan Daerah. Selanjutnya berita gembira tersebut akan segera disebarluaskan dengan cara disiarkan secepat mungkin agar seluruh rakyat mengetahuinya. Namun hal tersebut dilarang oleh *Gunseikanbu,* sehinga penyebarluasannya hanya dilakukan dengan cara dari mulut ke mulut oleh para pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat. Kebetulan waktu itu adalah hari Jum'at sehingga masjid-masjid di Yogyakarta memiliki peran penting dalam penyebaran berita proklamasi. Para pemuda memanfaatkannya sebagi forum untuk menyebarkan berita proklamasi, demikian pula dalam khotbah-khotbah disisipkan informasi bahwa Indonesia telah merdeka

[60] Ibid.,hlm.157-158.
[61] Marsudi,op.cit.,hlm.45.

dan telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Beberapa masjid di Yogyakarta antara lain Masjid Besar Kauman Yogyakarta dan Masjid Paku Alaman.[62]

Dalam menyambut berita proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, seorang tokoh pergerakan nasional dan sesepuh organisasi Tamansiswa, pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari mengadakan pawai keliling kota dengan bersepeda bersapa para murid Tamansiswa. Di sepanjang jalan mereka menyampaikan kabar bahwa proklamasi kemerdekaan telah dikumandangkan dan Indonesia telah merdeka.[63]

Meski demikian sebagian besar rakyat masih belum yakin akan kebenaran berita tersebut. Karena pada kenyataannya kekuatan Jepang di Yogyakarta masih ada. Bahkan bendera Hinomaru masih berkibar dengan gagahnya di gedung-gedung pemerintah yang diduduki Jepang. Pasukan Jepang dengan senjata lengkap masih siap berjaga-jaga. Demikian pula Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII selaku panutan rakyat Yogyakarta masih diam dan belum memberikan reaksi apa-apa tentang kabar tersebut. Keragu-raguan rakyat Yogyakarta menjadi hilang ketika pada tanggal 19 Agustus 1945, berita proklamasi termuat dalam Harian Sinar Matahari bersama dengan teks UUD 1945. Selanjutnya pada hari itu pula Sri Sultan HB IX mengirim telegram kepada Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta atas berdirinya negara Republik Indonesia dan terpilihnya kedua beliau sebagai presiden dan wakil presiden. Sikap Sultan ini segera ditanggapi oleh Ir. Soekarno dengan membuat Piagam Penetapan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat. Meski dikeluarkan tanggal 19 Agustus 1945, tetapi

[62] Ibid.,hlm.48
[63] Ibid.

baru disampaikan pada tanggal 6 September 1945, satu hari setelah Sultan mengeluarkan amanat 5 September 1945. Piagam tersebut dibawa oleh Mr. Sartono dan Mr. AA. Maramis.[64]

Pada pukul 10.00 WIB Sultan mengundang kelompok-kelompok pemuda. Pertemuan dilaksanakan di Gedung Wilis, Bangsal Kepatihan, Yogyakarta. Hadir dalam pertemuan itu wakil kelompok pemuda dari golongan agama, nasionalis, kepanduan dan keturunan Cina yang jumlahnya kurang lebih 100 orang. Pertemuan itu dimaksudkan untuk memberikan pengarahan kepada kelompok pemuda agar tidak terjadi tindakan liar yang mengganggu ketentraman di wilayah Yogyakarta.[65] Dalam pertemuan berlangsung kurang lebih setengah jam. Pidato Sultan dalam pertemuan tersebut antara lain:[66]

> "Kita telah beratus tahun dijajah bangsa lain. Maka selama itu perasan kita tertekan dan sekarang kita merdeka. Tentu perasaan yang lepas dari tekanan akan melonjak. Melonjaknya ini yang harus kita jaga. Biarlah melonjak setinggi-tingginya, sepuas-puasnya. Akan tetapi jangan sampai menyerempet-nyerempet yang tidak perlu yang bisa menimbulkan kerugian. Menurut sejarah, di mana terjadi perubahan besar dan mendadak seperti yang terjadi di tanah air kita sekarang, pemuda senantiasa memegang peranan penting. Oleh karena itu saudara-saudara saya minta menjaga keamanan masyarakat, baik di kampung-kampung, di perusahaan-perushaan, di toko-toko dan lain-lain jangan sampai terjadi kerusuhan. Kalau terjadi sesuatu laporkan kepada saya. Dan bertindak sebagai wakil saya dalam hubungannya dengan saudara-saudara adalah Pangeran Bintoro."

Sementara itu untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 19 Agutus 1945, Yogyakarta Kooti Hookokai mengadakan sidang istiewa

---

64 Kutoyo,hlm.128.
65 Marsudi,op.cit.,hlm.49.
66 Tashadi, dkk., *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Di DIY.*Yogyakarta : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan DIY,1986/1987:hlm.54.

di Sonobudoyo. Beberapa keputusan yang berhasil dalam sidang istimewa tersebut antara lain:[67]

1. Melahirkan rasa gembira dan syukur ke hadapan Tuhan Yang Mahas Esa atas lahirnya Negara Rpublik Indonesia.
2. Menyatakan dengan keyakinan seteguh-teguhnya kepada pemerintah Indonesia akan mengikut dan tumbuh pada tiap-tiap langkah danperintahnya.
3. Mohon kepada Ilahi agar Negara Indonesia berdiri kokoh, teguh dan abadi.

Selanjutnya Sri Sultan Hamengku Buwono IX juga menyampaikan kata sambutan yang dimuat dalam Harian Sinar Matahari tanggal 20 Agustus 1945, yang berisi antara lain :

> Sekarang kemerdekaan telah berada ditangan kita, telah kita genggam, nasib noesa dan bangsa adalah ditangan kita poela, tergantung pada kita sendiri. Kita haroes menginsjafi, bahwa lahirnja Indonesia Merdeka itoe dalam masa kegentingan. Maka semoea, tiada ketjoealinja, haroes bersedia dan sanggoep menjampingkan kepentingan masing-masing, oentoek kepentingan bersama, ialah mendjaga, memelihara dan memebela kemerdekaan noesa dan bangsa. Sekarang boekan waktoenja mengemoekakan dan memperbesar segala pertentangan dan peselisihan faham. Tiap-tiap golongan haroes sanggoep menjampingkan kepentingannya, sanggoep oentoek mentjapai persatoean jang baroe dan kokoh sehingga bangsa Indonesia mendapat sendjata oentoek memperjoeangkan kemerdekaannja, boeat menjelesaikan tanggoeng djawabnja terhadap angkatan-angkatan bangsa Indonesia jang akan datang dan membikin sedjarah jang gemilang.[68]

Pada tanggal 20 Agustus 1945, Sri Sultan HB IX dalam kapasitasnya sebagai Ketua Badan Kebaktian Rakyat Yogyakarta (Yogyakarta Koci Hokokai), kembali mengirim telegram yang ditujukan kepada Ir. Soekarno dan Drs. M. Hatta. Telegram itu menegaskan bahwa Yogyakarta sanggup berdiri di belakang kepemimpinan Ir. Soekarno dan Drs. M. Hatta. Dan Sultan akan bertanggung

---

[67] Ibid.,hlm.55.

[68] Djawatan Penerangan Daerah Istimewa Jogjakarta. *Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta,* Jogjakarta : Kementrian Penerangan,1953:hlm.35.

jawab kepada Presiden. Demikian pula Sri Paku Alam VIII. Apa yang dilakukan oleh kedua penguasa Yogyakarta tersebut ternyata memberikan inspirasi bagi raja-raja di Surakarta. Pada tanggal 1 September 1945 Sri Susuhunan Paku Buwono XII dan Mangkunegara juga menyatakan sanggup berdiri di belakang Republik Indonesia.[69]

Sementara itu, di pemerintah pusat, untuk melaksanakan sebuah pemerintahan yang berkedaulatan rakyat, maka pada tanggal 29 Agustus 1945 dibentuklah KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). Komite ini merupakan badan pembantu presiden. Komite ini juga bertugas mengeluarkan pelbagai instruksi dan mosi yang menyatakan kebulatan tekad rakyat. Sejalan dengan dibentuknya KNIP, maka di daerah juga dibentuk KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah) yang juga merupakan pengejawantahan dari kebulatan tekad rakyat di tingkat daerah. Selanjutnya KNID berperan dalam memberikan persetujuan kepada Sri Sultan HB IX dalam mengeluarkan amanat yang dikenal dengan "Amanat 5 September 1945", karena amanat tersebut disampaikan pada tanggal 5 September 1945. Adapun amanat tersebut berisi antara lain:[70]

1. Bahwa Negeri Ngayogyakarto Hadinininggrat yang bersifat kerajaan, adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam negeri Ngayogyakarto Hadiningrat dan oleh karena itu berhubungn dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam negeri Ngayogyakarto hadiningrat mulai saat ini berada di tangah Kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya, kami pegang seluruhnya.

[69] Kutoyo,op.cit.,hlm.125.
[70] Ibid.,hlm.127-128.

3. Bahwa perhubungan antara Negeri Ngayogyakarto Hadiningrat dengan pemerintah pusat Negara RI bersifat langsung dan kami bertanggungjawab atas Negeri kami langsung kepada Presiden RI.

Sri Sultan HB IX sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalanm negeri Ngayogyakarto Hadiningrat, oleh karena itu terkait dengan kondisi politik waktu itu, maka segala urusan pemerintahan dalam negeri Ngayogyakarto Hadiningrat mulai saat itu berada di tangan Sri Sultan HB IX.

Semangat menggelora menyambut kemerdekaan terus menyebar ke seluruh rakyat Yogyakarta. Rakyat dari semua lapisan termasuk pemuda, pelajar, petani, buruh, pegawai, tua, muda, laki-laki, dan perempuan bergerak menyambut proklamasi. Pernyataan-pernyataan siap mendukung dan berjuangan dibelakang negara Republik Indonesia banyak bermunculan. Pada tanggal 27 September 1945 Angkatan Muda Pegawai Kasultanan mengadakan rapat di Bale Harsono Kepatihan Yogyakarta yang dihadiri oleh kurang lebih 400 orang. Pada rapat tersebut dengan suara bulat mengajukan mosi kepada Sri Sultan HB IX sebagai kepala daerah istimewa dari negara RI. Adapun mosi tersebut antara lain berisi:[71]

1. Angkatan Muda dari pegawai Kasultanan selalu berdiri di belakang Sri Paduka Kanjeng Sultan, siap sedia menjalankan segala perintah dan petunjuknya.
2. Berjanji, jika ada kekuasaan asing yang hendak memerintah dan mejajah Indonesia atas titah Sri Paduka hamba sekaliah sangup meletakkan jabatan.
3. Berjanji akan memelihara dan mempertahankan tetapnya kemerdekaan Indonesia sampa di akhir zaman.

Mosi juga dibuat oleh para abdi dalem Paku Alaman Yogyakarta. Mereka dalam rapatnya yang digelar pada tanggal 13 Oktober 1945 memutuskan untuk

[71] Tashadi 1986/1987,op.cit.,hlm. 78.

mendirikan Persatuan Abdi Dalem Praja Paku Alaman yang diketuai oleh Gondodiprojo. Mereka juga sepakat untuk.[72]

1. Abdi Dalem Praja Paku Alaman harus teguh bersatu adu dalam lingkungan Negara RI merdeka, tetap menurahkan segala tenaga, jiwa dan raga memgela Indonesia merdeka.
2. Tetap setia dan berdiri di belakang Sri Paduka Ngarsa Dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII yang telah mendapat penuh kepercayaan dari PYM. Presiden RI.
3. Serentak meletakkan jabatannya, jika bangsa lain memerintah Indonesia.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, disambut dengan kegembiraan yang meluap-luap oleh seluruh rakyat Indonesia. Luapan kegembiraan itu diwujudkan dengan berkibarnya Sang Merah Putih dipelosok-pelosok desa. Tekait dengan hal itu maka pada tanggal 31 Agustus 1945 keluarlah "Maklumat Pemerintah" yang berisi bahwa sejak tanggal 1 September 1945 ditetapkan agar bendera nasional Sang Merah Putih terus dikibarkan di seluruh persada Nusantara. Juga diperintahkan sejak tanggal 1 September 1945 agar bagi seluruh bangsa Indonesia apabila bertemu di mana saja hendaklah saling menghormati dan mengucapkan salah nasional "Merdeka". Hal ini menurut Abdul Haris Nasution pada hakekatnya merupakan revolusis sektor psikologis.[73]

Sementara itu pada tanggal 20 September 1945, di Jakarta dilangsungkan konferensi yang dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat, pegawai, polisi, BKR dan Barisan Pelopor dari seluruh Jawa yang bertujuan untuk membulatkan tekad sebagai pendukung proklamasi dan pembela Republik. Konferensi tersebut menegaskan antara lain agar pemasangan bendera Merah Putih makin diperhebat. Menanggapi hal tersebut maka di Yogyakarta, para pemuda dengan semangat yang berapi-api segera bergerak. Mereka berusaha mengibarkan bendera Merah

[72] Ibid.,hlm.79
[73] Ibid.,hlm.58.

Putih di rumah-rumah, di pabrik-pabrik, di toko-toko, di gedung-gedung instansi pemerintah maupun di kendaran-kendaraan bermotor. Tak sekalipun terlintas rasa takut akan tentara Jepang yang bersenjata lengkap pada waktu itu.[74]

Puncak semangat pengibaran bendera merah putih terjadi pada tanggal 21 September 1945. Pada tanggal 21 September 1945, sebelum terjadi penurunan bendera Hinomaru di gedung Cokan Kantai, rakyat bergerak menuju Balai Mataram (Senisono sekarang) untuk mengibarkan bendera Merah Putih. Setelah bendera Merah Putih berkibar di Balai Mataram, mereka dihalau oleh tentara Jepang. Tetapi kemudian sekitar jam 12.00 WIB mereka kembali lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Ribuan rakyat Yogyakarta yang sebagian besar pemuda pelajar telah berkumpul di depan *Gedung Cokan Kantai* (Gedung Agung) dengan dikawal oleh satu kompi pasukan Polisi Istimewa. Waktu itu sebagai juru bicara adalah Jamaludin Nasution yang bertindak selaku Sekretaris Promotor Pemuda Nasional (PPN).[75] Mereka bermaksud menurunkan bendera *Hinomaru* di atas atap *Gedung Cokan Kantai* dan ingin menggantinya dengan bendera Merah Putih. Tanpa perasaan takut sedikitpun beberapa orang pemuda antara lain Slamet, Sutan Ilyas, Supardi, Samawi, dan Rusli. Ditambah 1 orang pemudi yang bernama Siti Ngaisah (ada yang memanggil Widowati[76]) segera naik ke atas *Gedung Cokan Kantai* menurunkan bendera *Hinomaru* dan menggantikannya dengan bendera Merah Putih. Saat itupula bergema lagu Indonesia Raya yang melantun dengan khidmat. Peristiwa besar ini kemudian dikenal dengan Insiden Bendera di Cokan Kantai.[77]

---

[74] Tashadi 1986/1987,op.cit.,hlm.59.
[75] Marsudi, op.cit.,hlm.52.
[76] Lihat Kutoyo, 1997 : 138
[77] Tashadi,1986/1987,op.cit.,hlm.63.

Sementara itu pada tanggal 21 September 1945, kesatuan kepolisian DIY di Asrama Patuk, yang berada di bawah pimpinan R.P. Sudarsono mengadakan ikrar ketetapan hati untuk hanya melaksanakan perintah Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai pucuk pimpinan di DaerahYogyakarta.[78] Sementara itu setelah terjadi peristiwa heroik pengibaran Merah Putih di *Gedung Cokan Kantai*, diselenggarakanlah demonstrasi di sepanjang Jalan Malioboro yang dikawal oleh Pasukan Polisi Istimewa Yogyakarta. Ketika pawai sedang berlangsung, pasukan Hei Tai dari markas pasukan Jepang di Pingit berpapasan dengan para demonstran. Suasana panas sempat terjadi di depan gedung bioskop Ratih (waktu itu) dimana kedua belah pihak siap bertempur. Namun kondisi tersebut tidak berlanjut dan pawai tetap berjalan.[79]

Peristiwa yang terjadi di depan Bioskop Ratih, ternyata berbuntut adanya usaha tentara Jepang untuk melucuti senjata Polisi Istimewa Yogyakarta. Pada tanggal 23 September 1945 tentara Jepang berhasil melucuti senjata pasukan Polisi Istimewa di Gayam. Peristiwa ini oleh komandan kompi Polisi Istimewa Oni Sastroatmodjo dilaporkan kepada Komisaris Polisi Sudarsono. Namun karena usaha Komisaris Polisi Sudarsono untuk meminta kembali senjata Polisi Istimewa melalui perundingan dengan tentara Jepang gagal, maka pada tangga 23 September 1945 jam 21.00 massa rakyat, pemuda, dan polisi bergerak mengepung markas Jepang di Gayam tersebut. Akhirnya senjata-senjata yang dirampas tentara Jepang dapat direbut kembali dan selanjutnya dibagi-bagikan kepada anggota Polisi Istimewa sebagai modal perjuangan.[80]

---

78 Kutoyo.op.cit.,hlm.139.
79 Marsudi,op.cit.,hlm. 53.
80 Tashadi, 1986/1987,op.cit.,hlm. 82.

Peristiwa tanggal 23 September 1945 tersebut, dimana massa rakyat bersama Polisi Istimewa berhasil mempertahankan kehormatannya dengan merebut kembali senjata yang dirampas tentara Jepang, menjadi bara api yang menjadikan perjuangan menentang Jepang semakin berkobar. Pada tanggal 26 September 1945, mulai jam 10.00 pagi para pegawai dari semua kantor pemerintah dan swasta melancarkan aksi serentak untuk mengambil alih pimpinan kantor. Waktu itu juga dilakukan pemogokan total dan gerakan pengambilalihan kantor dan perlengkapannya itu dibantu oleh para anggota BKR (Badan Keamanan Rakyat), pemuda dan seluruh lapisan masyarakat. Aksi serentak itu berhasil memuaskan, sehingga pada jam 20.00 malam semua instansi di Yogyakarta sudah beralih ke tangan RI. Adapun instansi dan pabrik yang sudah dikuasai itu segera dilaporkan kepada Komite Nasional Indonesia di Yogyakarta, terdiri dari 1) *Pusat Nanyo Kotabaru* dan semua cabangnya, 2) Jawatan Kehutanan, 3) *Daiken Sanyo*, dan sejmlah pabril gula antara lain Tanjungtirto, Padokan, Beran, Cebongan, Gondanglipuro, Plered, Gesikan, Rewulu, Medari, Pundong, Sewugalur dan Salakan.[81]

Melihat perkembangan yang telah terjadi di Yogyakarta sebagai dampak dari jiwa kemerdakaan rakyat Yogyakarta, maka pada tanggal 27 September 1945, KNID Yogyakarta mengeluarkan pengumuman kepada segenap pendudukan Yogyakarta bahwa pada tanggal 26 September 1945 kekuasaan pemerintah Daerah Yogyakarta seluruhnya telah berada di tangan bangsa Indonesia. Selanjutnya mulai saat itu

[81] Kutoyo,op.cit.,hlm. 139-140

Pada tanggal 28 September 1945, pusat pimpinan keamanan yang dulunya berada di Kepatihan diserahkan kepada KNID. Hal itu dilaksanakan untuk menjaga ketertiban dan menjamin keamanan agar tetap berada dalam satu pimpinan. Selanjutnya Pusat Pimpinan Keamanan dibawah pimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono IX.[82]

Usaha-usaha pengambilalihan kekuasaan dari tengan Jepang semakin gencar. Gedung Cokan Kantai yang masih diduduki oleh pihak Jepang, pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi sasaran rakyat yang terdiri dari pemuda, BPU (Barisan Penjaga Umum), BKR, Polisi, pelajar, buruh, maupun pedagang. Mereka datang berduyun-duyun sambil meneriakkan "merdeka". Melihat begitu banyak rakyat yang datang, maka *Gedung Cokan Kantai* akhirnya akhirnya dapat diambil alih oleh rakyat dan kemudian difungsikan sebagai gedung KNID. Selanjutnya *Gedung Cokan Kantai* tersebut dikenal dengan nama "Gedung Nasional" atau "Gedung Agung". Gedung KNID semula berada di bekas gedung *Hoo Koo Kai* di Jalan KHA. Dahlan. Gedung Hoo Koo Kai tersebut pada dulu juga pernah menjadi gedung Kanwil Departemen Penerangan.[83]

Puncak dari gerakan pengambilalihan kekuasaan dari tangan Jepang puncaknya terjadi pada tanggal 7 Oktober 1945 dengan meletusnya sebuah pertempuran di Yogyakarta yang dikenal dengan "Pertempuran Kotabaru". Peristiwa tersebut berawal ketika terjadi usaha melucuti senjata Jepang di Kotabaru Yogyakarta yang merupakan gudang senjata Jepang secara damai (perundingan). Perundingan tersebut terjadi pada tanggal 6 Oktober 1945 antara Mohammad Saleh (ketua KNI) dan perwakilan BKR yang terdiri dari R.P.

[82] Tashadi,1986/1987,op.cit.,hlm. 83.
[83] Ibid.,hlm. 84.

Soedarsono, Bardosono, dan Sundjojo dengan pihak Jepang yang terdiri dari *Mayor Otzuka, Ken Pei Taico Sasaki, Kapten Ito* dan *Kianbuco*. Perundingan terjadi di rumah *Butaico* (di sebelah barat SMA III). Setelah berjalan dari pukul 19.00 sampai dengan 03.00 perundingan mengalami jalan buntu. Permintaan R.P. Soedarsono agar *Butaico Mayor Otzuka* menyerahkan senjata kepada pihak RI ditolak. Mengetahui hal tersebut ribuan rakyat Yogyakarta yang didukung oleh KNI (Komite Nasional Indonesia), BPU (Barisan Penjaga Umum), BKR (Badan Keamanan Rakyat) dan Polisi siap bertempur. Letusan granat menandai pertempuran dimulai. Tembakan mitraliyur Jepang yang telah siap menghadang para pejuang. Setelah pertempuran berlangsung 7 ½ jam, jam 10.00 tanggal 7 Oktober 1945 bendera putih dikibarkan oleh tentara Jepang tanda menyerah. Senjata Jepang berhasil dilucuti dan ratusan tentara Jepang menjadi tawanan para pejuang RI.[84]

Dalam hal penyerahan senjata, pihak Jepang hanya mau menyerahkan senjata kepada Sri Sultan HB IX. Sore hari tanggal 7 Oktober 1945, komandan garnizun Jepang diterima oleh H. GBPH Prabuningrat di pintu gerbang Keben untuk dihantarkan menghadapn Sri Sultan HB IX. Selanjutnya para perwira Jepang tersebut diterima oleh Sri Sultan HB IX dikantor beliau di Emper Purworetno guna menyatakan penyerahan pasukan dan senjatanya. Selanjutnya lebih dari 360 orang tentara Jepang dikumpulkan. Oleh pasukan Polisi Istimewa tentara Jepang tersebut dibawa ke Penjara Wirogunan Yogyakarta. Dari Kotabaru dengan berjalan kaki melalui Jl. Jenderal Soedirman, Tugu, Jl. Mangkubumi, Jl.

[84] Ibid.,hlm.84.

Malioboro dan berhenti sebentar di depan Benteng Vredeburg. Selanjutnya melalui Jl. Panembahan Senopati menuju Penjara Wirogunan.[85]

Usaha pelucutan senjata Jepang di Kotabaru tersebut memakan korban para kusuma bangsa. Sebanyak 21 orang pahlawan gugur, dan 32 orang mengalami luka-luka baik berat maupun ringan. Dari 21 orang yang gugur, 2 diantaranya adalah anggota polisi yaitu I Dewa Nyoman Oka dan Supardi. Selanjutnya setelah pertempuran usai, para korban mulai dirawat. Dari 21 orang yang gugur, 18 orang diantaranya dibawa ke Gedung Agung (dulu gedung KNI). Pada pukul 16.00 baru para pejuang tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Semaki Yogyakarta. Sebanyak 3 jenazah dimakamkan di pemakaman keluarga yaitu di Karangkajen dan Kauman.[86]

Untuk menghormati para kusuma bangsa yang telah merelakan nyawana demi kehormatan bumi pertiwi Indonesia tersebut, maka nama-nama mereka diabadikan sebagai nama-nama jalan di Kotabaru Yogyakarta dan sekitarnya. Mereka yang gugur dalam peristiwa heroik tersebut antara lain :[87]

1. I Dewa Nyoman Oka
2. Hadidarsono
3. Amat Djazuli
4. Sukartono
5. Faridan M. Noto
6. A. Djohar Nurhadi
7. Bagong Ngadikan
8. Mohammad Sareh
9. Suroto
10. Muhammad Wardani
11. Syuhada
12. Trimo
13. Sudjijono
14. Ahmad Zakir
15. Sunaryo
16. Umum Kalipen
17. Supadi
18. Abubakar Ali
19. Sabirin
20. Atmo Sukarto
21. Djuwadi

[85] Kutoyo,op.cit.,hlm.144.
[86] Tashadi,1986/1987,op.cit.,hlm.85
[87] Kutoyo.op.cit., hlm.144.

Keberhasilan dalam gerakan pelucutan senjata Jepang di Kotabaru, memberikan semangat bagi rakyat untuk meluaskan gerakan pelucutan di tempat lain. Sasaran selanjutnya adalah lapangan terbang Maguwo. Sesudah dijalin komunikasi maka komandan bandara Maguwo menyatakan hanya akan menyerahkan semua senjata dan perlengkapannya kepada Sri Sultan HB IX selaku Yogya Ko. Pengambilalihan Magowo dari tangan Jepang ke Indonesia semakin dipercepat. Hal itu dilakukan oleh karena diketahui adanya seorang wakil Angkatan Udara Kerajan Inggris *(RAF / Royal Air Force)* yang datang ke Maguwo untuk mengadakan pengawasan. Melihat hal tersebut maka pihak Indonesia segera mengadakan perundingan dengan pihak Jepang. Delegasi Indonesia dipimpin oleh R. P. Soedarsono dan pihak Jepang dipimpin oleh *Mayor Hajino Sosha*. Dari perundingan tersebut akhirnya berhasil dicapai kesepakatan yang menguntungkan pihak Indonesia. Pada tanggal 17 Oktober 1945 seluruh peralatan dan senjatan sebanyak 15 truk dengan berat 25 ton serta ratus peti granat tangan berhasil dilucuti oleh pihak Indonesia.[88]

Meskipun keberhasilan demi keberhasilan dalam perjuangan melucuti senjata Jepang dapat diraih, bukan berarti perjuangan telah usai. Perjuangan panjang masih diperlukan untuk tetap tegaknya negara Indonesia. Kedatangan tentara Sekutu yang diboncengi oleh NICA *(Netherlands Indie Civil Administration)* menghadirkan masalah baru. Belanda dengan NICA nya berusaha menjajah lagi Indonesia. Peristiwa-peristiwa yang terjadi terkait dengan usaha Belanda yang ingin menjajah lagi Indonesia merupakan catan baru dalam lembaran sejarah perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya.

[88] Ibid,hlm.,146.

C. Pendudukan Ibukota RI Oleh Belanda

Pada saat berlangsung Perang Pasifik, Sekutu membagi Indonesia dalam dua daerah operasi. Sumatra dimasukkan dalam daerah operasi SEAC *(South East Asia Command)* yang berada dibawah pimpinan Lord Lousi Moubattan. Sedangkan jasa dan Indonesia bagian timur ke dalam daerah operasi SWPC *(South West Pacific Command)* dibawah komando Jenderal Mac-Arthur. Ketika perang dunia II di Eropa beakhir dengan menyerahnya Jerman tahun 1935, daerah operasi yang telah ditentukan tersebut mengalami perubahan. Menurut konferensi gabungan kepala staf Sekutu di Postdam pada bulan Juli 1945, seluruh wilayah Indonesia dijadikan daerah operasi SEAC. Secara keseluruhan, daerah-daerah yang menjadi tanggungjawab SEAC antara lain Birma, Thailan, Indoncina, dan Tanah Semenangjung Melayu. Hal ini dilakukan karena *Mac-Arthur* ingin mengerahkan seluruh kekuatan Sekutu untuk langsung menyerbu kepulauan Jepang. Serah terima secara resmi keuda komando utama Sekutu tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1945 setelah Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu.[89]

Khusus untuk Indonesia dibentuk komando khusus yaitu AFNEI *(Allied Forces Netherlands East Indies).* Pucuk pimpinan AFNEI berada dibawah komando Sir Philips Christison. Sebelum AFNEI melakukan tugas militernya, Jepang telah menyerah pada tangal 15 Agustus 1945.[90] Oleh karena itu terjadi pengalihan tugas AFNEI dari tugas militer menjadi tugas administrative. Adapun tugas-tugas AFNEI tersebut antara lain: [91]

---

[89] Poesponegaro dan Notosusanto,op.cit.,hlm.185.
[90] Ibid.
[91] Moedjanto,op.cit.,hlm.97.

1. Menerima penyerahan tentara Jepang tanpa syarat, melucuti dan mengembalikan ke tanah airnya.
2. Membebaskan APWI *(Allied Prisoners and War Internees)*. Tugas ini disebuyt RAPWI *(Recoovery of Allied Prisoners and War Internees)*.
3. Menjaga keamanan dan ketertiban sehingga memungkinkan pemerintahan sipil berfungsi kembali.
4. Mencari keterangan tentang dan mengadili para penjawat perang.

Mengingat pasukan AFNEI tidak cukup untuk dapat memasuki seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu untuk Inonesia sebelah timur tanggungjawab diserahkan pada pasukan Australia. Sementara itu AFNEI hanya melaksanakan tugasnya di Jawa dan Sumatera. Setelah mempelajari medan yang hendak ditanganinya, maka diputuskan agar dikerahkan tiga divisi.[92] Divisi tersebut antara lain Divisi India ke 26 dibawah pimpinan Jenderal *H.M. Chambers* untuk Sumatra. Divisi India ke 23 dibawah pimpinan *D.C. Hawthorn* untuk Jawa Barat, sedangkan Divisi India ke 5 dipimpin oleh *Mayor Jenderal E.C. Mansergh* untuk Jawa Timur. Karena Sekutu terdapat kekurangan kapal, maka divisi-divisi tersebut tidak dapat dikirim secara serempak. Untuk mempersiapkan pendaratan divisi-divisi tersebut, Sekutu mengirim *Mayor Greenhalgh* untuk mempersiapkan markasnya di Jakarta. Pada tanggal 14 September 1945 ia diterjunkan dengan parasut di lapangan terbang Kemayoran. Setelah markas siap, maka pada tanggal 29 September 1945 datang rombongan pertama dengan mengunakan kapal *Cumberland* dan mendarat di Tanjung Priuk Jakarta. Rombongan pertama ini adalah Divisi India ke 23 dibawah pimpinan *Jenderal Hawthorn*. Laksamana muda *W.R. Patterson* turut serta dalam rombongan ini.[93]

[92] Divisi India ke 23 berpusat di Jakarta, Divisi India ke 5 berpusat di Surabaya, dan Divisi ke 26 berpusat di Medan (Moedjanto, 1992 : 98)

[93] Poesponegoro dan Notosusanto,op.cit.,hlm. 186.

Karena divisi tersebut adalah untuk beroperasi di Jawa Timur, untuk mempercepat agar divisi ini segera melaksanakan tugas selanjutnya dikirimklah Brigade 49 yang berkekuatan 6.000 orang dibawah komandan *Jenderal Mallaby*. Pasukan ini tiba di Jawa Timur pada tanggal 25 Oktober 1945. Agar kedatangan *Jenderal Mallaby* ke Surabaya dapat lancar maka Sekutu mengirim *Kapten Huyer* seorang perwira AL Belanda. Ia tiba di Surabaya pada tanggal 23 September 1945 bersama dengan *Patterson.*[94]

Menghadapi kedatangan Sekutu, pemerintah Indonesia beserta alat-alatnya masih bersikap netral. Hal itu karena pemerintah Indonesia masih berpegang teguh bahwa Sekutu melaksanakan tugas sesuai dengan tugas AFNEI yaitu hanya sebatas mengurus tawanan perang. Namun pandangan tersebut lama-kelamaan berubah setelah ternyata pasukan Sekutu tersebut diboncengi oleh NICA *(Netherlands Indie Civil Administration).* Hal itu dapat dilihat ketika pada tanggal 10 Oktober 1945 pasukan Sekutu mendarat di Jakarta dengan disertai pasukan NICA Belanda yang kebanyakan terdiri dari atas KNIL (*Koninklijk Nederlands Indisch Leger).* Aksi tentara NICA tersebut sangat provokatif dengan mengibarkan bendera Belanda. Dengan menggunakan kendaraan jeep maupun truk pasukan NICA tersebut berikeliling Jakarta. Tidak jarang mereka melakukan show of force dengan mengeluarkan tembakan-tembakan. Mereka juga sudah mulai mengganggu keamanan dengan menembaki mobil-mobil yang berbendera Merah Putih. Dengan kondisi tersebut maka sering terjadi aksi perkelahian dan kotak fisik karena aksi tersebut sering dilawan dan diserang oleh rakyat.[95]

---

[94] Moedjanto,op.cit., hlm. 99
[95] Tashadi,1986/1987,op.cit.,hlm.99.

Sementara itu gelombang kedatangan pasukan Sekutu terus terjadi. Pada tanggal 20 Oktober 1945 pasukan Sekutu mendarat di Semarang. Selanjutnya menuju ke Ambarawa dan tiba di Magelang pada tanggal 26 Oktober 1945. Rencananya dari Magelang pasukan Sekutu akan terus ke Yogyakarta dan menempatkan pasukannya di Kotabaru. Namun hal itu tidak terlaksana, karena pada tanggal 21 Nopember 1945 pasukan Sekutu dapat dipukul mundur oleh pasukan RI yang terdiri dari TKR (Batalyon X pimpinan Letkol Soeharto dan Batalyon VIII pimpinan Mayor Sardjono), pasukan kelaskaran (TRM / Tentara Rakyat Mataram pimpinan Soetarjo), Polisi Istimewa pimpinan Oni Sastroadmodjo, TKR dari Purwokerto (Batalyon I pimpinan Iman Hadrongi dan Batalyon gabungan Wijayakusuma pimpinan Mayor Sugeng Tirtosewoyo), serta TKR dan kelaskaran dari Kedu.[96]

Untuk mengobarkan semangat jugang rakyat dalam menghadi Sekutu, dipergunakan sarana propaganda. Salah satu alat propaganda tersebut adalah siaran radio. Di Yogyakarta selain RRI (Radio Republik Indonesia) yang dipancarkan di Jl. Ngabean 1 Yogyakarta (gedung BNI 1946 sekarang), juga terdapat radio gelap yang menamakan dirinya "Radio Pemberontakan Mataram". Siaran-siarannya dipancarkan dari Kampung Kadipaten. Setiap malam melalui radio tersebut Bung Tardjo tak henti-hentinya melalukan siaran untuk membakar semangat juang rakyat untuk selalu bersemangat berjuang menghadapi dan menghancurkan musuh. Karena itulah, maka dengan dalih membungkam siaran radio ekstrimis, tentara Sekutu mulai melakukan pengeboman atas kota Yogyakarta. Dengan menggunakan pesawat *RAF (Royal Air Force),* tanggal 25

[96] Ibid., hlm. 100.

November 1945 bom dijatuhkan di atas kota Yogyakarta dan mengenai bangunan Museum Sonobudoy dan sekitarnya sehingga mengalami kerusakan. Kemudian pada tanggal 27 November 1945 pengeboman atas Yogyakarta dimulai kembali dan mengenai Balai Mataram sehingga bagian depan bangunan tersebut rata dengan tanah.[97]

Sementara kondisi politi di Indonesia semakin bertambah panas. Tindakan infiltrasi tentara Belanda dengan pasukan NICA yang dimilikinya semakin merajalela. Keadaan dan kedudukan para pembesar di Jakarta makin hari makin terancam. Hal ini dibuktikan dengan adanya percobaan pembunuhan terhadap P.M. Sutan Sjahrir oleh NICA yang terjadi pada tanggal 26 Desember 1945. Namun usaha tersebut mengalami kegagalan, sehingga P.M. Sutan Sjahrir selamat.[98] Peristiwa serupa juga terjadi terhadap Amir Sjarifudin tanggal 28 Desember 1945.

Melihat perkembangan yang terjadi di Jakarta, maka dalam sidang kabinet tanggal 3 Januari 1946 diputuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan RI ke Yogyakarta. Selanjutnya dengan organisasi yang rapi dan penuh rahasia, pada tanggal 4 Januari 1946 Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta pindah ke Yogyakarta.[99] Dengan pindahnya pemerintah RI dari Jakarta ke Yogyakarta, maka segenap potensi perjuangan dapat terpusatkan. Sejak itu Yogyakarta merupakan ibukota RI dan dari sinilah disusun dan dihimpun segenap kekuatan untuk menanggulangi musuh.

Namun sebagai ibukota RI, Yogyakarta harus menanggung konsekuensi yang cukup berat. Sebagai ibukota, dan sekaligus pusat revolusi, Yogyakarta

---

97 Ibid.,hlm.101.
98 Ibid.,hlm.102
99 Kutoyo,op.cit., hlm.155.

menjadi incaran pihak Belanda untuk menyerang dan menguasainya. Dengan menguasai ibukota RI, pihak Belanda berharap dapat menguasai Indonesia. Oleh karena itulah usaha-usaha Belanda untuk dapat menguasai Yogyakarta selalui dilakukan.

Usaha-usaha penyelesaian masalah antara RI dan Belanda yang diusahakan melalui jalan perundingan selalu mengalami jalan buntu. Hal ini disebabkan oleh Belanda yang selalu mengajukan usul-usul yang sangat merugikan RI dan jelas tidak dapat disepakati oleh delegasi RI. Ketika ada keberhasilan dalam mencari kata sepakat dalam perundingan, Belanda selalu menafsirkannya secara sepihak sehingga muncul pertentangan antara RI dan Belanda. Perundingan-perundingan gencatan senjata yang telah disepakati, seakan tidak ada artinya bagi Belanda yang sudah mabuk kekuasaan dan ingin menancapkan kuku-kuku tajamnya sebagai penjajah bangsa Indonesia. Puncak dari gagalnya diplomasi Indonesia dan Belanda adalah tejadinya aksi militer tentara Belanda yang dikenal dengan Agresi Militer Belanda Pertama dan Agresi Militer Belanda Kedua.

Beberapa perundingan yang telah ditempuh oleh RI dan Belanda untuk menyelesaikan permasalahannya antara lain : Perundingan pertama RI – Belanda dengan penengah dari Inggris mula-mula *Sir Archibald Clark Kerr* kemudian diganti *Lord Killearn*. Perundingan dimulai tanggal 10 Februari 1946. Delegasi Belanda diwikili oleh *Dr. H.J. van Mook.*[100]

Setelah diadakan penjajagan maka segera digelar perundingan secara resmi yang bertempat di *Hooge Veluwe* yang berlansung tanggal 14 – 25 April

[100] Poesponegoro dan Notosusanto,op.cit.,hlm.203.

1946. Pemerintah RI mengirimkan delegasi yang terdiri dari Mr. Suwandi, dr. sudarsono, dan Mr. Abdul Karim Pringgodigdo. Delegasi Belanda terdiri dari *Dr. van Mook, Prof. Logemann, Dr. Idenburgh, Dr. van Roijen, Prof. van Asbeck,* Sultan Hamid II dari Pontianak, dan Surio Santoso. Sedangkan sebagai penengah adalah Sir Archibald Clark Kerr dari Inggris.[101] Meski telah berlangsung 10 hari, namun perundingan tersebut tidak menghasilkan sebuah kesepakatan yang berarti, artinya perundingan tersebut gagal.

Selanjutnya di Jakarta, pada tanggal 20 September 1946 diadakan perundingan gencatan senjata RI, Sekutu dan Belanda. Indonesia diwakili oleh Jenderal Mayor Soedibjo, Komodor Udara Suryadi Suryadarma (utusan Pulau Jawa, Kolonel Simbolon, dan Letkol Abdullah Kartawirana (utusan Sumatra). Dari pihak Sekutu hadir *Mayor Jenderal JFR. Forman* dan *Brigadir Jenderal IDA. Lauder.* Belanda diwakili oleh *Mayor Jenderal DH Buurman van Vreeden*. Perundingan gencatan senjata tersebut berlangsung hingga tanggal 30 September 1946, meski tidak menghasilkan apa-apa.

Meski telah berlangsung 10 hari, namun perundingan tersebut tidak menghasilkan sebuah kesepakatan yang berarti, artinya perundingan tersebut gagal. Demikianlah perunding-perundingan tetap dilaksanakan namun hasilnya juga tetap, yaitu gagal. Sampai pada suatu ketika perundingan dilaksanakan di Linggajati (di sebelah selatan Cirebon). Perundingan dimulai pada tanggal 10 November 1946.

Selanjutnya Lord Killearn berhasil membawa wakil-wakil RI dan Belanda ke meja perundingan yang berlangsung di kediaman konsul jenderal Inggris di

[101] Poesponegoro dan Notosusanto.op.cit.,hlm.205.

Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1946. Delegasi RI diketuai oleh PM Sutan Sjahrir, sementara Belanda diwakili oleh suatu komisi yang dikirim oleh Belanda yang diketuai *Prof. Schermerhorn.*[102]

Untuk selanjutnya sebagai kelanjutan dari perundingan-perundingan selanjutnya sejak tanggal 10 November 1946 di Linggajati, dekat Cirebon, dilangsungkan perundingan antara RI dengan komisi umum Belanda. Perundingan itu dipimpin oleh *Lord Killearn*. Tanggal 15 November 1946 hasil persetujuan diparaf oleh kedua belah pihak, dan kemudian baru tanggal 25 Maret 1947 naskah tersebut ditandatangani.[103]

Penandatanganan Persetujuan Linggarjati menimbulkan pro dan kontra di kalangan bangsa Indonesia. Partai-partai pun turut bergejolak, sehingga menyebabkan pudarnya nama P.M. Sutan Sjahrir yang memuncak dengan bubarnya kabinet Sjahrir. Selanjutnya P.M. Amir Syarifudin yang memimpin kabinet sejak tanggal 2 Juli 1947. Waktu itu Mr. Amir Syarifudin merangkap dua jabatan yaitu sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Pada masa pemerintahan kabinet Amir Syarifudin ini terjadi "Perang Nota" antara republik Indonesia dan Belanda dimana usul dibalas usul, kontra usul dibalas kontra usul. Kemudian pihak Belanda mengajukan tuntutan yang pada intinya mencari-cari alasan untuk melakukan agresi terhadap Republik Indonesia.[104] Puncak dari adanya perang nota tersebut adalah adanya keputusan dari Belanda yang tidak lagi mau terikat dengan "Perjanjian Linggajati". Artinya Belanda menghendaki

---

[102] Kartasasmita, dkk., *"30 Tahun Indonesia Merdeka1945-1949".* Jakarta : 1986, PT. Citra Lamtoro Gung Persada,hlm.116.

[103] Ibid.,hlm. 119 dqn 138

[104] Tashadi,1986/1987, op.cit. hlm.110.

terjadinya perang. Oleh karena itulah maka meletuslah Agresi Militer Belanda I tanggal 21 Juli 1947.

Apa yang disebut dengan Aksi Militer Belanda I mulai berlangsung pada tanggal 19 Juli 1947 pukul 17.00. Tetapi pemberian kekuasaan oleh *Perdana Menteri Beel* kepada *Letnan Gubernur Jenderal Van Mook* untuk melancarkan apa yang disebut oleh pihak belanda sebagai "aksi polisionil" baru berlangsung pada tanggal 20 Juli 1947 lewat tengah malam, dengan sebuah pidato radio.[105]

Sekitar pukul 07.00 pagi tanggal 21 Juli 1947 lapangan terbang Maguwo diserang dari udara. Sekitar empat buah pesawat jenis pemburu Belanda melayang-layang di atas ibukota Yogyakarta. Pesawat-pesawat tersebut terbang rendah mengadakan pameran kekuatan selama 15 menit, lalu melancarkan pemboman dan tembakan-tembakan gencar terhadap lapangan terbang Maguwo. Sekitar pukul 15.00 tengah hari pesawat terbang muncul kembali dan menyerang Maguwo untuk kedua kalinya.[106] Kemudian dari tanggal 22 sampai 26 Juli 1947 Belanda giat melancarkan serangan ke berbagai daerah di Indonesia.

Pada tanggal 21 Juli 1947 itu, Sutan Syahrir meninggalkan Yogya dan berangkat ke luar negeri membawa pesan istimewa dari Pemerintah Republik untuk memberi penerangan tentang sikap republik. Negara-negara yang akan dikunjungi antara lain Amerika, Inggris dan India.[107] Keterangan pers Sutan Syahrir inilah yang menjadikan dunia marah, ternyata Belanda membohongi dunia.

---

[105] Ibid.,hlm.111.
[106] Ibid.,hlm.114.
[107] Tashadi, dkk. *"50 tahun Republik Indonesia di Yogyakarta Sebuah Lintasan Sejarah",* Yogyakarta : Panitia Gabungan Peringatan HUT RI Ke 50 Kemerdekaan RI, Bhakti Pertiwi, Propinsi DIY.1995:hlm.74.

Disini perlu pula disampaikan suatu peristiwa yang menyedihkan yang terjadi di Yogya ketika Sutan Syahrir 1 minggu meninggalkan tanah air. Pada tanggal 29 Juli 1947 ada sebuah pesawat *Dakota VT-CLA* milik *Patnaik* yang membawa obat-obatan ditembak jatuh oleh 2 pesawat pemburu Belanda. Pesawat tersebut merupakan pesawat yang membawa Sutan Syahrir sampai Singapura. Dalam kejadian tersebut 5 awak warga asing dan 4 awak warga Indonesia (Adi Sucipto, Hadisumarno, Dr. Abdulrakhman Saleh dan Arifin) meninggal dunia, sedang yang selamat adalah Abdul Gani.[108]

Agresi ini menimbulkan protes keras sehingga atas inisiatif India dan Australia, permasalahan RI dan Belanda berhasil dibahas di PBB. Hasil dari pembicaraan PBB maka perlu dibentuk komisi jasa baik untuk mengawasi gencatan senjata RI – Belanda. Komisi itu kemudian terkenal dengan ”Komisi Tiga Negara” /KTN. Dalam sidang kabinet RI tanggal 6 September 1947 RI meminta Australia menjadi anggota KTN, sementara Belanda memilih Belgia. Sedangkan Australia dan Belgia memilik Amerika Serikat. Tiga negara tersebut masing-masing diwakili oleh *Paul van Zeeland* (Belgia), *Richard Kirby* (Australia), dan *Dr. Frank Graham* (Amerika Serikat). Mereka tanggal 27 Oktober 1947 tiba di Jakarta.[109] Dalam pertemuannya di Sidney, pada tanggal 20 Oktober 1947 KTN memutuskan bahwa tugas mereka di Indonesia adalah untuk membantu menyelesaikan sengketa antara RI dan Belanda secara damai. Atas usul KTN perundingan dilakukan diatas sebuah kapal pengangkut pasukan AL Amerika Serikat *”USS Renville”*. Akhirnya perundingan dimulai tanggal 8 Desember 1947 di atas Kapal Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta. Delegasi

[108] Tashadi,1986/1987,op.cit.,hlm. 119-120.
[109] Kartasasmita,op.cit.,hlm.152.

RI dipimpin Mr. Amir Syarifudin, dan Belanda dipimpin oleh R. Abdulkadir Widjojoatmodjo.[110] Meskipun sudah tercapai persetujuan di atas Kapal Renville, tembak menembak belum juga berhenti. Tanggal 9 Januari 1948 Belanda mengajukan ultimatum kepada RI untuk mengosongkan sejumlah daerah yang luas dan menarik TNI dari daerah-daerah gerilya di Yogyakarta.[111]

Oleh karena masalah yang rumit untuk disepakati, maka pihak KTN mengadakan pembicaraan khusus dengan RI di Kaliurang pada tanggal 13 Januari 1948. Hasil perundingan ini disebut dengan "notulen kaliurang" ialah penjelasan 6 dalil dari KTN yang dimasukkan dalam *Persetujuan Renville*. Persetujuan tersebut ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 17 Januari 1948. [112]

Dalam suasana seperti itu akhirnya perjanjian *Renville* ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948, disusul dengan instruksi penghentian tembak menembak pada tanggal 19 Januari 1948. Persetujuan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan pemerintah RI sehingga mengakibatkan Kabinet Amir Sjarifuddin jatuh

Setelah naskah perjanjian ditandatangani, dalam hal tafsiran tidak ada perbedaan pendapat. Akan tetapi, dalam hal pelaksanaannya timbul perselisihan mengenai pembentukan pemerintahan sementara dimana pihak Belanda memaksakan kehendak akan pembentukan ketatanegaraan baru yang merugikan pihak Indonesia. Pada tanggal 11 Desember 1948 delegasi Belanda yang dipimpin oleh Abdul Kadir Wiryoadmojo menyatakan tidak dapat melanjutkan perundingan.[113] Itu berarti bahwa persetujuan Renville menemui kegagalan.

---

[110] Ibid.,hlm.155.
[111] Ibid.,hlm.162.
[112] Tashadi,1995,op.cit.,76.
[113] Tashadi,1986/1987,op.cit.,hlm.122.

Dari waktu ke waktu, keadaan semakin genting. Suhu politik hubungan antara Indonesia dan Belanda semakin panas. Niat Belanda untuk memaksakan kehendaknya menjajah kembali Indonesia semakin hari semakin tidak tertahan. Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 1948 Belanda menyampaikan ultimatum melalui KTN yang meminta RI harus mengakui sepenuhnya kedaulatan Belanda, dan ikut serta dalam pemerintahan yang dirancang oleh Belanda. Jawaban RI harus sudah diterima pada tanggal 18 Desember 1948 jam 10.00 WIB. Sebuah permintaan yang mustahil dilakukan. Karena tidak ada tangapan dari RI, mak tanggal 18 Desember 1948 pukul 23.30 Dr. Beel secara resmi melalui KTN menyampaikan pernyataan bahwa terhitung sejak tanggal 19 Desember 1948 mulai pukul 00.00 WIB Belanda tidak mengakui lagi de facto RI dan tidak terikat lagi dengan persetujuan Renville.[114]

Pada tanggal 19 Desember 1948, pukul 05.30, lapangan terbang Maguwo telah dihujani bom oleh pesawat-pesawat pembom *Mitchell (B.25)* Belanda yang kemudian segera diikuti dengan penerjunan satu batalyon pasukan Baret Hijau dibawah pimpinan *Kolonel Van Langen*. Pasukan tersebut secara khusus mendapat tugas untuk menguasai Maguwo. Dalam waktu sekejap pesawat-pesawat Belanda segera memenuhi langit Maguwo antara lain pesawat *Spitfire, Mustang, Lookhead,* dan *Mitchell.*[115]

Ketika terjadi penyerangan atas Maguwo terjadi, beberapa anggota TNI AU berusaha mempertahankan Maguwo. Para anggota yang bertugas jaga lapangan terbang Maguwo (sekarang Adisucipto) pimpinan Perwira Piket Kadet Udara Kasmiran mencoba melakukan perlawanan. Perlawanan yang dipimpin

[114] Tashadi,1995,op.cit.,hlm.77.
[115] Marsudi,op.cit.,hlm. 130.

oleh Kadet Udara Kasmiran berkekuatan lebih kurang 40 orang, berlangsung kurang lebih hampir satu jam (pukul 06.00 s.d. 07.00 WIB). Perwira Udara Kasmiran, Sersan Mayor Tanumiharjo, Kopral Tohir bersama anak buahnya gugur dalam mempertahankan lapangan terbang Maguwo. Pukul 08.00 WIB Maguwo telah jatuh ke tangan Belanda disusul mendaratnya Dakota pertama Belanda. Selang beberapa menit kemudian sudah mendarat 5 pesawat dengan mengangkut rombongan *Resimen Speciale Troepen* yang kemudian mempelopori serangan atas kota Yogyakarta.[116]

Pada waktu terjadi agresi militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948, Kota Yogyakarta secara taktis berada dibawah tanggungjawab Komando Militer Kota Yogyakarta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel A. Latif. Untuk menghambat laju pasukan Belanda dari Maguwo ke arah barat dilakukan penghadangan oleh Mobbrig / Mobil Brigade DKN (Djawatan Kepolisian Negara) yang sedang pendidikan di dekat asramanya di Ambarukmo. Terlibat pula dalam penghadapan pasukan Belanda tersebut yaitu 2 seksi brigade X dan staf batalyon 4 Brigade X, 4 peleton taruna Militer Akademi Yogyakarta. Namun karena perbedaan kekuatan yang mencolok antara pasukan Belanda RI tersebut, maka penghadangan tersebut hanya bersifat menghambat gerak pasukan Belanda menuju kota Yogyakarta.[117]

Sementara pasukan Belanda bergerak menuju kota Yogyakarta, dalam keadaan darurat Presiden Soekarno mengadakan sidang. Dalam sidang tersebut diputuskan bahwa Presiden, Wakil Presiden dan beberapa menteri tetap tinggal di kota dengan kemungkinan ditawan, namun tetap dekat dengan KTN. Selanjutnya

[116] Tashadi,1995,op.cit.,hlm.77.
[117] Marsudi,op,cit.,hlm. 133-134.

juga diputuskan bahwa Mr. Syaffrudin Prawiranegara (Menteri Kemakmuran yang sedang berada di Sumatra) dengan perantara radio diberi kuasa membentuk Pemerintah Darurat RI. Mandat semacam itu juga diberikan kepada Dr. Sudarsono dan Mr. A.A. Maramis yang berada di New Delhi. Dengan maksud apabila Mr. Syaffrudin Prawiranegara gagal membentuk pemerintahan darurat di Sumatra, keduanya dapat membentuk Excile Gouverment (Pemerintahan Pelarian).[118]

Tanggal 19 Desember 1948, pukul 14.00 kota Yogyakarta telah dalam posisi terkepung dari segala penjuru oleh beberapa pasukan pelopor Belanda. Wanita dan anak-anak dimanfaatkan oleh pasukan Belanda sebagai perisai dalam gerakan mereka mengepung kota. Kondisi tersebut praktis menjadikan pasukan RI tidak berani mengadakan perlawanan, sehingga geraka pasukan Belanda dalam memasuki kota Yogyakarta berjalan mulus tanpa perlawanan yang berarti. Pukul 16.00 pasukan Belanda telah mengepung istana kepresidenan Yogyakarta (Gedung Agung). Tentara Belanda segea memerintahkan agar presiden dan pembesar negara lainnya yang berada di Istana dilarang meninggalkan istana. Ini berarti mereka menjadi tawanan Belanda. Para pembesar negara tersebut antara lain Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Maji Agus Salim, Mr. Ali Sastroamijoyo, Mr. Mohammad Roem, Sutan Syahrir, Mr. A.G. Pringgodigdo, Komodor Suryadi Suryadarma, serta beberapa orang pembesar lainnya. Beberapa hari kemudian mereka dipindahkan ke Prapat dan kemudian dipindahkan lagi ke Manumbing (Bangka) sampai saat pamerintah RI kembali ke Yogyakarta.[119]

---

[118] Tashadi,1995,op.cit.,hlm.79-80.
[119] Tashadi,1986/1987,op.cit.,hlm.131-132.

Dengan dikuasainya kota Yogyakarta dan ditawannya para pembesar negara tersebut, berarti kota Yogyakarta sebagai ibukota RI telah jatuh ke tangan Belanda. Namun hal itu bukan berarti Indonesia telah hancur. Perjuangan tetap berjalan terus dengan sistem gerilya yang didukung sepenuhnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Rasa cinta tanah air dan semangat kemerdekaan yang tinggi menjadi dasar perjuangan. Persatuan TNI dan rakyat menjadi kekuatan yang tidak mudah dipatahkan oleh penjajah sehingga cita-cita tetap tegaknya kedaulatan RI tetap terjaga. Ini terbukti dengan adanya pengakuan kedaulatan RIS pada tanggal 27 Desember 1949.

D. Perlawanan Rakyat Semesta.

Pada bulan Desember 1948, kabinet Hatta melihat pertanda buruk bahwa Belanda benar-benar ingin menguasai Indonesia kembali melalui jalan apapun termasuk dengan aksi militer. Melihat gelagat tersebut muncul keyakinan pemerintah bahwa Belanda tidak akan meneruskan perundingan. Oleh karena itu pada tanggal 16 Desember 1948 malam hari secara mendadak diadakan sidang kabinet. Sidang tersebut memutuskan antara lain selama presiden dan wakil presiden tidak dapat melaksanakan tugas maka pimpinan pemerintahan diserahkan kepada tiga orang menteri yaitu Dr. Sukiman (Menteri Dalam Negeri), Mr. Susanto Tirtoprodjo (Menteri Kehakiman), dan Ir. Juanda (Menteri Perhubungan).[120]

[120] Maladi. R., *"Perang Rakyat Semesta 1948-1949",* makalahpada seminar revolusikepahlawanandanpembangunanbangsa. (Yogyakarta :BalaiKajianSejarahdanNilaiTradisional Yogyakarta, 16 November 1994):hlm.10.

Kabinet juga memutuskan, jika di Pulau Jawa sudah diduduki musuh, maka Wakil Presiden / Perdana Meteri Drs. Mohammad Hatta beserta pembesar sipil dan militer pada tanggal 18 Desember 1948 pergi ke Sumatra dengan tujuan Bukittinggi, Sumatra Barat untuk mempersiapkan tempat tersebut sebagai pusat perjuangan dengan membentuk PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia). Waktu itu direncanakan yang akan menyertai Perdana Menteri Mohammad Hatta antara lain Mr. Syafrudin Prawiranegara (Menteri Kemakmuran), Mr. Lukman Hakim (mantan Menteri Muda Keuangan), Rusli Hidayat, Kolonel Hidayat (Panglima Komando PTTS), dan Letnan Kolonel Akil Prawiradiredjo.[121]

Seiring dengan pejalanan waktu, apa yang dikhawatirkan oleh para pemimpin negara terjadi. Tanggal 19 Desember 1948, Pukul 06.00 Belanda telah menyerang Lapangan Terbang Maguwo. Selanjutnya dilanjutkan dengan dengan gerakan Tentara Belanda menuju pusat kota Yogyakarta. Melihat hal tersebut para pemimpin negara segera berkumpul dan bersidang di Gedung Agung dibawah pimpinan Presiden Soekarno. Salah satu keputusan penting yang diambil dalam sidang tersebut adalah pemberian kuasa kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara di Sumatra melalui radiogram untuk mendirikan PDRI jika pemerintah pusat di Jawa tidak dapat melaksanakan fungsinya. Perintah yang sama juga diberikan kepada Dr. Sudarsono di India agara dapat mendirikan Gouverment in Exille jika Mr. Syafruddin Prawiranegara gagal melaksanakan mandatnya.[122]

Setelah sidang selesai, oleh sekretaris, keputusan pemerintah yang berisi mandat Presiden Soekarno kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara dan Mr. Sudarnsono, L.N. Palar, dan Mr. Maramis disebarkan pada para wartawan dan

[121] Ibid.,hlm.12-13.
[122] Tashadi,1986/1987,op.cit.,hlm. 125.

berhasil pula disiarkan melalui berita ANTARA ke seluruh dunia. Disamping itu disiarkan pula seruan pemerintah agar para anggota delegasi atau pembesar pemerintah tidak mengadakan perundingan sendiri-sendiri dengan Belanda. Perundingan hanya bisa dilakukan jika para pemimpin RI (yang ditawan) dapat berkumpul satu sama lain serta bebas dari suatu tekanan. Pengumuman ini juga menegaskan bahwa mulai tanggal 19 Desember 1948 pamerintah pusat di Jawa tidak berkuasa lagi, dan kekuasaan dipindahkan kepada PDRI yang dipimpin oleh Mr. Syafrudin Prawiranegara.[123] Selain Mr. Syafrudin Prawiranegara, anggota PDRI antara lain Mr. Teuku Mohammad Hassan, Ir. M. Sitompul, Mr. Moh. St. Rasyid, Ir. Indera Cahya dan Mr. Lukman Hakim.[124]

Meskipun PDRI terbentuk, namun sebenarnya mandat yang dikirim oleh Presiden Soekarno tidak pernah sampai kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara. Inisiatif untuk mendirikan PDRI diambil oleh Mr. Syafrudin Prawiranegara bersama Tengku Mohammad Hassan (Ketua Komisariat Pusat Untuk Sumatra) dan Kolonel Hidayat (Panglima Tentara dan Teritorium Sumatra / PTTS) dalam sebuah pertemuan yang diadakan tanggal 19 Desember 1948 sore hari. Terbentuknya PDRI tersebut selanjutnya diresmikian pada tanggal 22 Desember 1948 di Halaban, dekat Payakumbuh. Mr. Syafrudin Prawiranegara sebagai ketua, Tengku Mohammad Hassa sebagai wakil ketua. Untuk menghindari sergapan tentara Belanda, letak PDRI selalu berpindah-pindah. Tempat terlama yang yang ditempati sebagai markas ialah Desa Bidar Alam, Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat. Pada tanggal 31 Maret 1949 kabinet PDRI disempurnakan dengan memasukkan beberapa tokoh dari Jawa sebagai meteri. Mengenai hubungan

[123] Tashadi,1995,op.cit.,hlm. 81.
[124] Tashadi,1986/1987,op.cit.,hlm. 128.

dengan pera pemimpin di Jawa, PDRI baru dapat melaksanakanna pada akhirn Januari 1949. Hubungan dilaksanakan untuk menyamakan sikap dalam bertindak menghadapi Belanda. Apa yang dilakukan PDRI ini mendapatkan dukungan dari angkatan perang. Jenderal Soedirman, Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) T. B. Simatupang, Panglima Tentara dan Teritorium Djawa (PTTD) Kolonel A.H. Nasution sering mengadakan hubungan dengan PDRI melalui radiogram. PDRI juga sering mengadakan hubunan dengan para politisi dan diplomat RI yang berjuang dimeja perundingan PBB.[125] Setelah berjuang mempertahanaan pemerintah RI selama 7 bulan, maka pada tanggal 13 Juli 1949, Mr. Syafrudin Prawiranegara mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta.[126] Hal ini menyusul dilaksanakannya pegembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta dan pembebasan para tawanan Belanda yang ditawan sejak 19 Desember 1948 ke Yogyakarta sebagai pelaksanaan persetujuan Roem Roijen yang telah ditandatangani tanggal 7 Mei 1949.

Ketika Belanda berhasil menguasai Yogyakarta dan menahan para pemimpin negara, para petinggi TNI berhasil meloloskan diri dan mundur ke luar kota untuk mengadakan perlawanan secara bergerilya. Mereka itu antara lain Panglima Besar Jenderal Soedirman, Kolonel TB. Simatupang, dan Kolonel A.H. Nasution yang waktu itu sedang mengadakan inspeksi pasukan di Jawa Timur.[127]

Ketika Belanda melakukan serangan atas kota Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948, Panglima Tentara Teritorium Djawa (PTTD) Kolonel A.H. Nasution beserta staff inti Markas Besar Komando Djawa (MBKD) sedang melakukan inspeksi ke Jawa Timur. Setelah mendapatkan laporan dari Letnan

[125] Poesponegoro dan Notosusanto,op.cit.,hlm. 260-261.
[126] Ibid.,hlm.261.
[127] Marsudi.op.cit.,hlm. 134.

Kolonel Kretarto (Komandan Brigade Khusus) bahwa Belanda telah menyerang kota Wlingi, Kepanjen, Maospati, Tuban, dan Maguwo, diputuskan agar rombongan segera kembali ke Yogyakarta dengan menggunakan Kereta Api Luar Biasa (KLB). Sesampainya di Stasiun Srowot Prambanan, diketahui bahwa Yogyakarta telah dikuasai oleh Belanda. Oleh karena itu perjalanan ke Yogyakarta diurungkan dan dirubah dengan mengarahkan rombongan ke Desa Kepurun, Klaten. Selanjutnya desa Kepurun tersebut dijadikan Markas Besar Komando Djawa (MBKD) dengan sandi MBKD Pos X-1.[128]

Sementara itu dengan dasar pertimbangan tertawannya para pemimpin RI, dan untuk mengisi kekosongan pemerintahan sipil, Panglima Teritorium Tentara Djawa (PTTD) Kolonel A.H. Nasution mengeluarkan maklumat No. 2/MBKD pada tanggal 22 Desember 1948 yang mengumumkan berlakunya pemerintahan militer untuk seluruh Jawa.[129] Pemerintahan menggunakan sistem pemerintahan gerilya yang bersifat "totaliter" yaitu melibatkan seluruh rakyat atau menggunakan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Sistem gerilya yang "totaliter" ini ternyata lebih baik bila dibandingkan dengan sistem linier. Karena dengan demikian rakyat dapat lebih punya peran dalam perjuangan meski mereka harus berjuang di garis belakang melalui dapur umum, palang merah, kurir, maupun spionase.

Dalam rangka mewujudkan suatu pertahanan rakyat semesta yang telah dirumuskan oleh TNI jauh-jauh hari sebelum agresi militer Belanda II terjadi, maka PTTD Kolonel A.H. Nasution mengeluarkan instruksi nomor

[128] Tashadi,1995,op.cit.,hlm. 82.
[129] Suherly, Tom. *"Sedjarah Perang Kemerdekaan"*. Jakarta :Pusat Sedjarah ABRI.1971, hlm.71.

1/MBKD/1948 tertanggal 25 Desember 1948 tentang susunan Pemerintahan Militer di Jawa. Susuan pemerintahan militer tersebut adalah : Panglima Besar Angkatan Peranga (PBAP) → Panglima Tentara dan Teritorium Djawa (PTTD) → Gumber Militer Daerah (GM) → Komando Militer Daerah (KDM) → Komando Onder Distrik Militer (KODM). Dalam perkembangannya, Belanda semakin hari semakin aktif mengadakan patroli ke desa-desa. Kondisi ini menjadikan keberadaan MBKD Pos X-1 di Kepurun terancam. Oleh karena itulah pada bulan Februari 1949 Kolonel A. H. Nasution dan stafnya memindahkan MBKD Pos X-1 dari desa Kepurun ke desa Boro, Kalibawang, Kulon Progo. Selanjutnya MBKD di desa Boro disebut dengan sandi MBKD Pos X-2. Selanjutnya dari sinilah instruks-instruksi PTTD disampaikan kepada seluruh tentara dan gerilyawan melalui radiogram yang mengudarai dari pukul 15.00 hingga 17.00. Keberhasilan dalam pengiriman berita-berita ini berkat kerjasama yang erat dan dukungan rakyat di Desa Boro antara lain dengan membentuk Pasukan Pager Desa yang dipimpin oleh Bapak Sastrowihardjo, seorang carik di Desa Boro.[130]

Pada masa revolusi, Pemerintah Kabupaten merupakan sebuah pemerintah gerilya. Sebab dalam menjalankan roda pemerintahannya, bupati dan stafnya selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain yang dipandang aman untuk selalu dapat menjalin hubungan ke bawah dengan camat, lurah dan kepala dukuh. Pemerintah kabupaten didampingi pemerintahan militer yang disebut Komando Distrik Militer (KDM). Di tingkat kecamatan juga didampingi pemerintahan militer yang disebut Komando Onder Distrik Militer (KODM).

[130] Tashadi,1995,op.cit.,hlm. 82-83.

Pemerintah kelurahan dijalankan oleh lurah dibantu pamong desa dan dan pager desa. Pejabat dari tingkat bupati sampai kepala dukuh merupakan kelompok inti dalam perang gerilya. Dalam lapisan masyarakat mereka termasuk berada pada tingkat atas.[131]

Bersamaan dengan jatuhnya Kota Yogyakarta 19 Desember 1948, suasana revolusi mulai mewarnai kehidupan di pedesaan. Sejak itu daerah pedesaan merupakan tempat pertahanan dan tempat pengungsian. Mereka yang datang ke desa adalah para pejuang dari bermacam-macam kesatuan pejuang dan penduduk dari kota. Suasana revolusi mewarnai kehidupan dan menimbulkan kegiatan tambahan bagi penduduk desa. Mereka melakukan penjagaan dan pengawasan di luar desa. Selain itu ada yang menggabungkan diri pada kesatuan pejuang yang bermarkas di desa setempat, terutama para pemudanya.[132]

Pedesaan pada masa periode 1948-1949 mempunyai peran yang sangat penting. Terlebih lagi semenjak Yogyakarta diserang dan diduduki musuh. Kemudian para pemimpin militer memutuskan untuk pergi ke luar kota. Mereka mengadakan perlawanan terhadap Belanda dengan menyusun strategi dan menggunakan segala pontensi yang ada di pedesaan. Dengan demikian tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa pada hakekatnya sebagian terbesar dari revolusi Indonesia terjadi atau berlangsung di pedesaan.[133]

---

[131] Tashadi, dkk,"*Peranan Desa Dalam Perjuangan Kemerdekaan :Studi Kasus Keterlibatan Beberapa Desa di Daerah Istimewa Yoygakarat Periode 1945-1949".* Jakarta :Depdikbud,1991/1992,hlm. 140.

[132] Ibid.,hlm.7

[133] Koentjaraningrat,"*KebudayaanJawa".*Jakarta,BalaiPustaka.1984:. hlm.95.

Pelosok-pelosok desa akhirnya merupakan basis perlawanan terhadap Belanda, gunung-gunung menjadi pusat kegiatan gerilya. Rakyat desa pada umumnya menyambut dengan baik keberadaan tentara yang ada di desanya. Para tentara itu dibantunya menurut kemampuan masing-masing, baik moral maupun materiil dengan kesadaran penuh dan secara sukarela. Hal semacam itu juga dilakukan kepada semua alat negara yang mennyelenggarakan pemerintahan RI.

Suatu tindakan yang sangat penting untuk sebuah perang gerilya yang berlangsung lama ialah mengatur perlawanan rakyat umum. Semangat perlawanan yang rakyat yang berapi-api perlu disalurkan dalam organisasi resmi dan teratur. Perang gerilya harus berjalan meluas, harus merata dari ujung pulau yang satu sampai dengan yang lainnya. Sehingga untuk masalah ini keluarlah instruksi mengenai pasukan gerilya desa, yang kemudian disingkat "Pager Desa". Instruksi mengenai Pager Desa tersebut dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 1949, no 11/MBKD/1949. Pada masa itu Pager Desa cepat sekali berkembang dan sangat penting peranannya. Ketika perang telah usaipun peranannya sangat berarti dalam masa tindakan-tindakan keamanan. Korban diantara mereka jumlahnya melebihi jumlah korban dari TNI. Pager Desa inilah yang mewujudkan perlawanan rakyat yang murni. Banyak diantaranya yang kemudian menjadi anggota tentara biasa atau menjadi pamong desa. Inilah bukti bahwa Pager Desa itu mempunyai banyak tenaga pemuda desa yang terpilih. Pada masa revolusi terlaksana pimpinan desa yang kuat dalam persatuan lurah – pamong desa – Pager Desa.[134]

Pasukan Republik mengetahui bahwa keunggulan Belanda di bidang persenjataan dan latihan tidaklah lagi efektif oleh karena para gerilyawan dapat

[134] Nasution, A.H. "*Pokok-Pokok Gerilya.*Bandung" :Penerbit Angkasa.1980:hlm.312-313.

menyerang mereka hampir di mana saja dari pangkalan-pangkalan di daerah pedesaan. Bagi pihak tentara, masalah ini juga memberikan contoh hubungan tentara dan penduduk sipil. Oleh karena itu ketika orang-orang sipil terkemuka ditangkap Belanda, tentara mengambil alih pimpinan perlawanan rakyat dengan dukungan hangat dari penduduk desa yang memberi mereka makanan dan pelayanan yang ramah tamah.[135]

Pengalaman strategi perlawanan pada masa agresi militer I, memberikan pelajaran bapi para ahli perang Indonesia. Sistem pertahan linier waktu itu mampu diterobos oleh pasukan Belanda. Setelah dianalisis maka diterapkanlah strategi perlawanan yang baru dengan dasar lingkaran pertahanan *(wehrkreise).* Dalam sistem ini front terdapat di segala penjuru dan musuh dianggap datang dari segala arah. Pusat perlawanan tidak berada dikota-kota, melainkan di desa-desa. Selain itu tentara yang disusun dalam unsur-unsur yang berdiri sendiri dapat beroperasi secara merdeka dalam satuan yang relatif kecil. Tentara Indonesia pada pokoknya berada di seluruh pelosok pedusunan. Dengan demikian maka pertahanan yang berupa lingkaran atau kantong-kantong pertahanan (Wehrkreise) itu desa menjadi jelas keterlibatannya dalam perlawanan terhadap Belanda.[136]

Demikianlah perjuangan yang terjadi pada masa revolusi fisik dalam rangka mepertahankan kemerdekaan Indonesia. Kekuatan Belanda dengan persenjataan relatif modern merasa sulit mematahkan perlawanan rakyat yang secara semesta bahu membahu seluruh lapisan. TNI dengan dukungan penuh dari

---

[135] Reid, Anthony. *Fase Kedua :Kemenangan TerakhirJuli 1947-1950 DalamGelora Api Revolusi.*Jakarta,Gramedia,1986:hlm.185.

[136] Notosusanto, Nugroho. 1979. "*Tentara Peta".*Jakarta,1979, Gramedia.hlm.145-147.

seluruh lapisan masyarakat merupakan kekukatan tangguh yang sulit dilumpuhkan. Hingga akhirnya, setelah gagal menunjukkan pada dunia akan kehancuran RI dan TNI nya, Belanda bersedia berunding kembali. Melalui perundingan itulah akhirnya Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan berdasarkan KMB.

BAB III
AKTIVITAS DAPUR UMUM
MASA PERANG KEMERDEKAAN II DI YOGYAKARTA

Dapur umum merupakan salah satu wujud nyata dari rasa patriotisme. Patriotisme adalah kecintaan pada tanah air berkaitan dengan sikap nasionalisme suatu bangsa yang terdiri dari komponen etnis di dalam suatu wilayah negara yang menjadi warisan nasional. Pengertian patriotisme bisa didefinisikan sebagai semangat cinta tanah air, sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya demi kejayaan dan kemakmuran tanah air. Patriotisme lebih menitikberatkan pada solidaritas sikap warga negara terhadap lingkungan keluarga dan pengalaman hidup bersama, disertai dengan pengorbanan bagi kepentingan umum terhadap nilai-nilai kemerdekaan, keadilan, persamaan hak, sistem pemerintahan yang demokratis, keindahan alam, serta membangun kesejahteraan rakyat sebagai warisan nasional yang harus diperjuangkan. Patriotisme tidak hanya dalam arti sempit sebagai budaya perang kewajiban setiap warganegara membela tanah air demi kehormatan dan darma bakti.[1] Patriotisme sebagai tanggung-jawab bersama dan cinta tanah air tidak selalu dikaitkan dengan ikut berperang di garis depan. Patriotisme dapat diekspresikan dalam bentuk yang lain, apabila dikaitkan dengan keberanian, misalnya dapur umum pada masa perang kemerdekaan. Rakyat dengan keberanian dan semangat rela berkorban menanggung resiko materi dan non materi bagi keberlangsungan perjuangan.

Dapur umum merupakan realisasi dari tindak kebiasaan gotong royong sifat ringan tangan dan saling tolong menolong yang pada hakekatnya merupakan ciri kepribadian bangsa Indonesia. Pada masa perang kemerdekaan, partisipasi rakyat dalam mendukung perjuangan ditunjukan dengan ikut berjuang di garis depan medan pertempuran dan mendukung dari belakang. Rakyat yang tidak ikut berjuang di medan pertempuran kebanyakan membantu di sektor logistik makanan bagi pejuang. Penyediaan makanan bagi pejuang sifatnya secara

[1] Wisnu Mintaro, *Musik Revolusi Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2008, hlm 10.

spontan, baik yang diberikan atau disediakan secara langsung maupun yang dilakukan melalui dapur umum.

Pengertian dapur umum lebih bersifat indikatif daripada definitif. Pengertiannya tidak mirip dengan dapur sehari-hari karena kadangkala bersifat mobil dan keberadaannya dirahasiakan. Dapur umum ditempatkan di rumah-rumah penduduk. Di tempat lain dapur umum berarti nasi bungkus,di mana petugas dapur umum tinggal menjemput nasi bungkus yang telah siap ke rumah-rumah penduduk. Meskipun anggota inti dapur umum telah ditunjuk tetapi banyak dari anggota masyarakat yang melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan dapur umum. Anggotanya juga tidak terbatas pada kaum wanita saja, namun juga melibatkan kaum pria, dan tanpa batasan usia. Kebutuhan logistik dapur umum diperoleh dari masyarakat dalam berbagai bentuk sumbangan, seperti beras, lauk-pauk, sayur-mayur, kayu bakar, bahkan uang. Sumbangan secara sukarela dari masyarakat tersebut biasanya dilakukan secara bergiliran, dengan jumlah yang bebas, sesuai kemampuannya.

Dapur umum periode 1946-1949 merupakan satu bagian dari kegiatan BOM (Badan Oeroesan Makanan) yang dipimpin Ibu Ruswo dan dibantu Ibu Djojodiguno. BOM ini selain mengurusi perbekalan makanan bagi tentara juga mengurus korban perang dari medan pertempuran, serta mencari dana dan obat-obatan. Dapur umum yang dikelola Ibu Ruswo mulai bekerja sejak terjadinya peristiwa Kotabaru pada tanggal 6 dan 7 Oktober 1945. Pada Peristiwa Kotabaru, Ibu Ruswo mengerahkan para ibu dan pelajar di Kota Yogyakarta untuk membuat makanan yang kemudian dikirim ke garis depan di Kotabaru. Adapun markas dapur umum yang dikelola Ibu Ruswo berpusat di gedung Jalan Senopati. Kegiatan Ibu Ruswo dalam dapur umum dilaksanakan terus sampai Serangan Umum 1 Maret 1949.[2]

Disamping Ibu Ruswo, tokoh wanita yang berperan dalam dapur umum pada tahun 1945-1946 adalah Nyai Ahmad Dahlan. Nyai Ahmad Dahlan

[2] Suhatno, "Peranan Sub Wehrkreise 102 Pada Perang Kemerdekaan Ke II Di Kabupaten Bantul: Suatu Kajian Sejarah Lisan", dalam *Patrawidya* Vol.2 No.4 Desember. Yogyakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2001: hlm. 40.

meskipun sudah berusia lanjut dan sakit-sakitan namun selalu menganjurkan para wanita untuk mendirikan dapur umum. Dapur umum itu menyediakan perbekalan bagi para pejuang di garis depan. Takdir berkata lain, perjuangannya harus berakhir ketika beliau wafat pada tanggal 31 Mei 1946.[3]

Ketika Belanda masuk dan menduduki Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948, penduduk banyak yang panik dan mengungsi sehingga kegiatan badan ini hilang. Kemudian muncul dapur umum baru dalam satu organisasi atau lebih, tetapi tidak secara resmi dan biasanya bersifat mobil (berpindah-pindah).

Pada umumnya para ibu-ibu dan gadis-gadis tidak merasa mengadakan dapur umum karena mereka beranggapan bahwa perbutannya itu hanyalah sekedar menolong dan tidak dilakukan secara terus-menerus dan besar-besaran. Mereka memasak seperti biasa untuk makan setiap harinya dan juga mereka sendiri tidak tahu kapan pasukan akan masuk kota dan mengadakan pengacauan.

Keluarga-keluarga yang sering memberi makan pada gerilyawan sangat hati-hati sekali dalam tindakannya. Mereka takut ketahuan pihak Belanda, yang bisa mengakibatkan kesulitan apabila sampai ketahuan. Oleh karena itu penduduk selalu berhati-hati dalam memberikan bantuan dan sedapat mungkin segera melenyapkan bekas-bekasnya sebelum tentara Belanda datang.

Dapur umum di dalam kota hanya memberi makanan bagi pejuang yang bertugas di dalam kota. Sedangkan pasukan yang berada di luar kota, makanan ditanggung oleh penduduk desa di mana pasukan berada, dan biasanya dikoordinir oleh lurah-lurah setempat. Pada masa perang gerilya, dalam kota kebanyakan yang tinggal adalah kaum ibu dan anak-anak. Karena kaum muda sudah mengungsi keluar kota atau aktivitas bergerilya. Para wanita yang tinggal dalam kota juga tidak tinggal diam. Mereka mengorganisasi dapur umum untuk memenuhi kebutuhan gerilyawan yang masuk kota. Ibu Ruswo yang sejak semula telah berjuang di dapur umum, tetap melanjutkan perjuangannya bersama dengan ibu-ibu lainnya antara lain Sulianti Sulaiman, Ny. Budiharjo, dan Kurianingrat.

---

[3] Sudarmanto, J.B., *Jejak-jejak Pahlawan: Perekat Kesatuan Bangsa Indonesia*, Grasindo, 2007: hlm. 190.

Ibu Ruswo mengkoordinir ibu-ibu kampung untuk menyediakan ransum makanan bagi para pejuang dan menjadikan rumahnya sebagai dapur umum. Rumah yang menghadap ke barat terletak di gang sempit paling timur di Jalan Yudonegaran atau Jalan Ibu Ruswo, menjadi saksi kegiatan ibu-ibu memasak dan datang perginya para pejuang yang makan dan mengambil ransum makanan untuk pejuang lainnya.

Pengadaan dapur umum di dalam kota sifatnya berpindah-pindah. Selain untuk menghindari tentara Belanda juga supaya pribadi yang rumahnya dijadikan dapur umum atau orang yang mendapat tugas memasak tidak merasa keberatan. Biaya dapur umum menjadi tanggungan masing-masing penduduk yang sedang bertugas di dapur umum. Jenis makanan yang disajikan sederhana hanya sumbangan dari para tetangga dan miliknya sendiri.

Dalam mengolah makanan dilakukan pembagian tugas, ada beberapa keluarga yang hanya menanak nasi, ada yang membuat sayur, dan ada yang membuat minuman. Kesemuanya yang menjadi kewajibannya kemudian dibawa ke tempat markas pasukan atau dikumpulkan pada keluarga yang bertugas menerima makanan yang nantinya akan didistribusikan kepada para pejuang. Kadangkala kesemua hasil olahan tersebut disetorkan ke markas dapur umum yang dipimpin Ibu Ruswo.

Antar dapur umum tidak saling berhubungan. Dapur umum memasak hanya secara sukarela saja. Namun, pasukan yang berada di luar kota sering mendapat kiriman makanan dari dapur umum di dalam kota melalui kurir, palang merah, atau pasukan yang ke luar kota setelah mengadakan kekacauan di dalam kota. Makanan yang dibawa berupa lauk-pauk yang tahan lama ataupun nasi goreng yang dibungkus daun dan kertas dimasukan besek. Makanan tersebut berasal dari keluarga para pejuang yang masih tinggal di dalam kota.

A. Dapur Umum Di Sleman

1. Sleman Timur

a). Kelurahan Plataran, Kalasan

Pasukan MA yang berjuang di Kalasan berjumlah 3 pleton yaitu Peleton H1 pimpinan V.C. Sujanadi, Peleton H2 pimpinan V.C. Nawawi dan peleton Z pimpinan V.C. Slamet Herman. Peleton H1 dan H2 berkedudukan tersebar di di daerah selatan SWK, jalan Yogyakarta – Solo. Peleton Z berkedudukan di sebelah utara Jalan raya Yogya- Solo yaitu di Desa Kaliwaru, Kwadungan dan Macanan. Anggota peleton terdiri dari 4 - 5 orang yang bertempat tinggal di rumah seorang penduduk. Sedangkan markas menempati rumah penduduk yang mampu secara materi di desanya, biasanya perangkat desa. Namun, Peleton H1 pimpinan V.C. Sujanadi semua anggota menjadi satu bertempat tinggal di rumah Carik Kalurahan Selomartani yang bernama Atmodiprodjo di Desa Ngasem. Mereka tinggal menetap cukup lama di rumah tersebut. Kemudian berpindah di rumah Martopawiro di Desa Kledokan. Sedangkan pasukan dari peleton lainnya selalu berpindah-pindah dari rumah penduduk satu ke rumah penduduk lainnya. Perpindahan tempat dilakukan setelah suatu serangan selesai dilancarkan. Perpindahan rutin dimaksudkan untuk menjaga keamanan, agar tidak diketahui oleh mata-mata Belanda dan agar tidak membebani penduduk yang ditumpangi.

Pada Bulan pertama bergerilya, kebutuhan makan-minum gerilya sepenuhnya ditanggung penduduk desa yang ditumpangi. Penduduk yang mampu secara materi, di antaranya Atmodiprodjo yang rumahnya dijadikan markas dan dapur umum Peleton H1. Di rumah Atmodiprodjo, kesibukan dapur tiada berhenti, seperti orang sedang punya hajatan. Dari Pagi hari hingga malam, dapur terus berasap. Hal ini untuk berjaga-jaga jika ada pasukan gerilya lain yang singgah di rumah Atmodiprodjo. Keluarga Atmodiprodjo selalu menyuguhkan makanan ringan dan minuman hangat bahkan terkadang juga makan. Pada awalnya semua biaya untuk memberi makan dan minum para gerilya berasal dari

Atmodiprodjo sendiri. Namun, selanjutnya ada bantuan dari Pemerintah Militer Kecamatan Kalasan.

Adanya otonomi pelaksanaan Pemerintah Militer Kecamatan (PMKT), KODM bersama camat (panewu) mengatur kebutuhan supply bagi pasukan gerilya. Prodjokastowo selaku Panewu Kalasan bersama KODM berinisiatif mengumpulkan logistik dengan mengeluarkan instruksi yaitu:

- semua rakyat dipungut pajak innatura
- kalurahan mengeluarkan kas desa untuk kepentingan perang, yang pelaksanaannya ditangani oleh lurah.
- Lurah mendaftar lumbung-lumbung padi orang kaya, dipinjam untuk keperluan supply perang. Pinjaman akan diganti dari kas desa setelah selesai perang.

Usaha ini dilakukan untuk membantu mengatasi kesulitan daerah dalam menyediakan supply. Apabila supply berlimpah bisa digunakan untuk membantu daerah yang membutuhkan. Faktor kesadaran rakyat yang rela dan mau berkorban merupakan faktor kesadaran nasional yang membantu gerilya berarti membantu perang kemerdekaan.[4]

b). Kelurahan Tegaltirto, Berbah

Dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, di tingkat kecamatan Berbah telah terbentuk Pemerintahan Militer Ketjamatan (PMKT). Berdasarkan rapat tanggal 28 Desember 1948 di Jogotirto, telah disepakati struktur organisasi Pemerintahan Militer Ketjamatan Berbah sebagai berikut:

PMKt: 1.Tjamat : RW.Prodjoprasodjo
2.KODM : Lettu Iskak

[4] Proyek Penelitian Tempat Bersejarah, *Replika Sejarah Perjuangan Rakyat Yogyakarta*, Yogyakarta: Dinas Sosial, 1983: hlm.160-161.

3.Keamanan : Sastrosukarto

- Membantu polisi
- Info
- Pengawalan
- Penjagaan gedung-gedung penting
- Memberantas mata-mata
- kurir

4.Penerangan : Murtisumarto

- Memberi penerangan
- Anti propaganda musuh

5.Perlengkapan : Wiryosumarto

- Mencari, mengumpulkan dan menyimpan bahan
- Menyediakan rumah
- Menyediakan tenaga dan alat angkutan

6.Sosial : Somapawiro, dibantu oleh:

- Somaharjono : dapur umum
- Martosudihardjo : evakuasi
- Priyomartono : PPPK
- Sulaksono : Hiburan prajurit

Tugas camat dan KODM adalah memimpin dan mengkoordinasi pekerjaan para lurah. Para lurah inilah yang langsung mengatur dan memimpin rakyat. Kader desa dan dukuh dalam hirarki pemerintahan militer ada di bawah kekuasaan lurah. Guna melancarkan pekerjaan lurah dibentuk Pemerintahan Militer Kelurahan (PMKL). [5] PMKL Kelurahan Tegaltirto terdiri dari tujuh staf ditambah tiga kader desa yaitu:

1.Lurah : Sutodihardjo

2.Kabag.Sosial : Mangunsudiyo

[5] Nasution,AH., *Pokok-Pokok Gerilya dan Pertahanan RI dimasa jang lalu dan jang akan datang*. Djakarta: Bagian Penerbit Ketentaraan, 1973:hlm. 23.

3.Kabag.Umum : Amat Paridi
4.Kabag.Kemakmuran : Suratinaya
5.Kabag.Agama : Tjiptopranoto
6.Kabag.Keamanan : Padmawiyoto
7.Pembantu : Moch.Jumhuri
8.Kader Desa : Darmowalidjo
9.Kader Desa : Sadjimin
10.Kader Desa : Sumari

Adanya instruksi Perintah Harian No.009/ODM/49, dalam rangka memperkuat staf pertahanan PMKL diadakan perubahan dan penyempurnaan, sebagai berikut:

1.Ketua : Sutodihardjo
2.Wakil Ketua : Sutoyo
3.Penulis : Djojosudarmo
4.Keuangan : Sardiyono
5.Keamanan : Padmowiyoto dan Padmowiyono
6.Pertahanan : Sadali, Tjiptopranoto, dan Subagyo
7.Perlengkapan : Darmosugiyanto
8.Sosial : Puspotanoyo, selanjutnya R.Sudjadi
9.Evakuasi : Hardjosudarmo

Tugas KODM yang paling penting dalam pemerintahan militer adalah menjamin suplai logistik bagi tentara gerilya. KODM bekerjasama dengan camat mengumpulkan suplai bahan makanan bantuan rakyat berupa *innatura* dan *natura*. Keputusan hasil rapat KMKt Berbah pada tanggal 28 Desember 1948 di Jagatirta memuat perihal sebagai berikut:

1. Kelurahan diwajibkan menyetor beras 2,5 kuintal dan uang lauk-pauk Rp.1000,- untuk KODM.
2. Setiap orang dijatah 300 gr beras untuk makan dua kali, setiap jam 12 siang dan 6.30 sore. Jatah untuk KODM sebanyak 13

orang, polisi 24 orang, PMKt 10 orang, PMKl 10 orang, ditambah 3 orang kurir.

Mekanisme dan pengelolaan pungutan innatura dikerjakan sebagai berikut:

1. Pungutan innatura dikerjakan dengan baik dan jujur, dengan cara:
   a. Orang yang akan panen harus melapor kepada ketua dukuh dan menyerahkan pungutan sebesar 1/8 atau ¼ dari hasil menurut peraturan. Ketua dukuh dibantu pengawas harus mengerjakan pungutan itu dengan baik. Semua setoran seketika harus ditimbang dan dicatat dalam buku mengenai, tanggal panen, nama yang menyerahkan, nama desa, dari tanah apa, rupa tanaman, berat pendapatan kotor, pendapatan bersih, keterangan.
   b. Catatan dipisahkan antara yang menjadi kas desa dan yang disetorkan kepada pemerintah.

Suplai dan distribusi bahan makanan dapat dibagankan sebagai berikut:

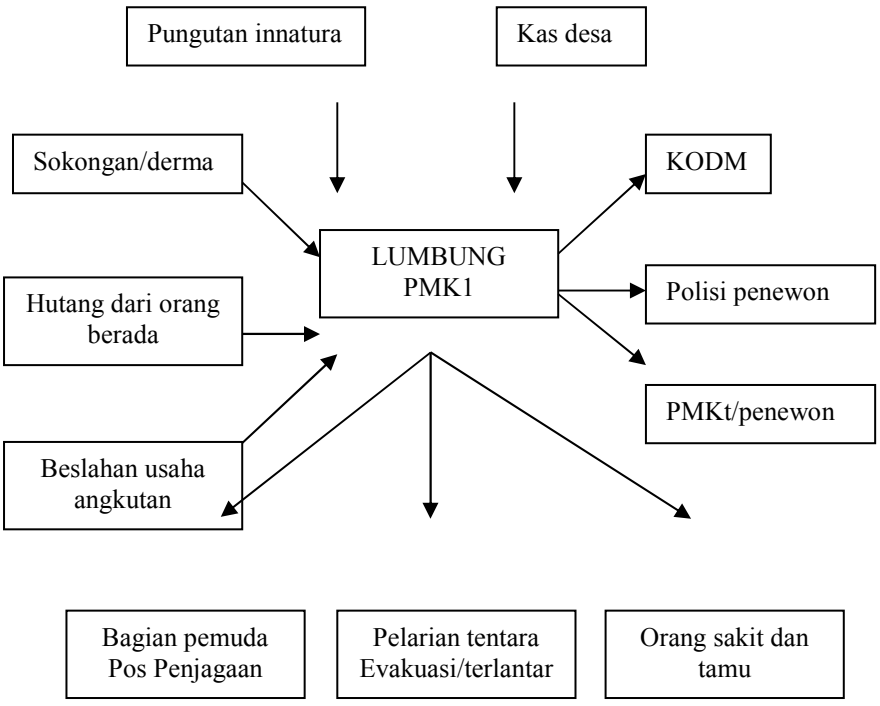

Suplai bahan makanan yang mengandalkan bantuan penduduk tidak mencukupi. Cara yang ditempuh kemudian dengan hutang pada penduduk yang kaya. Pada tanggal 20 Desember 1948, pinjam padi 12 kuintal dari Ny.Karyosentono, Sanggrahan. Namun, padi sebanyak 12 kuintal tersebut, setelah ditumbuk hanya tersisa 600 kg beras. Kemudian pinjam 10 kg beras dari kepala dukuh Pendem. Jadi terkumpul beras sebanyak 610 kg, yang digunakan untuk jaminan makan dari tanggal 20 Desember sampai 30 Desember 1948. Adapun penggunaan beras antara lain untuk menjamin makan bagi:

1. KODM, polisi, PMKt Berbah.
2. Tentara yang akan menyerbu Belanda.
3. Tentara yang istirahat setelah bergantian jaga di pos atau kelurahan.
4. Tentara pelarian dan tamu.
5. Angkatan Muda.
6. Orang sakit yang dirawat PMI.
7. Orang yang berjaga di pos penghubung.
8. Pengungsi yang terlantar.
9. Tenaga angkut korban perang.

Pada tanggal 30 Desember 1948, meminjam beras sebanyak 12 kuintal dari Ny.Brodjopawiro, Krikilan. Beras tersebut didistribusikan ke KODM sebanyak 300 kg dan Angkatan Muda sebanyak 300 kg.

Disamping hutang dalam bentuk barang, dilakukan juga hutang uang. Uang pinjaman terkumpul sebesar Rp.6375,- yang berasal dari kepala dukuh Candirejo, Jagalan, Karang Wetan, Semoyo, Sompilan, Pendem, Kuncen, Kuton, dan Lurah Sutodihardjo. Uang sebesar itu digunakan untuk: lauk-pauk KODM sebesar Rp.4000,-; membayar hutang beras pada Ny.Karyosentono sebesar Rp.1200,-; membayar dua kain tenun untuk hadiah sebesar Rp.675,-. Uang kas yang dimiliki PMKl Tegaltirto sebesar Rp.500,-. Ditambah padi panenan dari Candirejo sebanyak 625 kg.

Adapun cadangan bahan innatura atau beras yang masuk setiap bulan rata-rata 750 kg. Perkiraan pengeluaran beras setiap 10 hari sebesar 390 kg, dipergunakan untuk angkatan muda, tentara yang sedang berjuang, pengungsi terlantar, orang sakit, korban, KODM, biaya rapat, administrasi, dan tamu resmi.

c). Kelurahan Maguwoharjo

Pada tanggal 12 Februari 1949, Staf Pemerintahan Militer Sleman Timur dan Tengah mengeluarkan Peraturan Kebaktian Rakyat yang ditandatangani Komandan SWK 104 Mayor Sukasno, Bupati Sleman Projodiningrat dan Komandan KDM Mayor Muhammad Basyuni. Menindaklanjuti peraturan tersebut, Panewu Depok, Projosuyoto memerintahkan lurah untuk menjamin makanan bagi para pegawai isntansi pemerintah dan badan-badan yang diakui pemerintah, misalnya: tentara, polisi, pamong praja, dalam mendukung keberlangsungan perjuangan.

Pihak Kelurahan Maguwoharjo kemudian memerintahkan seluruh pegawai kelurahan dibawah pimpinan Kepala Bagian Kemakmuran, Mitro Darsono untuk memungut uang atau hasil bumi dari penduduk. Mengenai besaran pungutan minimal 5% dan maksimal 25% dari penghasilannya. Hal ini berlaku bagi semua penduduk, baik petani, pedagang, tukang, dan sebagainya. Di samping itu penduduk dipungut bantuan sukarela untuk dana perjuangan. Pungutan berupa hasil bumi dinamakan pajak in natura. Pungutan berupa bahan makanan diberikan kepada dapur umum. Ada beberapa penduduk dengan kesadaran sendiri menyerahkan hasil panenannya berupa beras, jagung, ketela, kelapa, pisang, dan lainnya untuk membantu perjuangan. Pihak kelurahan di samping menjamin gerilyawan di wilayahnya, berkenan membantu pejuang lainnya. Pada dukuh secara bergantian seminggu sekali sambil membawa dagangan dengan gerobak memuat kira-kira 500 *nuk*. *Nuk* tersebut diangkut ke kota.

Makanan tersebut diserahkan kepada gerilyawan di kota yang menyamar sebagai pedagang di Jalan Gejayan (sekitar Kecamatan Depok). [6]

d). Kelurahan Madurejo

Para wanita desa bekerja untuk menjamin pasukan gerilya. Kegiatan dapur umum diselenggarakan di rumah Martorejo, selaku Kepala Bagian Kemakmuran. Istri Martorejo merupakan penangung jawab dapur umumnya. Ny.Pademodihardjo diserahi tugas berbelanja ke pasar. Petugas yang memasak adalah Ny.Martorejo, Ny.Atmorejo, Ny.Siskartubi dan Ny.Pademodihardjo. Adapun yang mengantar makanan ke pos pasukan gerilya dilakukan oleh Djojoredjo, Djojowinoto, dan Untung. Ketiga orang pengantar makanan ketika melakukan tugasnya dengan menyamar sebagai seorang wanita (berpakaian wanita dan membawa payung).

Sejak kedatangan Belanda sampai Januari 1949 di Kelurahan Madurejo, jaminan logistik bagi para pejuang sudah tercukupi oleh stok bahan makanan yang ada di lumbung kelurahan. Lumbung padi kelurahan memiliki stok padi sebanyak 250 kuintal. Stok gula pasir ada beberapa kuintal. Gula pasir berasal dari Pabrik Gula Tanjung Tirto. Gula pasir tersebut sebenarnya milik KODM Prambanan yang dititipkan ke kelurahan. Namun kemudian penggunaannya diserahkan kepada pamong kelurahan untuk keperluan perjuangan.

Padi di lumbung habis, pamong kelurahan mengusahakan bahan makanan dengan cara meminjam kepada penduduk. Pinjaman bahan makanan kepada penduduk, dikoordinasi oleh kepala dukuh masing-masing. Bahan makanana berupa beras, jagung, ketela, bekatul, dan lainnya berhasil dikumpulkan. Pinjaman belum bisa dikembalikan, hutang kepada penduduk semakin hari terus menumpuk. Para pamong kelurahan sepakat menumpuh cara lain, dengan mewajibkan penduduk menyerahkan *nuk* yang dikumpulkan ke kepala dukuh masing-masing.

[6] Hardjowidjono, Dharmono., *Replika Sejarah Perjuangan Rakyat Jilid II*, Yogyakarta: Dinas Sosial, 1984/1985: hlm.595.

Lurah berharap setiap pedukuhan, penduduknya dapat mengumpulkan minimal 50 bungkus *nuk* per hari secara bergiliran. Setiap keluarga tiga hari sekali menyetorkan satu bungkus *nuk*. Keluarga yang mampu ada yang menyetorkan lima sampai sepuluh bungkus *nuk*. Penduduk miskin yang tidak mampu menyediakan nasi, dalam usahanya ikut berpartisipasi membuat *nuk* dari bahan jagung, bekatul, gaplek atau campuran. Cara demikian mampu mengatasi penyediaan *nuk* bagi gerilyawan sampai Agresi Belanda II berakhir.[7]

2. Sleman Tengah

a). Pedukuhan Srowolan, Kelurahan Purwobinangun, Kapanewon Ngaglik

Kelurahan Purwobinangun termasuk dalam wilayah Kapanewon Ngaglik, adanya Peraturan Kebaktian Rakyat, panewu Ngaglik memerintahkan lurah menjamin logistik bagi para pejuang. Adanya instruksi dari panewu Ngaglik tersebut, Susilo Winarto selaku Lurah Purwobinangun segera melakukan tugasnya. Susilo Winarto memerintahkan Sosrowiharjo selaku Kepala Bagian Kemakmuran untuk memimpin tugas supply dengan dibantu oleh Abdul Jabar selaku Kepala Bagian Keamanan, Wasito Diarjo selaku Kepala Bagian Umum, Tondo Martoyo selaku Kepala Bagian Agama dan mantan mandor pasar, dan 16 kepala dukuh. Keenam belas dukuh tersebut membawahi pedukuhan Turgo, Ngepring, Kemiri, Sembung, Kadilobo, Karanggeneng, Srowolan dan Gateb menjadi satu pedukuhan, Kardangan, Bunden, Beneran, Jamblangan, Watuadeg, Ngringin, Patra, Candi, dan Ngelo.

Penduduk wilayah Kelurahan Purwobinangun dipungut uang ataupun hasil bumi. Kisaran besaran pungutan antara 5% sampai 25% dari hasil yang diperoleh. Besarnya pungutan ini dikenakan kepada semua penduduk dari beragam profesi, baik pedagang, petani, tukang, dan sebagainya. Selain itu penduduk juga dipungut sumbangan sukarela.

[7] *Ibid.,* hlm.613.

Pungutan ini dikoordinir para dukuh masing-masing yang nantinya disetorkan ke dapur umum.

Kelurahan Purwobinangun membentuk suatu organisasi pertahanan yang dinamakan Markas Pertahanan Kelurahan (MPK). Tugas Markas Pertahanan Kelurahan di samping berkaitan dengan keamanan juga menunjang kehidupan tentara gerilya dengan melakukan penarikan pajak innatura kepada bakul-bakul yang berjualan di pasar di sekitar wilayah itu.

Markas tentara Belanda di Sleman Tengah, yang berada di sebelah utara Jalan Yogyakarta – magelang berada di bekas pabrik gula Beran, Cebongan, Medari, dan di Pasar Tempel. Sedangkan yang berada di Jalan Yogyakarta – Kaliurang, markas tentara Belanda berada di Kledokan, RS.Lali Jiwa, Pakem, dan Kaliurang. Pasukan Belanda seringkali melakukan konvoi untuk melakukan pembersihan dan penyerangan. Hal ini mengakibatkan pasar-pasar yang terletak di sepanjang jalan yang sering dilalui konvoi pasukan Belanda menjadi sepi. Pasar Pakem sebagai induk Pasar Srowolan menjadi sepi. Pasar Srowolan yang letaknya tersembunyi, dikelilingi pedukuhan lainnya, selain itu jauh dari jalan utama Magelang-Yogyakarta dan Kaliurang-Yogyakarta merupakan tempat yang dirasa aman untuk melakukan perdagangan. Pasar Srowolan menjadi tempat aktivitas pedagang dari keempat pasar yaitu Sleman, Turi, Tempel, dan Pakem. Pasar Srowolan menjadi ramai sehingga mandor Pasar Pakem melakukan tugasnya di Srowolan. Pasar Srowolan dikatakan sebagai tempat perekonomian masyarakat Yogya Utara.

Pasar Srowolan menjadi tempat untuk membeli segala kebutuhan, baik bahan makanan maupun kebutuhan lainnya. Para pedagang dari kota biasanya membawa barang dagangan berupa: sabun, rokok, garam, gula pasir, dan barang lainnya yang sulit ditemukan di Srowolan. Pedagang yang berasal dari sekitar pasar membawa kebutuhan pokok, sayuran, dan buah-buahan. Pasar Srowolan secara tidak langsung memberi kemudahan bagi dapur umum untuk mendapatkan segala kebutuhan pangan dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk menjamin para pejuang.

Pasar Srowolan menjadi tempat sumber pencarian dana bagi pengelola dapur umum. Untuk menambah dana perjuangan dilakukan juga penambahan pajak pasar yang dilakukan di tiap pasaran. Penarikan uang kebersihan, sebagian digunakan untuk gaji petugas kebersihan, sebagian lainnya untuk dana perjuangan. Di samping penambahan pajak di loket pada waktu hari pasaran. Di perempatan jalan yang dilalui para pedagang maupun pembeli yang akan ke pasar ditempatkan wadah sebagai tempat untuk menampung uang sumbangan. Pengunjung yang akan ke pasar secara sukarela memberikan sumbangan uang semampunya ke dalam wadah yang telah disediakan. Di dalam pasar, ketiga para pedagang sedang menggelar dagangan juga berpartisipasi memberikan sumbangan sebagian dagangannya. Para pedagang secara sukarela memasukkan sebagian hasil dagangannya ketika para pemuda-pemudi menyodorkan tenggok (bakul) sebagai tempatnya. Secara tidak langsung para pedagang juga memberikan bantuan melalui Bank Pertahanan. Pedagang meminjam uang di Bank Pertahanan dan bunga bank tersebut sebagian masuk ke kas bank sebagian yang lain untuk dana perjuangan. Kesemua pungutan yang didapat dari Pasar Srowolan kemudian disetorkan kepada Letnan R.Suyono yang berkedudukan di Karanggeneng. Letnan R.Suyono yang mengatur dana yang terkumpul dan pengeluarannya, untuk memperlancar perjuangan. Dari dana yang terkumpul sebagian untuk dana perjuangan dan sebagian lainnya disetorkan ke kas pemerintah daerah.

Foto 1.Pasar Srowolan Tempat Mencari Suplai Bahan Makanan

b). Kelurahan Pendowoharjo (Brayut)

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, perjuangan di Pedukuhan Brayut dimotori oleh kelompok Merah Putih pimpinan Supardjo Suryo. Keberadaan kelompok perjuangan merupakan spontanitas masyarakat setempat. Sifatnya yang yang hanya spontan mengakibatkan belum ada struktur kepengurusan yang jelas dan belum ada program atau target yang pasti dan menentu. Kelompok Merah Putih tugasnya melucuti senjata tentara Jepang. Sifatnya yang spontan mengakibatkan kelompok ini hanya bertahan selama tiga bulan. Bubarnya kelompok Merah Putih bukanlah akhir dari perjuangan. Perjuangan pemuda Brayut disalurkan melalui wadah perjuangan yang ada, di antaranya Barisan Pemberontak Republik Indonesia Cabang Sleman, Tentara Republik Indonesia, dan Polisi Pamong Praja.

Pada tanggal 20 Desember 1948, Belanda tiba di Beran. Tentara Belanda berhasil menduduki bekas pabrik gula Beran yang kemudian

dijadikan markasnya. Penduduk Beran yang mengungsi, ada yang membentuk kelompok perjuangan. Jumlah kelompok pejuang Beran ada 21 orang, dipimpin langsung oleh Kepala Dukuh Beran bernama Bakir dengan bantuan Sriyono. Dalam aktivitasnya, pejuang Beran mendapat bantuan empat kuintal beras dari pemerintah kalurahan Tridadi. Pada bulan Maret 1949, pejuang Beran mengalami kesulitan dalam persediaan pangan. Bakir dan Sriyono berinisiatif mencari bantuan ke Pedukuhan Brayut menemui Supardjo Surjo. Supardjo Surjo dan Sugijopranoto selaku lurah pandowohardjo bersedia menjamin kebutuhan pangan pejuang Beran.

Supardjo Surjo tidak hanya memberikan bantuan pangan saja tetapi menghimpun pemuda Brayut untuk turut serta berjuang bersama pejuang Beran. Pemuda Brayut yang menyatakan diri bergabung berjuang ada 21 orang. Akhirnya dari pejuang Beran dan pemuda Brayut bergabung menjadi kelompok Persatuan Beran-Brayut. Kelompok pejuang ini diketuai Supardjo Surjo dan Bakir sebagai wakilnya. Bakir yang bertanggung jawab dalam aksinya di medan pertempuran. Supardjo Surjo yang bertanggung jawab untuk mengadakan kontak dengan kesatuan lain dan pengadaan bahan pangan bagi anak buahnya. Supardjo Surjo bekerjasama dengan Sugijopranoto, kakaknya, yang menjabat lurah Pandowoharjo dalam menggalang bantuan pangan. Atas seijin lurah Pandowoharjo, Persatuan Beran-Brayut dapat memanfaatkan segala potensi yang di Kalurahan Pandowoharjo. Setiap kali, Persatuan Beran-Brayut akan memasuki pedukuhan yang ada di Kalurahan Pandowoharjo, sebelumnya mengirimkan surat kepada kepala dukuh setempat. Surat berisi permohonan disediakan bahan makanan untuk sejumlah orang tertentu. Bahan makanan bisa diambilkan dari kekayaan kelurahan yang tersimpan di pedukuhan setempat.

c). Pedukuhan Ngetiran, Kelurahan Sariharjo, Kapanewon Ngaglik

Tentara Pelajar dalam perjuangannya, pada tanggal 25 Mei 1949 sampai di Pedukuhan Ngetiran. Pedukuhan Ngetiran menjadi tempat persinggahan tentara gerilya sejak beberapa minggu setelah Agresi Belanda II sampai bulan Mei 1949, yang selalu menyediakan makanan bagi mereka. Situasi ini merupakan beban yang tidak ringan bagi penduduk setempat. Pedukuhan Ngetiran merupakan daerah yang cukup subur, namun ketersediaan bahan pangan menipis untuk makan puluhan prajurit dalam jangka waktu 4-5 bulan. Kondisi tersebut ditanggulangi dengan meminta bantuan bahan makanan kepada Haji Harun. Cara lain yang ditempuh dalam pencarian dana dengan meminta bantuan setiap pedagang yang akan pergi ke pasar untuk memberikan sebagian bawaannya.

d). Kelurahan Sendangadi

Pedukuhan di Kelurahan Sendangadi menjadi tempat singgah para gerilyawan yang akan dan pulang dari menyerang musuh. Pihak pamong desa dan penduduk secara sukarela menyediakan makanan bagi gerilyawan. Jumlah gerilyawan yang sekali singgah sejumlah 50-100 orang. Pada bulan pertama sampai ketiga, penduduk masih mampu menyediakan makanan bagi gerilyawan. Namun, pada bulan keempat, pihak pamong desa mengkoordinasikan bantuan makan dari penduduk yang mampu dan meminta bantuan dari ODM. Penduduk yang dipandang mampu, antara lain: Karyodimejo, Somoharjo, Somo, Marso, dan Karyopawiro. Bantuan yang dimintakan dari kelima penduduk tersebut berupa beras, gula, tembakau, dan lembu. Bantuan yang didapat berupa 1 kuintal tembakau dan lembu 5 ekor. Bantuan dari ODM berupa beras 1 kuintal. [8]

[8] *Ibid*., hlm.553.

e). Pedukuhan Tanjung, Kelurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik

Foto 2. Joglo Tanjung Sebagai Dapur Umum

Detasemen III Brigade 17 di bawah pimpinan dan komando Kapten Martono yang terkenal sebagai Tentara Pelajar dalam melakukan perjuangannya selalu berpindah-pindah. Perpindahan dari satu pedukuhan ke pedukuhan lainnya untuk menghindarkan dari hal yang tidak menguntungkan. Pedukuhan yang pernah dijadikan markas Tentara Pelajar di Kalurahan Donoharjo adalah Tanjung, Balong, dan Gondanglutung. Pedukuhan Tanjung yang digunakan sebagai markas pertahanan Tentara Pelajar secara otomatis bertugas menyediakan makan bagi para pejuang. Salah satu rumah yang pernah dijadikan sebagai dapur umum untuk menyediakan makanan adalah rumah milik keluarga Notosukarjo. Di bawah pimpinan ibu telah diselenggarakan kegiatan memasak oleh para wanita di Kalurahan Tanjung untuk menjamin anggota Tentara Pelajar.

3. Sleman Barat

a). Pedukuhan Tlogo, Kelurahan Gamping

Dapur umum di Tlogo menempati rumah Mulyo Sugondo. Koordinator dapur umum dipegang istri Mulyo Sugondo. Mulyo Sugondo mencari bantuan penduduk wanita di desanya untuk membantu memasak. Ada lima sampai enam orang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab mengenai kegiatan keseharian dapur umum. Mereka bertugas menunggu perbekalan beras yang ada di dapur umum. Di samping itu juga menentukan apa saja yang akan dimasak dan memberikan uang untuk belanja.[9]

b). Kelurahan Sendangagung, Kecamatan Minggir

Sejak berlangsungnya Agresi Belanda II, di Pedukuhan Pojok, Kelurahan Sendangagung dijadikan markas bermacam-macam pasukan antara lain:

- Pasukan KRIS/Brigade XVI yang dipimpin Maulana Lapar, Sumilat Pelupesi, dan Kendangan dengan jumlah pasukan sekitar satu kompi.
- Pasukan Barisan Sakit Hati pimpinan Kahar Muzakar dan Corie (istri Kahar Muzakar) yang berjumlah satu batalyon.
- Pasukan dari Kepolisian yang dipimpin Jenderal Mohammad Suryopranoto dan stafnya yaitu: Sosrodanukusumo, Subarkah, Sutarto, Sunaryo, Subagyo, Wiyono, Subekti, Sukirman, Herusumardi, Amirin, Pagiyo, Susardi, Sunaryo, dan Hasan.

[9] Proyek Penelitian Tempat Bersejarah, *Op.Cit*., 1983: hlm.199.

Pasukan KRIS/Brigade XVI dan Pasukan Barisan Sakit Hati selama bergerilya bermarkas di Pedukuhan Pojok, Kelurahan Sendangagung. Adapun rumah penduduk yang ditempati para gerilyawan pembagiannya sebagai berikut:

- Rumah R.Siswosumarto, selain sebagai markas juga tempat tinggal Maulana, Kendangin, dan Kahar Muzakar.
- Rumah Martosaparjo dipergunakan sebagai kantor Brigade XVI.
- Rumah R.Harjosubroto

Mohammad Suryopranoto disamping bergerilya juga membuka pendidikan siswa calon polisi di Pedukuhan Nanggulan, Kelurahan Sendangagung yang berlangsung sampai penyerahan kedaulatan RI. Sekolah Polisi Negara menerima dan menampung 470 siswa melalui pendaftaran. Adapun mengenai pendanaan dari pendidikan tersebut berasal dari tujuh kecamatan di wilayah Sleman Barat. Semua siswa SPN tersebut tinggal di asrama yang ditempatkan di rumah-rumah penduduk. Adapun rumah penduduk yang dijadikan asrama menempati rumah Surokaryo, Kartorejo, Wongsodimejo, Tomoijoyo, Wongsoikromo, Kariyodinomo, Pawirodikromo, Harjodinomo, Kasanraji, Brojoseco, Sukapsir, dan Martodinomo. Rumah Harjosumarto dipergunakan sebagai tempat pendidikan (sekolah darurat). Selama pendidikan, siswa memperoleh makanan, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dipusatkan di rumah Harjosuwito. Tenaga untuk kebutuhan dapur umum direkrutdari para istri pemilik rumah yang ditempati para siswa Sekolah Polisi Negara. Penduduk yang rumahnya ditempati untuk pendidikan mendapat imbalan berupa beras dari pengelola SPN.

B. Dapur Umum Di Bantul

Kabupaten Bantul terletak di sebelah selatan Kota Yogyakarta. Jarak Kota Yogyakarta sampai Kota Bantul kurang lebih 10 km. Wilayah Kabupaten Bantul sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia, sebelah utara dibatasi oleh Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo. Di antara Kabupaten Bantul dan Kulon Progo terdapat sungai yang cukup besar yaitu Sungai Progo dan Opak. Kabupaten Bantul terdiri dari 18 kecamatan, 70 kelurahan.

Luas Kabupaten Bantul lebih kurang 459.320 Ha, terdiri atas tanag dataran yang subur dan tanah pegunungan yang kurang subur. Sebagian besar tanah dataran terdiri atas tanah-tanah persawahan desa-desa serta jalan raya. Jalan raya dan jalan kereta api yang ada di Kabupaten Bantul mempunyai peranan yang sangat penting terutamadalam bidang perhubungan. Antara kota kecamatan yang satu dengan yang lain dapat ditempuh melalui jalan raya. Alat transportasi yang lain adalah kereta api, meskipun hanya terdapat di sepanjang jalan Yogyakarta – Bantul sampai Palbapang.

Apabila dilihat dari segi kemiliteran, Kabupaten Bantul kurang menguntungkan. Hal ini disebabkan tanah di wilayah Kabupaten Bantul sebagaian besar datar. Meskipun demikian ada beberapa kelurahan dan pedukuhan di Kabupaten Bantul yang tanahnya berupa perbukitan antara lain: Pajimatan, Selopamioro Kecamatan Imogiri, Segoroyoso Kecamatan Pleret, dan Bibis Kecamatan Kasihan.

Penduduk Kabupaten Bantul bermatapencaharian sebagai petani, buruh, pedagang, dan pegawai. Sejak tahun 1930, Kabupaten Bantul tercatat sebagai

1). Kelurahan Segoroyoso

Sejak tanggal 19 Desember 1948 saat terjadinya serangan Agresi Belanda II, dan sesudah dikeluarkannya perintah kilat Panglima Besar Sudirman No.1/PB/D/48, tanggal 19 Desember 1948 jam 08.00 pagi, ternyata sore harinya di Desa Segoroyoso sudah mulai banyak berdatangan prajurit-prajurit angkatan perang RI dan menempati rumah penduduk di sekitar Segoroyoso.

Dipilihnya Segoroyoso menjadi markas komando karena mempunyai faktor yang menguntungkan. Secara geografis, Segoroyoso berada di seberang Kali Opak, yang pada waktu itu belum ada jembatan dan masih berupa jalan setapak. Kondisi ini menjadikan sulit untuk diketahui dan dicapai musuh. Segoroyoso merupakan daerah subur, banyak ditumbuhi pepohonan yang menghasilkan buah. Kesemuanya dapat menunjang stok perbekalan pejuang.

Dapur umum menempati beberapa rumah penduduk, yang pengaturannya dibawah pimpinan Lurah Segoroyoso dan sekaligus pusat dari dapur umum. Guna mencukupi kebutuhan perbekalan para pejuang, Lurah Segoroyoso memerintahkan agar para pamong mencari bantuan dari penduduk desa sekitar. Para pamong desa mendapatkan bagian tugas masing-masing, ada mencari bahan makanan, bahan bakar, dan bahan kebutuhan lainnya. Ada pula yang bertugas membantu memasak di dapur atau pun mengantarkan jatah makan ke garis depan.

Pamong desa dalam hal ini kabayan, dalam mendapatkan bahan makanan, setiap hari pergi ke pasar dengan membawa karung sebagai tempat untuk menampung hasilnya. Para kebayan mengitari pasar dengan membawa karung, para pedagang dengan sendirinya memberikan sebagaian dagangannya ke dalam karung. Ada juga pedagang yang memberi uang. Beras diperoleh dari setoran penduduk desa, yang kadangkala masih ditambahi sayuran hasil kebun sendiri. Bahan bakar didapatkan dengan cara mengerahkan pata tawanan kampung untuk

membantu mencari kayu bakar. Kayu diambil dari hutan dan di sekitar pabrik gula.

Bahan makanan dimasak oleh pamong desa, ibu-ibu, dan remaja putri di sekitar lokasi dapur umum. Makanan yang dihasilkan kemudian dibungkus daun pisang. Makanan bungkus daun tersebut kemudian didistribusikan ke pos garis depan atau ke tempat para pejuang berada dengan cara dimasukan kedalam keranjang atau tenggok. Namun, sebagian hasil masakan tersebut ada yang didistribusikan ke rumah lurah sebagai markas pusat dapur umum.

Dalam kondisi biasa, jumlah nasi nuk yang dibuat kurang lebih untuk 300 prajurit. Hal ini cukup dilayani dari dapur umum di markas pusat rumah lurah. Namun, terkadang karena kembali dari penyerangan atau pada waktu menghindari musuh, jumlah prajurit bertambah sampai 500 orang. Dapur umum di rumah lurah tidak mencukupi sehingga perlu penambahan dapur umum lagi.

Ada penambahan empat dapur umum di Segoroyoso yaitu di rumah sosial dan di rumah penduduk yang memungkinkan serta letaknya tidak jauh dari markas pusat dan dapur umum pusat. Kesemua dapur umum yang mengkoordinir lurah desa. Suplai makanan setiap harinya dalam keadaan biasa memerlukan kurang lebih 60 kilogram beras dan sayuran seadanya. Dalam keadaan ada penambahan prajurit diperlukan 90 sampai 100 kilogram beras dengan lauk seadanya. Kadangkala penduduk yang panen ketela dan jagung, menyumbangkan ketela pohon dan jagung untuk direbus sebagai camilan. Atmopriyono, salah seorang kebayan di Segoroyoso, mengatakan selama tiga lapan atau tiga bulan lebih, pra prajurit berada di Segoroyoso, dapur umum tidak kekurangan bahan makanan dan tenaga memasak dan mengantar makanan.

Pada akhir Desember 1948, pasukan gerilya yang datang ke Segoroyoso semakin banyak. Atmopriyono yang bertanggung-jawab menangani dapur umum gagasan untuk mengatasi keterbatasan dana. Atmopriyono mencari sumber pemasukan dengan mengerahkan para jagal

yang ada di segoroyoso. Segoroyoso yang cukup banyak berprofesi menjadi jagal kerbau, sapi, dan kuda secara turun-temurun untuk membantu supply lauk bagi dapur umum di situ. Perekrutan jagal dengan cara, semua jagal harus melaporkan diri ke kalurahan. Ada 5 jagal yang ada di segoroyoso. Kesepakatan antara Atmopriyono dan Lurah Gardoutomo, semua jagal setiap menyembelih satu hewan diharuskan setor 3 kg daging. Daging disetorkan ke dapur umum untuk mencukupi kebutuhan lauk-pauk. Dapur umum mengolah daging untuk lauk nasi nuk (bungkus), meskipun terkadang pendampingnya bukan nasi, tetapi thiwul.

Markas Tentara di Segoroyoso

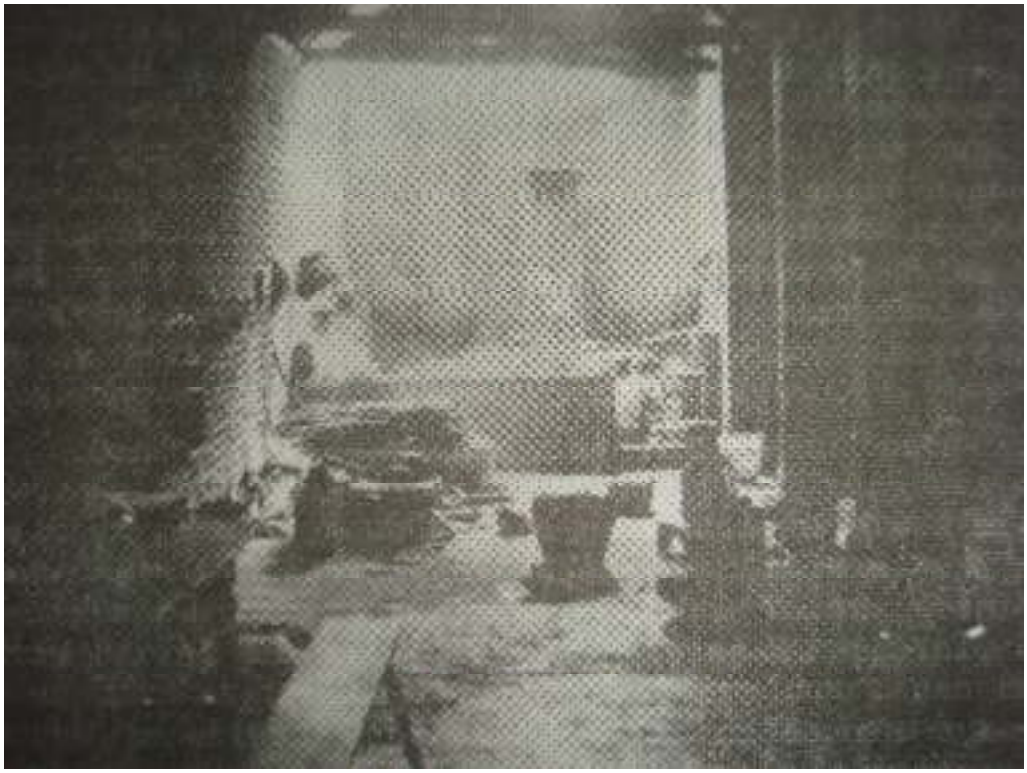

Foto 3. Ruangan Yang Dahulu Menjadi Tempat Memasak Dapur Umum

2). Kelurahan Bangunjiwo (Bibis)

Letak Bibis yang berbukit-bukit dan lahannya subur menjadikan Bibis potensial untuk dijadikan markas. Rumah kepala dukuh atau kebayan dipakai sebagai markas utamanya. Atas inisiatif kebayan setempat, dibuatlah dapur umum untuk membantu pejuang gerilya. Meskipun sebelum ada koordinasi dari kebayan, rakyat sudah dengan sukarela memberi makan apa saja yang dipunyai kepada para pejuang.

Makanan yang diberikan kepada para pejuang berupa beras dicampur dengan jagung dengan lauk seadanya. Sayur mayur didapat dari sumbangan penduduk Desa Bibis dan sekitarnya. Daging, baik kambing maupun sapi didatangkan dari Wonosari, atau Gunungkidul setiap minggu. Kebutuhan kayu bakar dan minyak tanah didatangkan dari daerah sekitar Desa Bibis.

Jatah makan bagi para pejuang diberikan dua kali sehari. Sekali makan menghabiskan beras 25 kilogram untuk 120 orang. Keterbatasan beras ditanggunglangi dengan menggunakan ubi dan nasi jagung. Sayur kluwih, terong, kacang, gori, urap, dan kadangkala daging menjadi contoh menu bagi para pejuang. Variasi makanan dan bantuan rakyat menjadikan dapur umum tidak pernah kehabisan bahan makanan.

Dapur umum dikerjakan oleh sebagian tentara dari bidang logistik, yang dibantu penduduk baik laki-laki maupun perempuan. Sebagai kepala bagian dapur umum dipegang oleh seorang pejuang, sedang dalam operasionalnya diketuai oleh kebayan. Setiap hari, kebayan mendapat uang belanja dari pihak tentara sebesar Rp.4000,- (empat ribu rupiah), untuk mencukupi kebutuhan dapur umum yang tidak bisa didapatkan dari sumbangan rakyat, misalnya minyak tanah, gula pasir, dan sebagainya.

Kerepotan terjadi di dapur umum, jika pada malam hari, markas kedatangan tamu komandan tempur sektor yang akan memberikan laporan harian yang disertai para pengawal. Mereka langsung ke dapur untuk minta makan sehingga jatah makan harus ditambah. Kebayan terpaksa mencari tambahan makanan dari rumah-rumah penduduk, seperti jagung, ubi, ketela atau apa saja yang dapat dimakan.

Kedatangan tentara pejuang disambut sukacita oleh penduduk Bibis. Rumah kepala Dukuh dipilih sebagai markas atau pos komando karena alasan strategis dan keamanan. Dari pos komando, tentara disebar ke rumah penduduk yang dipertimbangan menurut besarnya rumah, keamanan, kekayaan, dan tempat yang strategis, sesuai dengan instruksi kepala Dukuh. Rakyat yang rumahnya ditempati tentara secara obyektif tentu mendapat beban tambahan, meskipun mereka kurang merasakan atau setidak-tidaknya tidak mau menyatakan demikian.[10] Rakyat yang rumahnya tidak ditempati tentara yang secara ekonomi kurang daripada

[10] Adisusilo, J., "Rakyat dan Tentara di Bibis Tahun 1949: Suatu Penelitian Pendahuluan Tentang Hubungan Rakyat dan Tentara Luar Kota Yogyakarta Pada Zaman Revolusi Fisik", *Seminar Sejarah Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. 1981:hlm.6.

yang rumahnya ditempati tentara, merasakan sumbangan yang sifatnya suka rela tetap sebagai sesuatu yang memberatkan.

Tentara pejuanga tinggal di Bibis antara 3 sampai 10 bulan, semenjak 16 februari 1949 sampai 27 Juni 1949, desa ini sebagai markas komando militer pimpinan Letkol Suharto.[11] Menurut J.Adisusilo (1981:4), jumlah tentara yang tinggal di Bibis ada sekitar 600 orang yang terbagi dalam 25 sampai 40 rumah penduduk. Jadi setiap rumah menampung 15 sampai 24 orang tentara, ditambah dengan anggota keluarga. Kondisi ini dirasa cukup berat bagi pemilik rumah apabila diwajibkan memcukupi kebutuhan makan dan minum. Pemerintah sipil dan militer dengan inisiatif kepala dukuh membuat dapur umum. Pemilik rumah yang ditempati tidak menanggung beban rangsum bagi tentara yang tinggal bersamanya. Namun, mereka harus membantu dengan memberi sumbangan wajib berupa beras, sayuran, kayu bakar, minyak tanah, kelapa, dan tenaga.

Kedatangan pasukan gerilya ke Bibis bersamaan dengan saat panen jagung. Kebayan memerintahkan warganya agar menyisihkan sebagian hasil panennya. Setiap keluarga menyisihkan 30 batang jagung untuk membantu perbekalan bagi gerilyawan. Hal ini cukup menguntungkan karena jagung bisa menjadi asupan karbohidrat alternatif di luar beras. Beras pada waktu itu tidak mencukupi untuk memenuhi jumlah tentara yang jumlahnya banyak dan dalam waktu yang lama. Rangsum yang diberikan kepada para tentara berupa nasi campur jagung, lauk-paun, dan sayur-mayur. Tentara mendapat rangsum sehari dua kali pada pagi dan sore hari. Bahan berupa sayuran diperoleh dari penduduk Bibis, sedangkan lauk-pauk berupa daging setiap seminggu sekali didatangkan dari Wonosari.

---

[11] *Ibid*., 1981:hlm.7., dan Soetomo Mangkusasmito, *Latar Belakang Historis Pembangunan Monumen Perjuangan di Bibis*. Yogyakarta: Pemerintah Daerah Tingkat II Bantul. 1977: hlm.6.

Menurut Hisbaron Muryantoro (1980:11), beras yang dimasak di dapur umum sebanyak 23 kilogram beras di pagi hari dan 25 kilogram di sore hari. Pada awalnya kebutuhan bahan pokok bisa teratasi dari daerah Bibis saja, namun lama kelamaan menjadi berat sehingga perlu dukungan dari daerah sekitarnya. Kemudian dibuatlah beberapa dapur umum di sekitar Bibis. Jumlah dapur umum menjadi enam yaitu Bibis, Jipangan, dua tempat di Kalipucang, Bandung, dan Talkondo. Keuntungan lain dengan adanya persebaran dapur umum dalam lingkup kecil dan terbatas memudahkan dalam pengurusan. Disamping itu juga untuk alasan keamanan, apabila ada salah satu dapur umum yang diserang Belanda, dapur umum lainnya dapat tetap berfungsi.

Dari keenam dapur umum tersebut, empat di antaranya mempunyai perbedaan fungsi, bentuk, dan sumber bahan makanannya. Dapur umum di Bibis menempati rumah Kepala Dukuh Bibis, Harjowiyadi. Bahan mentah didapat dengan mengerahkan bantuan penduduk, setiap kepala keluarga diminta sumbangan beras antara 20 sampai 50 kilogram. Disamping itu yang sedang panen jagung untuk menyumbangan lima *gedeng* jagung (satu *gedeng* ada 30 batang jagung). [12] Bantuan lain yang sifatnya sukarela dari rakyat adalah sayur-mayur dan kayu bakar, bahkan ada yang memberi ternak dan unggas sebagai lauk. Sumber dana lain, dari pemerintahan militer, lewat wehrkreise mendapat uang 40.000 ORI atau lebih tergantung kebutuhan. Pemerintahan militer mempunyai sumber keuangan berupa uang satu karung, candu 15 peti dan kayu jati. Candu dan kayu jati bisa dijual untuk keperluan dapur umum. [13]

Pengelolaan dapur umum setiap harinya ditangani oleh istri Kepala Dukuh Bibis dengan dibantu warga di situ. Penduduk Bibis yang membantu di dapur ada enam orang, dua orang janda sebagai pembantu

[12] Muryantoro, Hisbaron, "Peranan Sub Wehrkreise 106 Pada Masa Perang Kemerdekaan II di Kabupaten Kulon Progo: Suatu Kajian Sejarah Lisan", dalam *Patrawidya* Vol.4 No..3, September. Yogyakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. 1980: hlm.16.

[13] Adisusilo, *Op.Cit*.,1981: hlm.11.

tetap dan empat orang lainnya pembantu tidak tetap yang terdiri dari dua pria dan dua wanita. Makanan hasil pengolahan di dapur umum ini kemudian dibagi dua, satu bagian untuk staf petugas radio di Bengen yang berjumlah 12 orang dan sebagian lagi untuk tentara yang ada di Bibis dan sekitarnya yang berjumlah 125 orang. Menu yang dihidangkan tergantung bahan yang tersedia, terkadang ubi dengan sayuran, nasi jagung dengan sayuran, atau nasi beras dengan sayuran, terkadang ada lauk daging. Sampai bulan kelima ketika tentara bertempat tinggal di Bibis, ternak yang ada di pedukuhan sudah habis. Keperluan lauk diperoleh beberapa ekor kambing yang didatangkan dari Kabupaten Gunungkidul. Kambing yang diperoleh sebanyak dua kali pengiriman, pertama sebanyak empat ekor pada bulan ketiga dan kedua, empat ekor pada bulan terakhir. Pengiriman pertama disembelih pada bulan April dan pertengahan Mei. Sumber bahan makanan terkadang didapatkan oleh tentara dengan menukarkan barang-barang yang diperoleh setelah pertempuran untuk ditukarkan makanan di desa yang dilewatinya.

Dapur umum kedua dan ketiga berada di Pedukuhan Kalipucang, menempati rumah Gonorejo dan Wiryosentono. Kedua dapur umum ini diorganisir oleh camat, sebagai penanggung-jawabnya Kepala Dukuh Kalipucang. Sumber bahan makanan didapatkan dari penduduk Pedukuhan Kalipucang dan dari Pedukuhan Mrisi. Adapun cara mengorganisir pengumpulan bahan makanan, awalnya Kepala Dukuh kalipucang memberi wewenang kepada Kumencho untuk meminta bantuan rakyat, berupa beras, sayur-mayur, ternak, dan bahan bakar. Cara lainnya, para pemuda yang dikoordinir pihak militer meminta bantuan kepada penduduk Kalipucang.

Petugas yang masak di dapur umum Pedukuhan Kalipucang dilakukan secara bergiliran jadi jumlahnya tidak menentu. Keberadaan dapur umum Gonorejo selama enam bulan, sedangkan dapur umum Wiryosentono hanya tiga bulan. Hal ini dikarenakan dapur umum Wiryosentono kemudian dipindah karena dirasa kurang aman dari

ancaman Belanda. Beras yang dimasak di kedua dapur umum ini per hari menghabiskan 60 sampai 70 kg. Beras yang dimasak lebih banyak dilakukan di dapur umum Gonorejo, kurang lebih 50 kg. Beras untuk dapur umum Gonorejo disamping dari penduduk setempat juga mendapat bantuan beras dari Pedukuhan Mrisi. Namun, dapur umum Wiryosentono hanya berasal dari sumbangan penduduk setempat. Hasil masakan kedua dapur umum ini kemudian didistribusikan untuk tentara yang tersebar di Pedukuhan Kalipucang, sebagian lagi ada yang dikirim ke Bibis. Pengiriman makanan ke Bibis dipandu oleh tentara, namun yang membawa rangsumnya penduduk setempat secara bergiliran.

Dapur umum keempat berada di rumah Kepala Dukuh Ahmad Jaelani di Pedukuhan Jipangan. Dapur umum ini merupakan kelanjutan dari yang dulu menempati rumah Wiryosentono di Kalipucang. Ahmad Jaelani selaku Kepala Dukuh menjadi penanggung jawab dapur umum tersebut. Sumber bahan mentah berasal dari sumbangan penduduk setempat. Petugas yang memasak ada lima orang. Beras yang dimasak per harinya 10 kg untuk makan dua kali. Makanan hasil olahan dapur umum ini diperuntukkan bagi tentara yang berada di Jipangan, Toyono, dan Sekatul.[14]

Disamping makanan, minuman manis juga merupakan kebutuhan yang penting karena menambah tenaga bagi tentara. Gula pasir bisa tercukupi yang didapat dari Pabrik Gula Padokan, sesaat sebelum dibumi hanguskan. Kebutuhan gula kelapa terpenuhi karena Pedukuhan Bibis merupakan penghasil gula kelapa.

3). KalurahanWonokromo, Kecamatan Pleret

Kalurahan Wonokromo, Kapanewon Gondowulung (sekarang Pleret) terdiri dari sembilan pedukuhan. Wonokromo pada masa perang kemerdekaan II menjadi basis perjuangan pasukan Komarudin. Daerah

[14] *Ibid*., hlm.12.

operasional perjuangan pasukan Komarudin tidak hanya di wilayah Wonokromo, namun sampai ke wilayah utara Wonokromo, yaitu Sorogenen, Bulu, Gandok, Ndruwo, dan sekitarnya. Pos pasukan Komarudin selalu berpindah-pindah tetapi masih dalam satu wilayah Wonokromo, antara lain pernah menempati pedukuhan Jati, Brajan, Karanganom, Wonokromo, dan Jejeran.

Pasukan Komarudin mendapat dukungan yang besar dari rakyat Wonokromo.

C. Dapur Umum Di Kota Yogyakarta

1). Djalan Ngabean N0.4

Mulai tanggal 1 Februari 1947, Sekretariat PPGD Daerah Yogyakarta bertempat di Balai Prajurit Jalan Ngabean No.4. Semua persuratan dan pengiriman berupa makanan tahan lama, pakaian, majalah, sumbangan uang dan hiburan untuk garis depan dialamatkan ke Jalan Ngabean No.4 Yogyakarta.[15]

Melalui PPGD di Jalan Ngabean No.4 ini dilakukan penerimaan dan pendistribusian bantuan logistik untuk dapur umum di medan pertempuran. Hal ini tergambarkan dalam sebuah artikel yang termuat di sebuah surat kabar sebagai berikut:

> "Kemarin telah berangkat rombongan PPGD Daerah Jogjakarta ke soeatoe tempat medan pertempoeran oentoek mengirimkan selain makanan yang sudah masak juga 3 ekor kambing hidup, 65 boeah tikar, dan beberapa snelverband. Oesaha mengirimkan makanan (lauk pauk) yang diselenggarakan oleh PPGD Daerah Jogjakarta soedah berlangsoeng sejak tanggal 1febroeari hingga 20 Febroeari ada sebanyak 430 besek makanan, 3 ekor kambing hidup dan beberapa botol kecap. Selain itu soembangan oeang yang diterima oleh PPGD. Soembangan-soembangan kini teroes mengalir".[16]

[15] Kedaoelatan Rakjat, Th.II.No.107, Kamis Wage, 6 Febroeari 1947.
[16] Kedaoelatan Rakjat,Th.II No.121, Sabtu Kliwon, 23 Febroeari 1947.

PPGD Yogyakarta melakukan pengiriman bantuan makanan ke luar daerah, di antaranya ke Jakarta karena adanya himbauan atau pengumuman dari Menteri Negara Oeroesan Makanan Dr.Soedarsono sebagai berikut:

> "Pemerintah Agoeng telah memberi perintah soepaya mengirimkan beras dan bahan makanan lain sebanyak moengkin ke Djakarta oentoek mendjamin para boeroeh dan pegawai Repoeblik kita yang sedang memperdjoengkan kemerdekaan negara kita terseboet. Sedjak pertengahan bulan Febroeari telah dikirim berpoeloeh-poeloeh ton beras ke pemerintah nasional Djakarta. Akan tetapi hal ini masih terdapat rintangan-rintangan yang didjoempai baik dari pihak yang resmi atau tidak resmi. Oleh karena itoe dengan pengoemoeman ini kami memperingatkan pada badan atau djawatan yang bersangkoetan bahwa pengiriman ini atas perintah pemerintah agoeng yang diselenggarakan oleh atau atas nama Menteri Keoeangan. Sehingga kami mohon hal ini diselenggarakan sebaik-baiknya".[17]

Pengiriman bantuan makanan ke medan pertempuran bukanlah hal yang mudah. Masa sekarang dalam jarak tempuh yang sama bisa ditempuh dalam waktu yang relatif singkat, namun ketika masa perjuangan memakan waktu seharian. Hal ini sangat menyulitkan jika harus mengirim makanan siap santap. Ada usaha membuat makanan yang lebih awet dan mudah untuk dibawa ke medan pertempuran. Atas penemuan Soedjono dari Balai Penyelidikan Perindoestrian Magelang mengenai makanan tahan lama sangat membantu dalam pendistribusian makanan dari dan ke dapur umum. Ada tiga jenis makanan tersebut yaitu:

a. Tablet yang bisa dibawa ke front dengan mudah serta ringan dan bergizi. Tablet terbuat dari nasi kering dan daging sapi kering. Nasi

[17] Kedaoelatan Rakjat, Th.II No.135, Rebo Pon, 12 Maret 1947.

ditumbuk sampai halus, daging sapi yang sudah kering ditumbuk halus dengan perbandingan 3:1 setelah itu diberi bumbu dan dipres.

b. Telur supaya tahan lama, setelah direbus dibungkus dengan parafine atau dikukus di atas api merang atau sabut supaya porinya dapat tertutup.

c. Lontong supaya tahan lama dibuat dari nasi goreng yang digoreng dengan *gemuk (vet)*, jadi tidak dengan minyak sesudah itu dibungkus daun pisang dengan rapi, tapi tidak disemat dengan *biting*. Lontong dibungkus dengan parafine agar porinya tertutup sama sekali.[18]

2). Keparakan Lor

Pasukan Sember Gelap dalam usahanya mengumpulkan dana dan logistik untuk mendukung perjuangan gerilya ada yang diusahakan sendiri dan ada yang diusahakan bersama pejabat pedukuhan. Kebutuhan beras dicukupi dengan bekerjasama dengan dukuh, yang selanjutnya meminta setiap keluarga menyerahkan dua ons beras. Pasukan Sember Gelap mendapat simpati penduduk sehingga dengan kerelaan hati membantu kebutuhan logistiknya. Di samping karena ikut membantu perjuangan, simpati penduduk tercipta karena Pasukan Sember Gelap bersama MA telah membantu mengamankan situasi. Penduduk merasa senang karena Pasukan Sember Gelap telah berhasil mengatasi pencurian ternak mereka. Pasukan Sember Gelap bersama kepala dukuh sering meminta bantuan kepada orang yang berangkat atau pulang belanja untuk dimintai bantuan seikhlasnya. Bantuan ada yang beroepa sayur, ubi, jagung, minyak kelapa, dan hasil bumi lainnya.

Pujihartono selaku RK Keparakan Lor bersama Sudiman mengatur pengumpulan dana. Jumadi dan Iskandar bertugas menarik dana atas

[18] Kedaoelatan Rakjat, Th.II No.133, Sabtu Wage, 8 Maret 1947.

perintah ketua RK dan Saleh. Mereka mengumpulkan uang, beras, rokok, dan sabun untuk kebutuhan sesama pejuang di dalam Pasukan Samber Gelap. Dana yang diperoleh dari penduduk Keparakan Lor yang dippandang mampu. Adapun penyokong dana yang dimintai bantuan antara lain: Prawiro Suyitno seorang juragan batik, Jono (juragan wenter), Karto Widodo (kemasan), dan orang tua dari Sumedi seorang juragan daging. Pencari dana lainnya adalah Pawiro Surat dan Walijo yang wilayahnya mencakup daerah Keparakan Lor, Gondomanan, Pathuk, dan sekitarnya. Keduanya meminta bantuan kepada penduduk simpatisan Republik Indonesia. Dana yang didapat keduanya biasanya berupa sumbangan uang baik federal mapun ORI.

Jumadi, Iskandar, Walijo, dan Pawiro Surat dalam mengumpulkan logistik sungguh berat karena situasi ekonomi di kota yang mengalami krisis. Pasar Gedhe Beringharjo hanya ada 25 penjual. Jual beli barang waktu itu dilakukan dengan barter antara pembeli dan penjual. Pada pagi hari ada beberapa gerilyawan yang ke pasar untuk menukar roti, kopi, coklat, gula pasir dengan beras dan sayuran. Rakyat pada umumnya enggan ke Pasar Gedhe Beringharjo lebih memilih ke Pasar Sentul dan Demangan karena ketakutan adanya operasi pembersihan Belanda. Keempat supplier logistik Pasukan Samber Gelap mengumpulkan, mengangkut barang atau bahan makanan sampai ke markas harus bisa diselesaikan dalam waktu satu hari setiap tahapnya.[19]

D. Dapur Umum Di Kulonprogo

1). Kalurahan Sidomulyo, Kecamatan Pengasih

Pasukan Siliwangi bersama keluarganya selama berada di Sidomulyo mendapat tanggapan yang cukup baik dari penduduk. Mereka mendapat bantuan makan, tetapi bagi pasukan yang memerlukan bantuan berupa uang untuk persediaan di perjalanan tidak

[19] Hardjowidjono, Dharmono, *Op.Cit*., hlm.110-114.

dapat dipenuhi. Untuk memperoleh uang, mereka menjual barang bawannya berupa sepeda gazelle, pedang samurai, perhiasan.

Daerah Sidomulyo mempunyai lahan pertanian yang subur sehingga dapat mencukupi kebutuhan jaminan makan pasukan Siliwangi dan bekal bahan makanan dapat dipenuhi. Namun, kejadian berbeda dijumpai di sebelah barat Samigaluh yang merupakan daerah gersang. Pasukan Siliwangi kesulitan mendapatkan bantuan makanan. Mereka secara paksa mengambil bahan makanan yang dijumpai di sepanjang perjalanannya, baik di rumah penduduk maupun pasar.

Pasukan Divisi Siliwangi beserta keluarganya, para gerilyawan, penduduk sipil selama tinggal di Sidomulyo, pada bulan Januari 1949, mulai dirasa sebagai beban yang berat bagi penduduk, karena sumbangan bahan makanan belum dikoordinasi dengan teratur. Hal ini kemudian ada inisiatif untuk diselenggarakan dapur umum. Bantuan bahan makanan diatur oleh masing-masing kepala dukuh dengan penyelenggaraan dapur umum yang dilakukan di setiap pedukuhan secara bergiliran dan hanya seminggu sekali. Sumbangan penduduk disesuaikan dengan hasil sawah dan ladangnya, seperti jagung, ketela pohon, cantel, beras, dan sayur-sayuran. Penarikan beras dirasakan sangat berat bagi penduduk setempat.

Penyelenggaraan dapur umum di tiap-tiap pedukuhan dilaksanakan oleh pemuda dan pemudi desa. Gerakan sosial pemudi itu dihimpun dalam wadah organisasi wanita yang dinamakan Pertiwi. Organisasi ini bekerja bahu membahu dengan pemuda yang dihimpun dalam Pager Desa. Dengan demikian Pager Desa tidak hanya membantu sebagai keamanan desa, namun juga membantu segala kebutuhan pasukan gerilya.

Dapur umum yang dikelola oleh kepala dukuh dan Pertiwi tidak untuk menjamin kebutuhan makan pengungsi penduduk sipil, namun khusus untuk memenuhi kebutuhan pasukan gerilya. Penduduk sipil yang mengungsi dibantu masyarakat secsra langsung. Setiap tuan

rumah yang ketempatan pengungsi memberikan jaminan makanan sekedarnya. Terkadang bantuan berupa bahan mentah untuk supaya dimasak sendiri. [20]

2).Kalurahan Banjarasri, Kecamatan Kalibawang

Kolonel AH.Nasution selaku komandan PTTD menempatkan Markas Komando Djawa (MBKD) di perbukitan Borogunung, Kelurahan Banjarasri. Pos MBKD ini sebelumnya berada di Desa Kepurun, karena adanya serangan dari Belanda kemudian dipindahkan ke tempat yang aman. Setelah menempuh perjalanan yang panjang sampailah di Kelurahan Banjarasri. Kolonel AH. Nasution tinggal di pedukuhan Boro. Sesampai di Boro pertama kali bertempat tinggal di rumah Martowiryo, kemudian berpindah ke rumah Kartosentiko, pindah lagi ke rumah Kartodikromo. Selanjutnya AH. Nasution menuju ke daerah perbukitan Borogunung. Daerah ini dipilih karena dirasa aman untuk perjuangan karena perbukitan Borogunung letaknya terpencil dan terlindung oleh lekukan jurang. Pedukuhan Borogunung dijadikan pos MBKD, yang bertempat di rumah Nitirejo.

Selain sebagai pos MBKD, rumah Nitirejo dan rumah penduduk sekitar berfungsi sebagai dapur umum. Seperti penuturan informan yang dipaparkan dalam Hisbaron (2003:26-27) berikut ini:

> "....Di daerah Boro ini banyak pengungsi, mereka tinggal di rumah-rumah penduduk sehingga dapat dikatakan dapur umum ada di rumah-rumah penduduk yang dipakai untuk mengungsi. Dahulu rumah saya dipakai sebagai markas, sudah tentu disini ada yang namanya dapur umum..."

[20] *Ibid*., hlm..298-299.

Guna memenuhi keperluan dapur umum itu bahan-bahan diperoleh dari penduduk setempat. Penuturan informan yang memaparkan mengenai pengumpulan bahan makanan dipaparkan dalam Hisbaron (2003:27) sebagai berikut:

> "Mencari bahan-bahan untuk dimasak dengan jalan mencegat orang-orang yang mau ke Pasar Boro dan meminta ala kadarnya. Orang-orang itu memberinya *gori* (nangka muda) dan *so* (daun melinjo muda). Kalau mau minta beras Pak Lurah menyuruh seseorang untuk meminta kepada orang yang ditnjuk yang kira-kira punya beras. Orang-orang yang akan mengikuti misa pagi dan sore juga ikut membantu memberi bahan-bahan untuk dimasak seperti *gori*, ketela, *kates, lung*, dan apa yang dipunyai dikumpulkan di rumah pak lurah. Daerah sini ada tempe, tetapi dari *mandingan*, sayurnya *gori* dan *kikil* yaitu *kulit benguk*. Selain nasi biasa juga nasi jagung."

Jumlah pengungsi yang berada di daerah Banjarasri lebih banyak penduduk sipilnya daripada militer. Hal itu disebabkan karena tentara hanya menjadikan daerah Banjarasri sebagai daerah lintasan. Tentara yang tinggal di Banjarasri, berada di Jetis dan Borogunung. Kebutuhan keseharian pengungsi dipenuhi dengan cara membeli dari penduduk setempat, sebagian lagi diperoleh dari pengumpulan hasil pertanian dan terkadang uang dari penduduk Banjarasri. Penduduk merelakan rumah mereka menjadi tempat penampungan para pengungsi. Terkadang penduduk secara bergotong royong menyediakan makanan untuk para pengungsi yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya.

3). Dusun Banaran, Desa Banjarsari, Kecamatan Samigaluh

Perjalanan pasukan MBKD sampai di Dusun Banaran pada tanggal 31 Maret 1949. Adapun rute pasukan MBKD, sebelumnya dari arah Manisrenggo kemudian melewati Jalan Yogyakarta-Kaliurang,

melanjutkan perjalanan ke barat menyeberang Kali Progo. Pada tanggal 20 Desember sampai ke Dekso, dilanjutkan ke Banaran.[21]

Dusun Banaran letaknya di perbukitan. Rumah yang jumlahnya beberapa puluh letaknya terpencar. Tanahnya kurang subur sehingga hasil padi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan makan. Penduduk tidak menyandarkan sepenuhnya untuk selalu bisa makan nasi. Mereka melakukan variasi dalam menu makannya dengan ketela, jagung, umbi-umbian, dan sukun.[22]

Di Banaran, pos MBKD menempati rumah kepala dukuh Karyoutomo. Rumah Karyoutomo digunakan sebagai markas Kolonel Simatupang dan merupakan pusat aktivitas perjuangan gerilya. Rumah ini sekaligus difungsikan sebagai dapur umum. Dapur umum diadakan untuk memberi rangsum bagi kurang lebih 150 orang pejuang dan pengungsi dari Yogyakarta. Beras untuk memenuhi kebutuhan dapur umum mendatangkan dari daerah sekitar Nanggulan Dapur umum dipimpin oleh Ny.Karyoutomo dengan dibantu oleh penduduk setempat, antara lain: Sutilah, Rujiah, Rubinah, Sadiran, Inem, dan Rubinem.

[21] Simatupang,TB., *Laporan Dari Banaran*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan. 1980: hlm. 49-50.

[22] *Ibid.*, hal.51.

Foto 4.TB.Simatupang dan istri serta Ali Budiarjo bersama Karyoutomo dan istri yang rumahnya pernah menjadi dapur umum.

Repro: Laporan Dari Banaran.

4). Kalurahan Kaligintung, Kecamatan Temon

Pada masa revolusi, Kalurahan Kaligintung juga dipakai untuk markas pejuang. Setiap rumah didiami kira-kira 10 orang gerilyawan. KODM yang ada di kalurahan ini untuk Bagian Dapur Umum dipimpin oleh Sersan Dua Pairin. Tugasnya menyediakan makan bagi pasukan gerilya yang tersebar di pos-pos perbatasan. Bahan makanan berasal dari bantuan masyarakat di wilayah Kecamatan Teman dan sekitarnya. Sub bagian penerimaan bahan makanan dipimpin oleh Harso Prawoto. Setiap kalurahan di Kecamatan Temon menyumbang bahan makan mentah berupa beras minimal satu gandum (kira-kira 8 kg) per hari. Petugas yang melaksanakan operasi penerimaan sumbangan bahan makan dari tiap kalurahan adalah personil KODM. Mengenai kayu

bakar, khusus disediakan oleh Mat Kasman (orang yang rumahnya dijadikan markas).

Bagian Dapur umum ini juga dibantu oleh Perwari (Persatuan Wanita Indonesia), suatu organisasi wanita yang berasal dari leburan Hoizinkai. Anggota Perwari yang membantu di markas sebanyak lima orang, tiga orang bertugas meminta sumbangan sayur-mayur ala kadarnya dari para bakul di pasar, sedangkan dua orang bertugas memasak di dapur. Ketiga orang anggota Perwari yang meminta bahan mentah di pasar adalah Kasiyah sebagai pemimpin dengan anggota Sumantinah dan Suwarti. Ketiganya menyerahkan hasil yang didapatnya kepada personil KODM. Personil KODM kemudian membawanya ke markas untuk dimasak. Tukang masak di dapur disamping dua orang dari anggota Perwari dibantu juga oleh dua orang yang bertugas menanak nasi (adang) yaitu Ngadino dan Wiro Pecel dari BKR.[23]

5). Kalurahan Banjarharjo

MBKD pimpinan AH.Nasution, markas komando operasional menempati rumah Nitirejo di Kelurahan Banjarasri, namun seluruh kegiatan kesekretariatan dilakukan di rumah Suparjan di Pedukuhan Padaan, Kelurahan Banjarharjo. Keberadaan kesekretariatan Markas Komando Djawa di Kelurahan Banjarharjo menjadikan daerah ini ramai dengan aktivitas kemiliteran. Kelurahaan Banjarharjo juga menjadi tempat pengungsian. Situasi ini berimplikasi dengan diperlukannya logistik untuk mendukung keberlangsungannya. Peran serta penduduk setempat sangat diperlukan. Penduduk dengan kerelaan hati menyelenggarakan dapur umum untuk menyediakan makanan bagi tentara dan para pengungsi yang memerlukan. Dalam memenuhi

[23] Hardjowidjono, Dharmono, *Op.Cit*., hlm. 414-416.

kebutuhan pangan, kepala dukuh mengkoordinasi penduduk secara bergiliran untuk memberi sumbangan bahan pangan, berupa sayuran, beras, ketela pohon, dan apa saja yang ada untuk membantu meringankan logistik pada waktu itu.[24]

6). Kelurahan Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang

Kondisi geografis Banjaroyo sebagian besar pegunungan dan dialiri dua sungai yaitu Sungai Salak dan Sungai Diro. Letaknya tersebut menjadikan daerah tersebut sulit dijangkau operasi tentara Belanda. Daerah Banjaroyo menjadi tempat pengungsian. Para pengungsi yang datang ke Banjaroyo berjumlah kurang lebih 5000 orang. Kelurahan Banjaroyo dipakai sebagai basis pertahanan para gerilya dari pegunungan Bogowonto dan Menoreh. Dapur umum untuk keperluan para gerilya dan pengungsi didirikan di hampir setiap markas dan rayon. Disamping itu para pengungsi juga mendirikan dapur umum sendiri.

D. Dapur Umum Di Gunungkidul

Pada masa Revolusi Fhisik tahun 1949, daerah Wonosari meskipun merupakan daerah yang kurang subur namun juga dapat memberi bantuan logistik atau makanan sebagai bekal bagi para gerilyawan. Hal ini dapat terjadi karena secara kebetulan pada waktu itu Wonosari, Gunungkidul pada umumnya baru saja memetik panen, dan oleh Bupati Wonosari waktu itu, KRT Suryaningrat, para pedagang diwajibkan menjual sebagian dagangan bahan makanan kepada pemerintah kabupaten dan bagi rakyat yang baru panen diwajibkan menyimpan sebagian hasil panenannya di lumbung-lumbung pemerintah yang ada di kalurahan-kalurahan. Ternyata dengan kebijakan tersebut kemudian dapat dikumpulkan bahan makanan sebanyak 2000 ton. Adapun maksud dari pengumpulan bahan makanan ini sebetulnya untuk persediaan menghadapi paceklik yang akan datang. Akan

[24] *Ibid.,* hlm.315.

tetapi dengan adanya perang gerilya ini maka persediaan makan tersebut diberikan selama tiga bulan berturut-turut, untuk seluruh pasukan gerilya dan TNI. Bantuan pangan itu berupa jagung dan gaplek, sebab hasil utama di daerah Wonosari adalah jagung dan gaplek. Bahan pangan ini dikirim melalui markas komando militer di Imogiri.[25]

Di samping itu rakyat juga menyelenggarakan dapur umum dengan menyediakan makan dan minum bagi para gerilya yang melewati atau singgah di desanya, sebagaimana yang telah diutarakan Soeratman (68th):

> "Pada waktu itu rakyat dengan suka rela telah memberikan bantuan makan kepada anggota TNI yang diserahkan melalui dapur umum, yang menyediakan makan bagi para anggota TNI dan gerilya lainnya. Tempat dapur umum ini tidak tetap atau berpindah-pindah tetapi mempunyai tempat yang dipakai sebagai pusat untuk mendapatkan informasi, di mana harus mengambil ransum bagi gerilyawan dan TNI, yaitu di tempat pemberhentian bus. Tempat ini dipilih sebab selain berada di daerah yang strategis juga karena letaknya yang berhadapan dengan pasar sehingga memperkecil kemungkinan diketahui oleh Belanda. Dapur umum ini pada intinya diurusi oleh Pemerintah Militer Kecamatan yang dibantu oleh rakyat dan palang merah. Bahan makanannya selain didapat dari sumbangan rakyat juga diambilkan dari lumbung pemerintah daerah yang memang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan perjuangan, juga untuk para pengungsi."

Ketika Kapten Widodo bersama pasukannya yang berjumlah sekitar 300 prajurit berada di Kalurahan Wareng (Siraman), para pamong bersama Pager Desa mengorganisasi konsumsi buat para gerilyawan berupa makanan yang siap disantap dalam bentuk nuk (nasi dan lauk-pauk yang dibungkus dengan daun). Makanan itu disamping berasal dari rakyat setempat juga berasal dari Kalurahan Duwet yaitu kalurahan di

[25] Astuti, Retna Sri, "Peranan SWK 105 Pada Masa perang kemerdekaan Kedua Di DIY", dalam *Patra-Widya*., Vol.3.,No.3. September. Yogyakarta: Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, Balai Kajian Jarahnitra. 2002:hlm.19.

dekat Desa Siraman yang berupa satu pikul nuk dari rumah-rumah tertentu yang telah ditunjuk untuk dapur umum, misalnya rumah Wongso Saniyem, Jiwosentono, Joyodikromo, Wongso Sangkep, dan Temu. Setiap dapur umum ini biasanya ditempati oleh rata-rata sekitar 20 sampai 25 orang gerilya.[26]

Di lain pihak, pasukan Belanda juga membuat dapur umum untuk keperluan tentaranya. Dalam kegiatan ini Belanda melibatkan penduduk di sekitar markasnya, sedangkan bahan makanannya selain berupa roti yang dibawa dari Yogyakarta kadamgkala menangkapi hewan piaraan penduduk. Tentang pengadaan dapur umum yang diselenggarakan oleh Belanda ini diutarakan oleh Sukadi (68th) demikian,

> "Untuk persiapan konsumsi, Belanda menangkapi ibu-ibu di Desa Gupakan dan Wonosari untuk disuruh memasak di dapur-dapur markas Belanda dan sorenya dipulangkan. Untuk menambah lauk-pauk, ayam-ayam kampung ditembaki dan juga ngangkuti kambing-kambing. Sedangkan bahan pangan lainnya dikirim, didrop melalui kapal terbang yang dijatuhkan di lapangan Wonosari".

1) Pedukuhan Gelaran, Kalurahan Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo

Suplai makanan bagi pejuang tidak hanya bantuan dari pemerintah, melainkan juga berasal dari penjualan sapi pemerintah sebanyak tujuh ekor dan penjualan candu pada tanggal 1 februari 1949 sebanyak 8000 impling bantuan pabrik candu di Patuk yang merupakan pindahan dari Sumpyuh, Banyumas. Kecuali dari Jawatan Candu dan Garam, dana perjuangan diambilkan dari Jawatan Kehutanan Rp.107.500,-. Dari Jawatan Praja sebesar Rp.170.000,- untuk membayar gaji anggota KDM III sebagai jatah bulan Desember dan Januari. Bantuan dari PPBM

[26] *Ibid.*, hlm.20.

Gunungkidul Rp.100.000,- untuk diberikan kepada masing-masing ODM sebesar Rp.5.000,- untuk persediaan.

Dapur umum untuk kebutuhan makan Staf KDM III, dipimpin oleh Suraji yang dibantu oleh juru masak: ibu dukuh, Ibu Suraji dan beberapa orang penduduk desa secara bergiliran. Bahan pokok berupa minyak tanah, beras, dan ikan asin mendapat jatah dari pusat. Sedangkan bahan makanan yang diperoleh dari rakyat berupa ketela dan jagung.[27]

2) Kelurahan Wareng dan Siraman

Ketika Kapten Widodo bersama pasukan yang berjumlah 300 orang berada di Kelurahan Wareng dan Siraman, pamong bersama pager desa mengkoordinir masalah konsumsi bagi para pejuang tersebut. Kebutuhan makan diperoleh dari kelurahan lain maupun dari masyarakat. Bantuan dari Kelurahan Duwet berupa satu pikul *nuk*. Di rumah penduduk Kelurahan Wareng dibuat dapur umum yang menempati rumah penduduk yang sekaligus menjadi markas masing-masing ditempatkan 20-25 orang gerilyawan. Rumah penduduk yang menjadi dapur umum, antara lain: Wongso Saniyem, Wongso Sangkep-Singkar, Jiwosentono, Joyodikromo, dan Temu. [28]

Di Kelurahan Siraman, Darsono Mangundiwarso selaku staf keamanan menempatkan para gerilyawan di 10 rumah penduduk. Kesepuluh rumah dan jumlah para gerilyawan yang tinggal di situ yaitu: Atmopawiro ada 20 orang, Sudiryo ada 6 orang, Partosentono ada 10 orang, Kertopawiro ada 6 orang, Sopawiro ada 6 orang, Kromowongso ada 6 orang, Karsogono ada 6 orang, resopawiro ada 6 orang, kartosentono ada 6 orang, dan Rejosentono ada 6 orang. Sedangkan dapur umum menempati rumah Witorejo, yang fungsinya untuk mengatur dan mengumpulkan *nuk* dari penduduk. [29]

[27] Hardjowidjono, Dharmono, *Op.Cit*., hlm. 453.
[28] *Ibid*., hlm.480.
[29] *Ibid*., hlm.481.

BAB IV
KOLEKSI MUSEUM BENTENG VREDEBURG YOGYAKARTA TERKAIT DENGAN DAPUR UMUM

Partisipasi rakyat Yogyakarta dalam membantu memenuhi kebutuhan logistik (makan dan minum) bagi para pejuang dan pengungsi ada beberapa sistem. Antara lain dengan cara spontan menyediakan makanan dan minuman di depan rumah masing-masing, menyediakan makan dan minum bagi pejuang yang menginap maupun bermarkas di rumahnya, mengumpulkan bahan makanan dari warga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan logistik pejuang, menyelenggarakan dapur umum secara bersama-sama. Kegiatan seperti tersebut hampir terjadi di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta sendiri.

Penyelenggaraan dapur umum memerlukan berbagai peralatan pendukung, baik yang terkait dengan proses memasak makanan dan minuman, maupun peralatan yang digunakan ketika menikmati hasil masakan. Pendokumentasian kegiatan dapur umum pada masa revolusi fisik di Yogyakarta bisa dilakukan dengan menyimpan benda-benda yang berperan dan menunjang kegiatan dapur umum sebagai benda koleksi museum.

Salah satu tugas museum adalah mengkomunikasikan koleksi yang dimiliki kepada masyarakat. Pameran merupakan media utama bagi museum untuk mengkomunikasikan koleksinya. Tentu saja dalam menyajikan koleksi bukan hanya sekedar proses memamerkan koleksi, tetapi harus merupakan suatu proses kreativitas sebuah pesan sebagai media atau sarana ekspresi. Koleksi yang dipamerkan harus ditampilkan dalam konteks yang luas dan tidak terbatas pada koleksi itu sendiri. Koleksi tersebut harus diletakkan dalam situasi terkait dengan sesuatu yang lain.

Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta sebagai salah satu museum sejarah perjuangan di Yogyakarta, memiliki koleksi yang terkait dengan peran

dapur umum pada masa revolusi fisik terutama di Yogyakarta. Koleksi tersebut antara lain:

A. Kabupaten Bantul

1. Nama Koleksi : Cangkir, Tempat sayur, Teko, Nampan, Dandang
   Asal Koleksi : Bapak Broto Sudarmo, Jetis Bajang, Gilangharjo, Pandak, Bantul.

Cangkir

Teko

Cangkir

Tempat Sayur

Nampan

Keterangan singkat:

Pada saat Agresi Militer Belanda I dilancarkan, usaha Angkatan Perang RI untuk melakukan pertahanan linear menemui kegagalan. Di berbagai tempat, pihak Indonesia menderita kekalahan dan Belanda berhasil menerobos garis pertahanan Indonesia.[1] Serangan Belanda tersebut berlanjut, yang dikenal dengan nama Agresi Militer Belanda II. Belanda ingin melakukan likuidasi secara cepat terhadap Republik. Agar jangan sampai mengulang pada kegagalan pada masa Agresi Militer I, maka TNI menyusun strategi baru yang berlandaskan suatu *Wehrkreise* (bahasa Jerman "lingkaran pertahanan"). Pada pertahanan ini, musuh

[1] Dharmono Hardjowidjono, *Replika Sejarah Perjuangan Rakyat Yogyakarta jilid II*, Proyek Pemeliharaan Tempat Bersejarah Perjuangan Bangsa di DIY, Yogyakarta, 1985.

dianggap datang dari segala penjuru. Pusat perlawanan berada di desa-desa. Kesatuan tentara disusun dalam unsur-unsur yang berdiri sendiri dan dapat melakukan perlawanan dalam satuan-satuan yang relatif kecil, dengan ukuran kompi.

Pada Agresi Militer II ini, pemencaran brigade dan batalyon TNI dilaksanakan sesuai dengan rencana pimpinan TNI. Pembagian TNI dalam Brigade dan Batalyon dilakukan secara cepat, kira-kira hanya dalam waktu beberapa minggu.[2] Pada awalnya pembagian daerah gerilya dibagi dalam empat sektor yaitu :

- Sektor Selatan (daerah Bantul)
- Sektor Barat A (Bantul Barat) dan B (Sleman Barat)
- Sektor Utara (daerah Sleman)
- Sektor Timur (daerah Maguwo dan Wonosari)

Kemudian pembagian *Wehrkreise* ini disempurnakan sehingga pembagian daerah gerilya berubah menjadi:

- SWK 101 meliputi wilayah kota dipimpin oleh Letnan Marsudi
- SWK 102 meliputi daerah selatan dipimpin oleh Mayor Sarjono
- SWK 103 Sektor Barat A dipimpin oleh Letkol Suhud dan Sektor Barat B dipimpin oleh Mayor Samuel.
- SWK 104 Sektor Utara dipimpin oleh Mayor Sukasno
- SWK 105 Sektor Timur dipimpin oleh Mayor Sujono
- SWK 106 khusus untuk wilayah Kulon Progo dipimpin langsung oleh Kolonel Soeharto selaku komandan Wehrkreise III.

Hasil konsolidasi daerah Bantul dan sekitarnya, termasuk dalam SWK 102 dibawah pimpinan Kapten Sardjono. Dalam SWK dibagi lagi dalam beberapa Kompi. Salah satu kompi dari SWK 102 adalah Kompi dibawah pimpinan Widodo. Pada saat melaksanakan perang gerilya, Kompi Widodo dan pasukannya pernah bermarkas di rumah Bapak Broto Sudarmo. Benda-benda inilah yang digunakan untuk kebutuhan makan dan minum oleh pasukan Kompi Widodo selama bermarkas di rumah Bapak Broto Sudarmo.

[2] Ibid, hlm. …

2. Nama Koleksi : Dandang, wajan dan susuk, nampan kayu, waskom, teko keramik, cething

Asal Koleksi : Ny. Sastro Wiharjo. Lanting I, Selopamioro, Imogiri, Bantul.

Wajan dan susuk

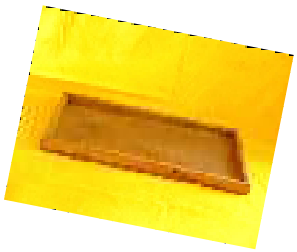

Nampan kayu

Dandang

Teko

Cething

Waskom

Sejarah singkat:

Bantul merupakan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian selatan Kota Yogyakarta. Bantul dikenal sebagai daerah otonom, sehingga kepemimpinan di daerah tersebut berkiblat pada satu figur pemimpin. Keadaan seperti itu membuat Bantul berbeda dengan daerah lain. Wibawa pemimpin daerah otonom akan berpengaruh pada stabilitas negara atau daerah.

Pedukukan Lanting merupakan salah satu wilayah Kelurahan Selopamioro, Imogori, Bantul. Kelurahan ini dibatasi Sungai Oyo di sebelah utara, di sebelah selatan dibatasi oleh Kelurahan Giritirto, di sebelah barat dibatasi oleh Kelurahan Seloharjo, dan di sebelah timur dibatasi oleh Kelurahan Banyuseco. Pada masa revolusi, lokasi ini relatif aman karena bukan merupakan lokasi yang digunakan sebagai ajang pertempuran. Secara geografis, wilayah Selopamioro sangat strategis apabila digunakan sebagai pengungsian dan markas tentara. Dataran tinggi memungkinkan tentara untuk melakukan pengawasan secara leluasa terhadap kedatangan tentara Belanda. Hal ini karena Selopamioro merupakan wilayah Bantul paling selatan. Oleh karena dianggap daerah yang aman, maka daerah ini digunakan sebagai tempat pengungsian warga sipil dan juga sebagai markas untuk mengatur strategi bagi tentara Indonesia.

Hubungan tentara dengan rakyat sangat baik, mereka saling melindungi dan membantu dalam perjuangan. Tentara berbaur dan tinggal di rumah-rumah penduduk. Untuk memenuhi kebutuhan makan dan minumnya, disediakan secara sukarela oleh penduduk. Akan tetapi, demi keamanan para tentara sering melakukan penyamaran, kadang-kadang penduduk tidak tahu siapa yang menginap di rumahnya hanya orang-orang tertentu saja yang tahu siapa sebenarnya tentara atau pejuang tersebut.

Padukuhan Lanting seperti padukuhan lainnya di wilayah Selopamioro, juga memiliki peran yang besar bagi perjuangan. Pada saat menghadapi Agresi Militer Belanda II tahun 1948, TNI bergerak ke luar kota untuk melakukan perang gerilya. Pasukan TNI selama bergerilya menggunakan rumah-rumah penduduk sebagai markasnya. Dengan adanya pasukan TNI yang bermarkas di rumah penduduk, maka kebutuhan logistik diperlukan untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum pasukan TNI. Oleh karena itu, diselenggarakan dapur umum. Salah satu dapur umum di daerah Bantul adalah rumah Ny. Sastro Wiharjo di Lanting I, Selopamioro, Imogiri, Bantul. Barang-barang inilah yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan dapur umum.

3. Nama Koleksi : Lumpang
   Asal Koleksi : Sukijan Noto Admojo, Pajimatan, Imogiri, Bantul.

Lumpang

Keterangan Singkat:

Desa Pajimatan, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah yang strategis dijadikan daerah pertahanan militer. Struktur tanah yang bergunung-gunung memberikan perlindungan secara alami dan dapat dijadikan sarana pengintaian pihak lawan, sehingga mobilitas lawan dapat diketahui. Kondisi seperti ini sangat menguntungkan, hal ini dapat dibuktikan bahwa selama perang gerilya korban dari pihak Republik Indonesia relatif kecil. Disamping itu, di daerah Pajimatan banyak terdapat bekas anggota PETA yang berasal atau tinggal di daerah tersebut. Kondisi itu memberikan peluang baik dalam menyambut tentara Indonesia dan rasa patriotisme di kalangan masyarakat sudah tinggi. Peranan bekas anggota PETA dalam membantu perjuangan gerilya juga mempercepat tumbuhnya rasa kebangsaan nasional di kalangan pejuang dan masyarakat.

Kehadiran badan-badan perjuangan yang mengungsi di daerah Imogiri, terutama di Pajimatan dan sekitarnya dan kehadiran pemimpin nasional di daerah itu memberi warna baru dalam kehidupan masyarakatnya. Rasa patriotisme dan rela berkorban tumbuh subur dikalangan mayarakat.

Peranan Imogiri dalam perjuangan dibidang bersenjata agaknya baru terasa menonjol pada saat-saat setelah Agresi Militer II, 19 Desember 1948. Sebelumnya daerah ini merupakan kawasan pedesaan yang damai dan masyarakatnya sangat loyal pada pemimpinnya. Pejuang-pejuang di garis depan baru tampak di Imogiri setelah Agresi Militer Belanda atas Kota Yogyakarta. Pengungsi militer dari dalam kota maupun pengungsi umum banyak berdatangan di Imogiri. Kedatangan para pengungsi tersebut menambah kuat kesadaran rakyat

akan pentingnya kemerdekaan Bangsa Indonesia. Rakyat menyadari bahwa kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 perlu dipertahankan, walaupun harus mempertaruhkan jiwa raga maupun harta benda yang dimiliki.

Dengan banyaknya pengungsi di daerah Imogiri menyebabkan munculnya masalah bagaimana penyediaan kebutuhan makan bagi mereka. Akan tetapi, untuk daerah Imogiri suplai bahan makanan tidak menemui masalah. Sumbangan bahan makanan diatur melalui para lurah dan pihak lain yang diberikan tanggung jawab untuk menyerahkan bahan makanan. Kemudahan dalam pengumpulan sumbangan bahan makanan di daerah Imogiri ini dikarenakan masyarakat Imogiri telah memiliki rasa patriotisme dan cinta tanah air yang tinggi. Pengalaman penindasan Belanda dan Jepang di masa lalu memberikan dorongan masyarakat untuk membenci Belanda dan tidak mau dijajah lagi. Masyarakat dengan sukarela dan penuh keikhlasan menyumbangkan harta bendanya. Sumbangan bahan makanan tersebut selanjutnya dikelola melalui dapur umum yang didirikan di rumah-rumah penduduk atau pamong desa.

Salah satu daerah Imogiri yang rumahnya digunakan sebagai dapur umum adalah rumah Bapak Sukijan Noto Atmojo. Di wilayah Bantul, tepatnya di Pajimatan, Imogiri, Bantul didirikan dapur umum yang menyediakan NUK bagi para pejuang. Lumpang ini merupakan salah satu sarana pada saat rumah beliau digunakan sebagai dapur umum.

B. Kabupaten Sleman

1. Nama Koleksi : Nampan, Ceret, Dandang, Wajan
   Asal Koleksi : Condro Sudarmo, Randusongo, Donokerto, Turi, Sleman

Dandang

Nampan

Ceret

Wajan

Keterangan Singkat:

Di daerah Yogya utara terdapat jalan utama yang menghubungkan antara Yogyakarta dan Magelang. Oleh karena itu, wilayah Yogya utara selalu dipertahankan oleh Belanda dengan kekuatan militernya. Dengan demikian, wialyah Yogya utara termasuk dalam kategori daerah yang berbahaya bagi pertahanan tentara Indonesia.

Pada masa revolusi kemerekaan Indonesia, seluruh lapisan rakyat ikut berpartisipasi aktif berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kekuatan perjuangan sangat dipengaruhi oleh persatuan dan hubungan yang baik antara rakyat dengan tentara. Disamping itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 dan 70, Kolonel A.H. Nasution selaku Panglima Tinggi Teritorium Djawa (PTTD) memberlakukan pemerintahan militer untuk seluruh Jawa. Mulai saat itulah berlaku pemerintahan militer yang membawahi pemerintahan sipil dengan basis kekuatan di desa-desa. Dengan demikian, secara langsung maupun tidak langsung perjuangan tersebut melibatkan rakyat pedesaan.

Tidak ketinggalan pula anak-anak pelajar turut berjuang, yang bergabung dalam organisasi Tentara Pelajar (TP). TP Brigade XVII pimpinan Kapten Martono mengadakan perlawanan di daerah Sleman Utara. Untuk mendukung perang gerilya, Kapten Martono dan pasukannya menggunakan rumah-rumah penduduk sebagai markasnya. Untuk menghindari serangan musuh, maka markas selalu berpindah-pindah. Salah satu rumah penduduk yang digunakan oleh pasukan Brigade XVII adalah rumah Bapak Condro Sudarmo di Randusongo, Donokerto, Turi, Sleman. Dengan difungsikannya rumahnya sebagai markas pejuang tentu saja juga menyediakan kebutuhan makan dan minum bagi para pejuang, paling tidak selama mereka bermarkas di rumahnya. Benda-benda tersebut memiliki peran untuk menyiapkan kebutuhan makan dan minum bagi para pejuang, khususnya pasukan Brigade XVII pimpinan Kapten Martono.

2. Nama Koleksi : Dandang, Kenceng, Piring, Enthong, Sendok, Nampan, Lepek, Cangkir, Bokor,Lumpang batu.

Asal Koleksi : Ny. Mulyo Sewoyo, Klaci, Margoluwih, Seyegan, Sleman

Keterangan Singkat:

Pada waktu menghadapi serangan Agresi Militer Belanda II, awalnya TNI telah menyiapkan strategi dalam menghadapinya. TNI telah menentukan daerah mana yang akan dijadikan markas. Seperti Markas Besar Komando Djawa (MBKD) telah menyiapkan Desa Kutu sebagai markasnya jika nanti Belanda menyerang dan TNI harus mundur ke luar kota. Begitu pula dengan Brigade 17

dibawah pimpinan Letnan Kolonel Sudarto telah menyiapkan Desa Kenteng sebagai tujuan, jika pasukannya harus mundur ke luar kota.

Akan tetapi, situasi dan kondisi tidak mendukung karena serangan yang dilakukan oleh Belanda dilakukan secara mendadak, sehingga tentara Indonesia dalam melakukan gerak mundur tidak bisa serentak dan arahnyapun tidak teratur. Sebagai akibatnya, hubungan antara pemimpin dengan pasukannya terputus dan mereka kehilangan kesatuannya. Untuk mengatasi hal tersebut, mereka terpaksa menentukan pangkalan sendiri. Seperti halnya Tentara Pelajar yang bergabung dalam Brigade 17, menurut rencana seharusnya mereka mundur di daerah Kenteng dan sekitarnya, tetapi karena situasi, mereka menempati Desa Karang Beran, Margoluwih, Seyegan, Sleman sebagai markasnya.

Nama Tentara Pelajar diberikan kepada Bagian Pertahanan IPI setelah melebur jadi Brigade 17 TNI pada tahun 1948 dibawah kendali MBKD. Kesatuan pelajar ini dibagi menjadi 4 Detasemen: I untuk Jawa Timur yang lebih dikenal dengan nama Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP) dibawah komando Isman; II di Solo, Semarang dan sekitarnya dibawah komando Achmadi; III di Yogyakarta, Kedu, Banyumas, Pekalongan dan sekitarnya dibawah komando Martono, serta Detasemen IV di Cirebon dan Jawa Barat umumnya dengan julukan Tentara Pelajar Siliwangi (TPS) dibawah komando Solichin. Dan satu detasemen khusus teknik bernama Tentara Genie Pelajar (TGP) dibawah komando Hartawan.

Meskipun secara resmi ada pembagian wilayah komando, pergerakan kesatuan pelajar yang hanya ada di Indonesia ini sangat fleksibel. Antara satu dan lain, komando wilayah dapat saling mendukung, bertukar wilayah atau bahkan berpindah-pindah kesatuan cukup dengan cara memberitahu markas komando atau komandan kesatuan setempat. Mobilitas kesatuan ini sangat fleksibel karena faktor situasional. Status mereka sebenarnya adalah pelajar atau mahasiswa aktif yang sewaktu-waktu negara memanggil untuk berjuang, mereka segera berubah peran sebagai tentara. Mereka berperan aktif bersama TNI dan rakyat berjuang mempertahankan kemerdekaan.

Pada Pada saat clash II tahun 1948-1949, TGP Sleman bermarkas di Dusun Klaci II, Margoluwih, Seyegan, Sleman. Mereka menempati rumah-rumah penduduk sebagai markasnya**.** Untuk kebutuhan logistik dicukupi oleh penduduk setempat, terutama yang rumahnya dijadikan markas. Salah satu rumah penduduk yang dijadikan markas, sekaligus dapur umum di wilayah Sleman barat adalah rumah Ny. Mulyo Sewoyo. Peralatan rumah tangga ini yang digunakan dalam penyelenggaraan dapur umum di rumah Ibu Mulyo Sewoyo.

3. Nama Koleksi : Piring, Nampan
   Asal Koleksi : Ny. Praptodiharjo, Pencar, Sindumartani, Ngemplak, Sleman

Keterangan singkat:

Pada Masa Agresi Militer Belanda II, bukan hanya TNI dan rakyat yang mengungsi ke luar kota. Akan tetapi dengan alasan keamanan, para pejabat pemerintahanpun banyak yang mengungsi di luar kota. Mereka tinggal di rumah-rumah penduduk, sehingga kebutuhan makan dan minum harus dicukupi oleh desa atau rumah yang didiami oleh para pejabat. Salah satu rumah yang menjadi tempat pengungsian para pejabat adalah rumah Ny. Praptodiharjo. Pada masa Agresi Militer Belanda II negara dalam keadaan kacau, sehingga berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan makan dan minum bagi tentara dan pejuang. Akan tetapi, berkat peran masyarakat Sindumartani, kebutuhan makan dan minum pejuang yang berada di wilayah Sindumartani dan sekitarnya dapat terpenuhi. Masyarakat dengan sukarela membantu para pejuang dalam bentuk makanan dengan disediakan dapur umum dan tenaga untuk kepentingan perjuangan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat pedesaan pada waktu itu sudah tinggi.

Rasa solidaritas masyarakat Sindumartani yang tinggi, rasa senasib sepenanggungan, loyal pada pemimpin merupakan satu keuntungan bagi tentara dan pejuang, karena kebutuhannya dapat dipenuhi oleh masyarakat setempat. Dalam menjalin hubungan antara tentara dengan rakyat tentu saja harus ada pihak yang menjadi perantara. Perantara tersebut adalah orang yang terpandang dan disegani ditengah masyarakat seperti Lurah, aparat pemerintah Kelurahan, dan Dukuh. Mereka yang berhadapan langsung dengan rakyat, mengatur dan memimpin rakyat. Masyarakat menyadari bahwa perjuangan adalah untuk kepentingan bersama, mereka ikut andil dalam perjuangan walaupun melalui jalur belakang sebagi kurir, perawat kesehatan, dapur umum, dan lain-lain.

Berbagai potensi yang dimiliki digunakan sebagai sarana perjuangan. Bantuan logistik dari desa itu biasanya berdasarkan keputusan Bupati,[3] sehingga pengumpulan bahan makanan tidak terjadi penyelewengan atau disalahgunakan. Demikian gambaran masyarakat Kalurahan Sindumartani.

Dusun Pencar merupakan salah satu Pedukuhan di Kelurahan Sindumartani. Pedukuhan ini seperti pedukuhan-eadukuhan lainnya juga ikut andil

[3] Ibid, hlm. 327.

dalam perjuangan pada masa Agresi Militer Belanda II. Pada saat itu Kelurahan ini menjadi salah satu tempat tujuan sebagai basis pertahanan dan tempat pengungsian masyarakat sipil dari kota.[4] Para pengungsi tinggal di rumah-rumah penduduk serta dicukupi kebutuhan makan serta perlindungannya.

Salah satu rumah penduduk yang digunakan sebagai tempat pengungsian adalah rumah Ny. Praptodiharjo. Bukti-bukti dari peristiwa tersebut dapat dilacak melalui benda-benda yang berperan pada saat itu. Benda-benda tersebut antara lain piring dan nampan. Benda-benda ini berperan dalam penyediaan makan dan minum bagi para pejuang atau pejabat yang tinggal di Pencar, Sindumartani, Ngemplak, Sleman.

4. Nama Koleksi : Wajan dan Dandang
   Asal Koleksi : Karto Dikromo, Malangan Sumberagung, Moyudan Sleman.

Dandang

Wajan

Keterangan Singkat:

Secara topografi, daerah Moyudan merupakan dataran rendah. Daerah ini dialiri oleh sungai Kruwet, Sungai Van der Wijk, dan Sungai Progo. Keberadaan beberapa sungai yang mengalir sepanjang tahun di wilayah ini menyebabkan pertanian daerah ini subur. Sebagian besar penduduk memiliki mata pencaharian sebagai petani. Keadaan seperti ini, pada masa *cultuurstelsel* sampai masa

[4] Ibid, hlm. 328.

pertengahan abad XX dimanfaatkan oleh Belanda sebagai daerah perkebunan tebu dan tembakau. Dengan dikembangkan perkebunan tebu di daerah ini, maka Belanda juga mendirikan pabrik gula di daerah Dedongan dan Padon.

Pada masa agresi Militer Belanda II di Yogyakarta, Belanda ingin menguasai lagi daerah-daerah di wilayah Moyudan yang pada masa lalu telah memberikan keuntungan yang besar bagi Belanda. Pos-pos pertahanan Belanda didirikan, yaitu di daerah Klangon serta daerah bekas pabrik gula Padon. Akan tetapi, penderitaan rakyat di masa lalu selama dibawah penindasan Belanda telah memberikan semangat di kalangan masyarakat Moyudan untuk melakukan perlawanan bersama-sama dengan TNI.

Dalam menjalankan perang gerilya dibentuk pertahanan *Wehrkreise*. Wilayah Moyudan berada di dalam Sub *Wehrkreise* 103 dibawah pimpinan Mayor Ventje Samual yang membawahi wilayah Sleman barat bagian utara jalan Yogya-Wates. Adapun beberapa satuan TNI yang pernah menetap di daerah Kecamatan Moyudan adalah:

1. Batalyon A Brigade XVI dengan komandan Mayor Palupessy. Batalyon ini terdiri dari orang-orang Sulawesi.
2. Batalyon B Brigade XVI dengan komandannya Letnan Kolonel Muzakar. Kedua batalyon dari Brigade XVI itu memberi kesan yang kurang baik pada masyarakat karena hanya memperlemah pertahanan ekonomi dan jiwa totaliter dari pamong praja.
3. Batalyon 151 dengan komandan Kapten Widodo
4. Batalyon Brimob dengan komandannya Djen Muh. Suryopranoto
5. Batalyon pasukan Brimob dengan komandannya AIP Ayatiman. Satu batalyon Brigade XVI.
6. Pasukan-pasukan Tentara Pelajar yang menggabungkan diri dengan batalyon-batalyon Brigade XVI.

Pasukan-pasukan tersebut merupakan pasukan mobil yang bergerak dan berpindah ke lain daerah dan tidak menetap di wilayah Kecamatan Moyudan saja. Selama perlawanan perang gerilya di wilayah Kecamatan Moyudan dijalin kerjasama antara aparat pemerintahan dengan TNI. Tugas dari aparat pemerintah

seperti lurah, dukuh adalah mengarahkan segala kekuatan dengan kepentingan perang dan pertahanan masyarakat. Untuk menjaga keamanan dibentuk pos-pos militer di tiap-tiap pedukuhan.

Untuk memenuhi kebutuhan logistik para pejuang gerilya disediakan oleh rakyat dengan sukarela dengan berlandaskan senasib sepenanggungan. Rumah-rumah penduduk dijadikan dapur umum untuk menopang kebutuhan makan dan minum yang melaksanakan perang gerilya di wilayah setempat.

Salah satu pedukuhan di wilayah Kecamatan Moyudan yang menyelenggarakan dapur umum adalah Pedukuhan Malangan. Untuk menjaga keamanan daerah RI maka rumah Ibu Karto Dikromo di Malangan, Sumberagung, Moyudan, Sleman dijadikan markas Brimob. Untuk mencukupi kebutuhan logistik diselenggarakan juga dapur umum yang membuat NUK (Nasi untuk Kerja) bagi para pejuang. Peralatan ini yang dijadikan sarana bagi penyelenggaraan dapur umum di rumah Ibu Karto Dikromo yang dibantu ibu-ibu lain, baik dalam pengumpulan bahan makanan sampai dengan pengolahan bahan makanan tersebut.

5. Nama Koleksi : Piring, sendok makan.
   Asal Koleksi : Siswo Sumarso, Pojok, Sendang Agung, Minggir, Sleman.

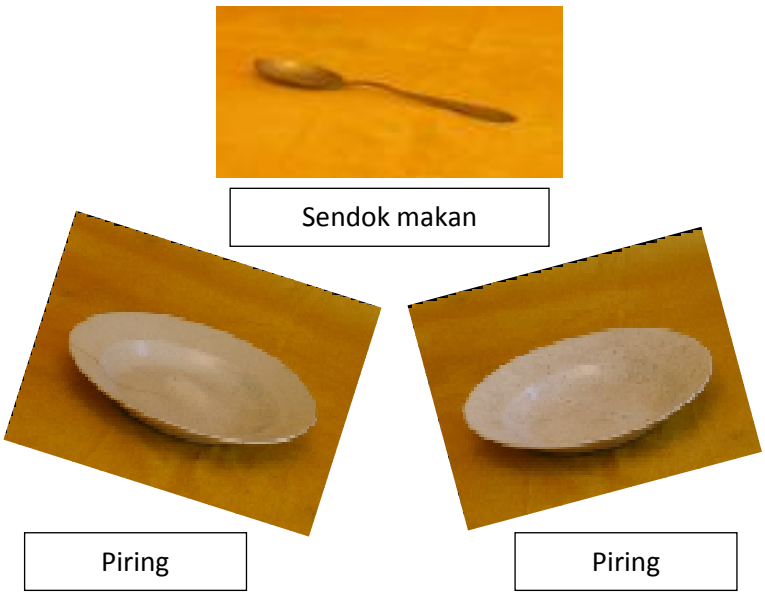

Keterangan singkat:

Kelurahan Sendangagung, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman memiliki 15 Pedukuhan yaitu: Minggir Utara, Minggir Selatan, Pojok Utara, Pojok Selatan, Watugajah, Bontitan, Saidan, Keliran, Bekelan, Tengahan Utara, Dukuhan, Naggulan, Jamblangan, dan Kisik. Berbagai peristiwa yang berkaitan dengan perang kemerdekaan di Yogyakarta terjadi di daerah ini. Pada masa clash II daerah Sendangagung menjadi markas berbagai pasukan, khususnya di dukuh Pojok. Pasukan tersebut antara lain:[5]

1. Pasukan KRIS/Brigade XVI yang dipimpin oleh Maulana Lapar, Sumilat, Pelupesi dan seorang yang bernama Kendangan, wakil gubernur Sulawesi, dengan stafnya yang berjumlah kurang lebih satu kompi.
2. Pasukan Barisan Sakit Hati yang dipimpin oleh Kahar Muzakar dan isterinya, Corie, satu Batalyon.
3. Pasukan dari kepolisian dengan stafnya yang dipimpin oleh Jenderal Moh. Suryopranoto, Sosrodanukusumo, Suberkah, Sutarto, Sunaryo, Subagyo, Wiyono, Subekti, Sukirman, Herusumardi, Amirin, Pagyo, Susardi, Legimin, Sumaryo, dan Hasan.

Mereka bertugas mengadakan gerilya dan menjaga batas kota di wilayah Yogya barat, membuat kekacauan pos-pos Belanda yang berada di wilayah itu. Selama perang gerilya tersebut pasukan Indonesia bermarkas di rumah-rumah penduduk. Adapun rumah-rumah penduduk yang dijadikan markas adalah :

1. Rumah R. Siswosumarto, digunakan sebagai kantor dan tempat tinggal pemimpin gerilya, antara lain Maulana, Kendangan, dan Kahar Muzakar.
2. Rumah R. Martosaparja, digunakan sebagai gudang penyimpanan persenjataan.
3. Rumah R. Harjosubroto dipergunakan sebagai gudang penyimpanan senjata.
4. Rumah Karkosetiko, dipergunakan sebagai tempat tinggal Sumilat.
5. Rumah Darsoatmojo, dipergunakan sebagai kantor.
6. Rumah Jemikarjo, dipergunakan sebagai kantor.

Semua pasukan gerilya menempati rumah-rumah penduduk di Desa Pojok, Desa Keliran, Desa Bekelan, dan Desa Tengahan. Daerah itu merupakan pusat

[5] Ibid, hlm. 457.

kekuatan gerilya di kelurahan tersebut. Salah satu rumah yang ditempati adalah milik Bapak Siswo Sumarto, di Pojok Sendang Agung, Minggir, Sleman. Mereka yang menempati diantaranya adalah Pasukan KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi), Brigade XVI dibawah pimpinan Maulana Lapar, Sumilat, Pelupesi, Kendangan (gubernur Sulawesi) dengan beberapa stafnya, Kahar Muzakar dengan istrinya, Corie, bersama satu batalyon pasukannya. Dengan digunakannya rumahnya sebagai markas atau tempat menginap, tentu saja juga harus mencukupi kebutuhan makan dan minum para pejuang tersebut selama bermarkas atau menginap di rumahnya. Peralatan tersebut merupakan salah satu benda yang digunakan oleh para pejuang yang bermarkas atau menginap di rumahnya.

C. Kabupaten Kulonprogo

1. Nama Koleksi : Cangkir, Lepek.
   Asal Koleksi : Karyo Utomo, Banaran, Banjarsari, Samigaluh, Kulon Progo.

Keterangan singkat:

Pada saat agresi Militer Belanda II terjadi, Belanda berhasil menduduki Ibukota RI di Yogyakarta. Sesuai rencana yang telah disetujui, maka kekuatan TNI yang masih berada di dalam Kota Yogyakarta diperintahkan segera keluar untuk melakukan perang gerilya. Perlawanan secara gerilya ini dipimpin oleh Panglima Besar Sudirman. Kolonel T.B. Simatupang sebagai wakil Kepala Staf Angkatan Perang juga meninggalkan kota untuk melakukan perang gerilya. Beliau bertugas mengatur pertahanan Jawa dan Sumatera. Selain itu, beliau juga bertugas mengatur hubungan antara Markas Besar Komando Djawa (MBKD) dengan Markas Besar Komando Sumatera (MBKS) dan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Untuk melaksanakan tugas tersebut, dibutuhkan alat komunikasi yang efektif, tenaga yang tangguh, dukungan rakyat yang kuat, dan tempat yang aman. Maka dipilihlah Dusun Banaran, Desa Banjarsari, Kecamatan Samigaluh, Kulonprogo sebagai markasnya.

Dusun Banaran dipilih karena dusun ini tempat yang aman, dekat dengan MBKD di Borogunung dan mudah berhubungan dengan MBKS. Selain itu, rakyat juga terbuka dan sangat mendukung perjuangan TNI. Rakyat melindungi semua kegiatan para gerilyawan. Rumah Bapak Karyo Utomo diperbolehkan untuk digunakan sebagai markas T.B. Simatupang yang merupakan pusat aktivitas perjuangan gerilya.

Selain itu, di rumah ini juga diselenggarakan kegiatan dapur umum selama perang gerilya berlangsung yang dipimpin oleh Ibu Karyo Utomo dibantu dengan ibu-ibu yang lain seperti Ibu Sutilah, Ibu Rujiah, Ibu Rubinah, Ibu Sudriahi Ibu Inem, Ibu Rubinem, dan sebagainya. Pada masa itu, para wanita dan ibu-ibu dengan penuh keikhlasan dan sukarela ikut berjuang melalui dapur umum, dengan menyediakan makanan dan minuman bagi para pejuang. Pemimpin TNI yang pada waktu itu tinggal di rumah Karyo Utomo adalah Kolonel T.B. Simatupang, Haryono MT, Ali Budiarjo, Sastro Pawiro, AK Gani, Ir. Dipokusumo, Makaginta, Kawilarang, Jatikusumo, dan lain-lain. Para gerilyawan dan pengungsi tinggal di

rumah-rumah penduduk di Banaran. Benda-benda tersebut berperan dalam kegiatan dapur umum di rumah Bapak Karyo Utomo yang menyediakan kebutuhan makan dan minum bagi tentara, pejuang gerilyawan, terutama yang tinggal di rumah Bapak Karyo Utomo.

D. Kabupaten Gunungkidul

1. Nama Koleksi : Kan, Bintang, lepek, piring, mangkok
   Asal Koleksi : Seton, Wareng III, Wareng, Wonosari, Gunungkidul.

Keterangan singkat:

Kecamatan Wonosari terdiri dari 14 kelurahan, yaitu: Kelurahan Gari, Karang Tengah, Piyaman, Wonosari, Selang, Kepek, Pulutan, Siraman, Wareng, Baleharjo, Karangrejek, Duwet Nulo, dan Wunung. Akibat serangan Belanda yang dikenal dengan Agresi Militer Belanda II di Yogyakarta, TNI menjadi tercerai berai dan mundur ke luar kota untuk melakukan perang secara bergerilya.

Pasukan Belanda di daerah Gunungkidul sebagian besar berada di Daerah Gading, Kecamatan Playen dan di Wonosari kota, serta bermarkas di rumah penduduk Nyoo Piek Bie (Toko Kaeiharsono sekarang).[6] Dengan demikian, daerah itu selalu menjadi incaran gerilyawan maupun TNI yang bertugas di wilayah ini, serta pasukan *wandeling* (mobil) yang berasal dari Kompi Widodo. Pasukan ini telah mendapat kepercayaan dari Brigade "o" pimpinan Letkol Suharto karena dianggap kompi yang handal.

Oleh karena persenjataan yang tidak seimbang antara tentara Republik Indonesia dengan Tentara Belanda, maka dalam melakukan perlawanan terhadap tentara Belanda, TNI tidak berani secara frontal. Pada saat itu persenjataan tentara Belanda sudah cukup lengkap dan modern. Mereka telah memiliki perlengkapan tempur seperti, water mantel, sten gun, bren, mortir, tekanto, tomson (MP), mouser, senjata LE, panser, tank beserta alat pengangkutan seperti truk dengan kekuatan satu kompi.[7]

Dalam mengadakan perlawanan terhadap Belanda di Wonosari, TNI menempuh dengan cara bergerilya pada malam hari dari beberapa arah yaitu:

1. Arah utara dipimpin oleh Thomas Raharjo dari Batalyon IV pimpinan Mayor Soejono dan berkedudukan di Nglanggeran, Pathuk.
2. Arah selatan oleh Kompi Widodo bersama regu Abdul Kayad dari Batalyon IV dibawah Mayor Soejono, berkedudukan di Desa Siraman dan Desa Wareng.

[6] Ibid, hlm. 311.
[7] Ibid, hlm. 311.

Meskipun demikian, pasukan juga sering berubah arah, misalnya dari arah tenggara. Perlawanan terhadap Belanda selain dilakukan oleh anggota TNI juga dilakukan oleh dari badan-badan perjuangan.

Untuk memenuhi kebutuhan logistik makan dan minum TNI dan pejuang yang bermarkas di wilayah tersebut, maka pamong desa dibantu rakyat setempat menyediakan kebutuhan para tentara dan gerilya dari pengadaan bahan sampai siap dikonsumsi. Bahan makanan tersebut diperoleh dari rakyat setempat dan juga dari daerah lain yang dengan sukarela menyerahkan bahan makanan, bahkan tenaganya untuk membantu perjuangan. Penyediaan NUK bagi para gerilyawan dapat diperoleh dari masyarakat langsung atau rumah-rumah tertentu, dan dari rumah yang dijadikan dapur umum. Di wilayah Kelurahan Duwet, rumah-rumah yang dijadikan dapur umum, antara lain rumah Ibu Wongso Saniyem, Mbok Wongso Sangkep-Singkar, Jiwosentono, Joyodikromo, dan Ibu Temu. Biasanya setiap dapur umum mengurusi atau menopang sekitar 20 sampai 25 orang.[8]

Persatuan antara rakyat dengan gerilyawan atau tentara pada saat itu terjalin dengan baik. Rakyat dengan sukarela membantu kebutuhan para gerilyawan seperti, tempat tinggal, makan, dan informasi yang mendukung kegiatan perjuangan. Misalnya, informasi bahwa Belanda pada waktu itu mengetahui markas TNI berada di Wonosari sebelah barat daya. Dengan informasi tersebut maka Kapten Widodo mengalihkan markasnya di sebelah timur dengan tujuan Desa Karangrejek dan Mulo. Di Desa Karangrejek, Kapten Widodo menempati rumah Sodimo. Pada hari Kamis Kliwon pukul 07.00, terjadi pencegatan terhadap patroli Belanda yang datang dari arah utara. Rencana tersebut tercium oleh Belanda, sehingga Belanda mengejar gerilyawan di Desa Dung Kubah, Duwet. Melihat kondisi tersebut, Kapten Widodo beserta anak buahnya mundur ke barat sampai di Desa Wareng.

Kompi Kapten Widodo dibawah Batalyon Sardjono mundur ke daerah Gunung Kidul dan bermarkas di rumah Ibu Saniyem (ibu Bapak Seton). Selain digunakan sebagai markas pejuang, rumah Ibu Saniyem juga digunakan sebagai dapur umum dibawah koordinasi Ibu Saniyem sendiri. Bahan-bahan makanan

[8] Ibid, hlm. 311.

untuk keperluan dapur umum diperoleh dari dusun-dusun sekitar seperti Siraman, Karang Rejek, Pulutan, Glodogan, Polaman dan Sodo. Benda-benda tersebut digunakan dalam penyelenggaraan dapur umum di rumah Ibu Saniyem.

BAB V
PENUTUP

Berdasarkan PP Nomor 19 tahun 1995, museum memiliki tugas menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan koleksi museum berupa benda cagar budaya. Dengan demikian museum memiliki dua fungsi utama yaitu pertama, sebagai tempat pelestarian yang meliputi kegiatan penyimpanan dan pengumpulan, perawatan dan pengamanan. Fungsi kedua, adalah sebagai sumber informasi dengan melakukan kegiatan pemanfaatan melalui penelitian dan penyajian. Museum sebagai sumber informasi bukan sekedar suatu hal yang merupakan atribut, tetapi merupakan tugas pokok museum. Agar data informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan, maka museum harus melakukan penggalian nilai-nilai informasi yang terkandung dalam koleksi melalui kegiatan pengkajian.

Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta merupakan museum khusus sejarah perjuangan bangsa Indonesia di Yogyakarta dan sekitarnya. Terkait fungsi tersebut, Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta dalam berbagai kegiatannya melakukan tugas melestarikan benda bernilai sejarah, baik secara wujud kebendaan (material) maupun dari nilainya. Dalam mengemban tugas sebagai sumber informasi, Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta senantiasa menggali informasi dari koleksi yang dimilikinya agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk menggali informasi maka dilakukan penelitian atau pengkajian koleksi. Informasi yang terkait dengan benda koleksi museum akan dikembangkan sebagai sarana optimalisasi penyampaian informasi kepada pengunjung museum. Selain itu, koleksi museum yang disajikan dilengkapi dengan referensi yang mendukung sehingga pengunjung akan memperoleh informasi yang selengkapnya.

Aktivitas perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan negaranya bukanlah hasil usaha dari kalangan militer saja. Perjuangan tidak hanya milik para pejuang yang berperang di medan pertempuran, namun peran rakyat juga memberi andil yang cukup besar. Militer

dan rakyat saling mendukung dan bekerjasama dalam menghadapi serangan Belanda yang ingin menjajah kembali.

Kemunculan dapur umum saat mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia merupakan suatu bentuk partisipasi di kalangan rakyat dalam berjuang. Dapur umum merupakan cerminan kepribadian dan semangat kegotong-royongan dari bangsa Indonesia yang suka menolong. Kemunculan dapur umum ditengah suasana perjuangan menjadi keuntungan bagi para pejuang yang sedang menunaikan tugas untuk bertempur. Melalui dapur umum, para pejuang memperoleh kemudahan untuk mencukupi kebutuhan makanan dan minuman selama berjuang. Tercukupinya kebutuhan makanan tentu saja mempengaruhi asupan energi yang dibutuhkan pejuang dalam melakukan aktivitasnya.

Terdapat dua versi mengenai munculnya dapur umum semasa perang kemerdekaan, yaitu: terorganisir dan spontanitas (inisiatif sendiri). Dapur umum yang sifatnya terorganisir memang ada kebijakan dari pemerintahan militer setempat yang membentuk dapur umum. Sedangkan yang sifatnya spontan, biasanya berasal dari inisitatif penduduk terutama ibu-ibu dan remaja setempat. Rakyat tidak memperhitungkan untung-rugi dan memperhitungkan darimana mendapatkan bahan makanan. Semu penduduk yang disinggahi maupun yang rumahnya dijadikan tempat tinggal pejuang, dengan kerelaan dan keikhlasan memberikan harta-benda dan tenaganya. Mereka tanpa terbebani dan dengan senang hati mengatur, menyediakan, dan mendistribusikan makanan kepada para pejuang.

Dapur umum selama perang kemerdekaan timbul atau muncul di setiap ada persinggahan para pejuang. Para pejuang yang berjuang secara gerilya di daerah yang sulit diketahui musuh menjadikan dapur umum juga muncul di daerah yang sulit dijangkau oleh musuh. Semua wilayah di Yogyakarta, terutama di empat kabupaten yaitu Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunung Kidul terdapat dapur umum. Dapur umum di wilayah tersebut berada di desa terpencil yang lokasinya tersembunyi dan sulit diketahui musuh. Lama keberlangsungan dan tempat dapur umum yang ada di wilayah Yogyakarta tidaklah sama,

tergantung situasi dan kondisi. Masing-masing dapur umum mempunyai karakteristik tersendiri, sehingga setiap tempat tidak sama.

Keberadaan dapur umum tidak dapat dipisahkan dengan markas pejuang, dimana ada markas pejuang disitu pasti ada dapur umum. Hal ini menjadikan dapur umum selain sebagai tempat penyuplai logistik, juga berfungsi sebagai tempat untuk bertemu para komandan, tempat untuk perundingan ataupun perencanaan strategi perang. Fungsi pokok dapur umum memang untuk penyuplai logistik atau makanan, namun terkadang ada fungsi lain yang menyertainya, yaitu ada anggota dapur umum yang merangkap menjadi kurir.

Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia bisa berhasil berkat bantuan rakyat di pedesaan. Disamping rakyat pedesaan, peranan pamong desa juga menentukan keberhasilan perjuangan. Melalui para pamong desa, hubungan antara rakyat dan militer (pejuang) bisa terjembatani. Hal ini memberi kemudahan keberlangsungan dapur umum. Pamong desa, terutama kepala dukuh yang selalu menggerakkan rakyat untuk berpartisipasi dalam dapur umum.

Keberhasilan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia merupakan jerih payah semua rakyat Indonesia, termasuk rakyat di Yogyakarta. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan menjadi perekat hubungan militer dan sipil. Mereka secara bersama-sama bergotong-royong, bahu-membahu untuk memenangkan perjuangan. Sesungguhnya dari sinilah para elite politik dan penentu kebijakan bisa belajar dari masa mempertahankan kemerdekaan itu. Hanya dengan modal persatuan dan kesatuan segala persoalan itu lambat-laun bisa diselesaikan. Belajar dari pengalaman ketika mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, sedikit demi sedikit persoalan bangsa akan dapat diselesaikan.